BWS
SULAWESI I MANADO

RENCANA STRATEGIS
BWS SULAWESI I MANADO
2025-2029

Sebagai salah satu keluaran dari kegiatan swakelola
7690.CBR.004.122.B "Persiapan Penyusunan Rencana Strategis 2025-2029"

KATA PENGANTAR

Dokumen ini disusun sebagai pedoman arah kebijakan sekaligus merupakan turunan operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum. Penyelarasan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap program pengelolaan Sumber Daya Air di tingkat balai berjalan tegak lurus dengan visi nasional, sehingga tercipta sinergi yang kuat antara kebijakan pusat dan implementasi teknis pada wilayah kerja sesuai dengan kewenangan.

Dalam penyusunannya, konsep Renstra ini telah memetakan berbagai isu strategis dan tantangan kewilayahan, mulai dari upaya konservasi sumber daya air, pendayagunaan air untuk ketahanan pangan dan energi, hingga pengendalian daya rusak air akibat perubahan iklim. Balai Wilayah Sungai Sulawesi I berkomitmen untuk menerjemahkan mandat nasional tersebut ke dalam program kerja yang efektif, akuntabel, dan tepat sasaran.

Kami menyadari bahwa penyusunan konsep Renstra ini masih jauh dari kata sempurna dan memerlukan sinergi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap masukan dan saran konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, akademisi, maupun masyarakat. Harapan kami, dokumen ini dapat dimatangkan menjadi landasan operasional yang kokoh, sehingga peran BWS Sulawesi I dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui infrastruktur air yang handal dapat terwujud secara optimal.

Manado, 10 Februari 2026

Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi I Manado

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
BWS SULAWESI I
DITJEN SUMBER DAYA AIR

Sudeng Harianto

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Secara Administratif Renstra 2020 - 2024 wilayah kerja Balai Wilayah Sungai Sulawesi I mencakup 2 (Dua) Wilayah Sungai yaitu WS Dumoga- Sangkub (WS DUSANG) dan WS Tondano-Sangihe-Talaud-Miangas (WS TOSATAM). Berikut adalah penjelasan terkait 2 (dua) Wilayah Sungai yang menjadi kewenangan BWS Sulawesi I.

Wilayah Sungai TOSATAM berada dalam konteks perekonomian Provinsi Sulawesi Utara yang tumbuh stabil di tahun 2025, dengan pertumbuhan ekonomi provinsi mencapai sekitar 5,39 % pada triwulan III 2025 secara tahunan dan berada di atas rata-rata nasional. Ekonomi ini didukung oleh aktivitas sektor jasa, perdagangan, ekspor, dan konsumsi domestik, mencerminkan sentimen positif terhadap kegiatan ekonomi di kawasan yang dilintasi sungai-sungai utama WS TOSATAM, meskipun karakter pertumbuhan tiap kabupaten/kota berbeda-beda. Dalam konteks kabupaten/kota di kawasan WS TOSATAM, Kota Manado berperan sangat signifikan sebagai pusat kegiatan ekonomi, sebab sekitar 68 % dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulawesi Utara berputar di Manado bersama beberapa kabupaten/kota lainnya, menjadikannya kontributor terbesar bagi ekonomi provinsi. Pada triwulan II 2025, Manado mencatat pertumbuhan ekonomi sekitar 5,74 %, berada di antara pertumbuhan tertinggi di tingkat lokal setelah Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Utara, yang menunjukkan bahwa kota ini tetap menjadi motor penggerak ekonomi regional di kawasan WS TOSATAM.

Kondisi ekonomi di wilayah sungai Dumoga-Sangkub menunjukkan tren yang berbeda antar wilayah namun secara umum tetap tumbuh positif dengan beberapa tantangan kesejahteraan. Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) memiliki persentase penduduk miskin di kisaran sekitar 7%–7,3%, menunjukkan tingkat kemiskinan yang relatif moderat di konteks Sulawesi Utara. Sementara itu, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) memiliki tingkat kemiskinan sekitar 5,8%, menempatkan wilayah ini pada posisi lebih rendah dibandingkan beberapa daerah lainnya. Di sisi pertumbuhan ekonomi,

data regional menunjukkan perekonomian di wilayah utara, termasuk Bolmong Utara sebagai bagian dari kawasan, tumbuh positif 4,85% pada triwulan II-2025, mencerminkan aktivitas ekonomi yang stabil. Sedangkan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) masih menghadapi tekanan kemiskinan yang lebih tinggi, dengan data menunjukkan persentase kemiskinan sekitar 11–12%. Pada Kota Kotamobagu, peran sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional terlihat dari indikator sosial ekonomi yang lebih baik dibanding wilayah kabupaten di sekitarnya. Kota ini mencatat tingkat kemiskinan sekitar 5,12% per akhir 2024, termasuk di antara yang terendah di Sulawesi Utara. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kotamobagu juga relatif tinggi dan menunjukkan kualitas hidup yang lebih baik di wilayah urban ini. Secara keseluruhan, meskipun masing-masing daerah memiliki dinamika sendiri, pertumbuhan ekonomi regional terlihat tetap positif dengan upaya menekan kemiskinan—terutama dengan kemajuan indikator sosial di kota dan kabupaten yang menunjukkan arah perbaikan kesejahteraan masyarakat.

1.1.1 WS Dumoga-Sangkub

Wilayah Sungai Dumoga-Sangkub yang selanjutnya disingkat WS. DUSANG, berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 162/KPTS/M/2017 Tanggal 21 Maret 2017 tentang Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Dumoga - Sangkub merupakan WS yang berada pada Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo yang memiliki luas daratan 8.502,6 km2 terletak pada posisi 0° 15‟ 0” LU – 1° 0‟ 00” LU dan 123° 0‟ 0” – 124° 50‟ 0”„ BT terdiri dari lima puluh lima Daerah Aliran Sungai (DAS), dimana DAS utama yaitu: 1) DAS Sangkub (Luas 1.318 km2) dengan Sungai Utama Ongkako Sangkub (± 77,5 km), dan 2) DAS Lombagin (Luas 2.048 km2) dengan sungai utama Ongkag Lombagin (± 130,30 km). DAS Lombagin sebagai DAS terbesar pada WS dumoga sangkub,berada di antara sembilan DAS yang mengaliri wilayah ini, yang pola alirannya cenderung bercabang (dendritik) maupun sejajar, menandakan struktur topografi dan tata aliran yang khas pada kawasan pegunungan serta dataran.

Tabel 1 – Nama DAS dan LUAS WS Dumoga-Sangkub

No.	Nama DAS	Luas DAS (km2)	No.	Nama DAS	Luas DAS (km2)
1	DAS Andagile	302,5	29	DAS Limbonugo	27,4
2	DAS Tuntung	97,6	30	DAS Buyat	135,5
3	DAS Kaidipang	48,8	31	DAS Tombolikat	81,9
4	DAS Bolangitang	359,1	32	DAS Togid	175,3
5	DAS Nunuka	37,4	33	DAS Motongkad	55,6
6	DAS Saleo	36,4	34	DAS Molobog	130,7
7	DAS Bohabak	22,8	35	DAS Nuangan	241,4
8	DAS Biontong	122,0	36	DAS Unggunoi	199,2
9	DAS Sangkub	1502,8	37	DAS Tobayagan	98,2
10	DAS Sapanae	53,6	38	DAS Matandoi	107,3
11	DAS Maelang	103,6	39	DAS Mopungu	102,8
12	DAS Ayong	291,7	40	DAS Mataindo	113,4
13	DAS Bayabuta	28,1	41	DAS Kombot	65,8
14	DAS Toraang	75,6	42	DAS Tolotoyan	39,6
15	DAS Lolak	132,5	43	DAS Pinolosian	137,7
16	DAS Panag	36,8	44	DAS Linawanmoloben	19,1
17	DAS Lombagin	2335,5	45	DAS Modedegu	4,6

No.	Nama DAS	Luas DAS (km2)	No.	Nama DAS	Luas DAS (km2)
18	DAS Tadoy	37,2	46	DAS Modisi	5,8
19	DAS Letung	108,2	47	DAS Batuhamba	2,2
20	DAS Kakumi	3,0	48	DAS Panango	8,5
21	DAS Tambu	1,1	49	DAS Wolimango	3,4
22	DAS Patolo	1,1	50	DAS Milangodao	2,9
23	DAS Onsongo	1,2	51	DAS Tolondadu	65,1
24	DAS Kawiley	1,8	52	DAS Salango	125,9
25	DAS Antoni	4,0	53	DAS Tangagah	260,0
26	DAS Labuk	9,7	54	DAS Milangodaa	161,8
27	DAS Potaay	15,1	55	DAS Pilolahunga	258,7
28	DAS Nonapan	103,2	Total		8.502,6

Tabel 2 – Luas Berdasarkan Wilayah Sungai Administrasi Pada WS Dumoga-Sangkub

No	Kabupaten/Kota	Luas Keseluruhan (km2)	Luas dalam WS. Dumoga-Sangkub (km2)	Persentase Luas Terhadap WS.	Persentasi Terhadap Luas Administrasi Kabupaten/Kota
1	Gorontalo Utara	1.777	229,2	2,70%	12,9%
2	Bolaang Mongondow	3.506	3.506,2	41,24%	100,0%
3	Bolaang Mongondow Selatan	1.932	1.932,3	22,73%	100,0%
4	Bolaang Mongondow Timur	910	910,2	10,70%	100,0%

No	Kabupaten/Kota	Luas Keseluruhan (km2)	Luas dalam WS. Dumoga-Sangkub (km2)	Persentase Luas Terhadap WS.	Persentasi Terhadap Luas Administrasi Kabupaten/Kota
5	Bolaang Mongondow Utara	1.857	1.856,7	21,84%	100,0%
6	Kota Kotamobagu	68	68,1	0,80%	100,0%
		10.05	8.502,6	100,00%	

Sumber: Pembagian DAS Peraturan Menteri PUPR No. 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai dan Hasil Analisis 2015

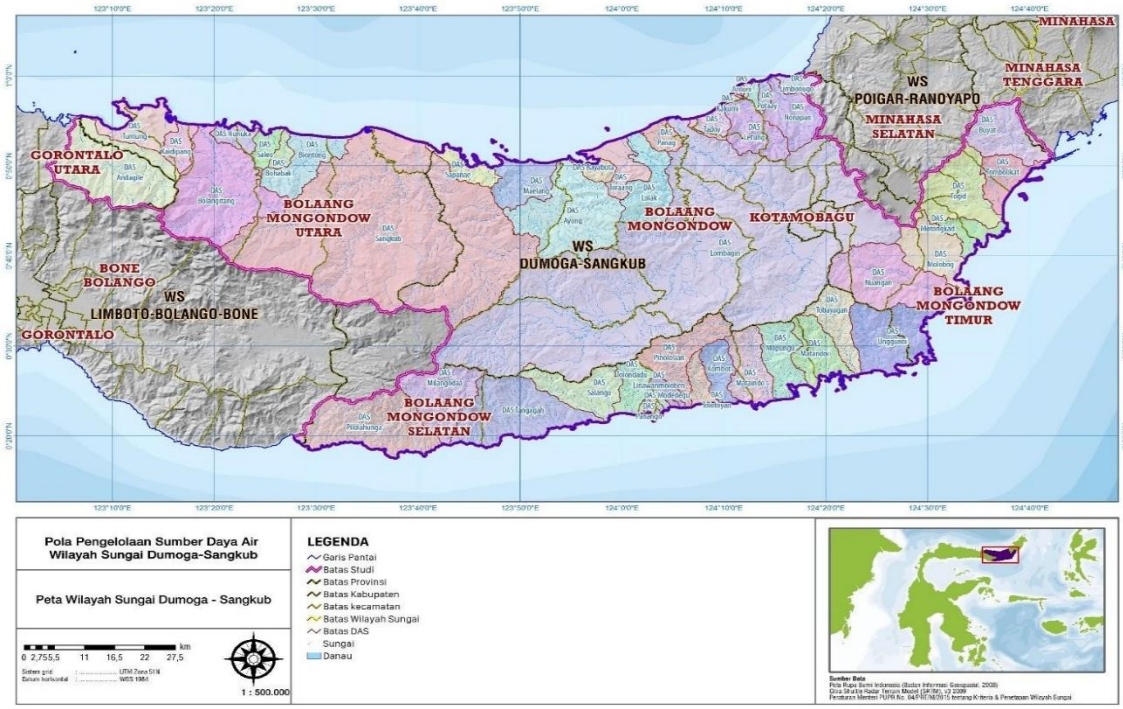

Sumber: Peraturan Menteri PUPR No. 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai

Gambar 1 – Wilayah Sungai Dumoga-Sangkub berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 04/PRT/M/2015

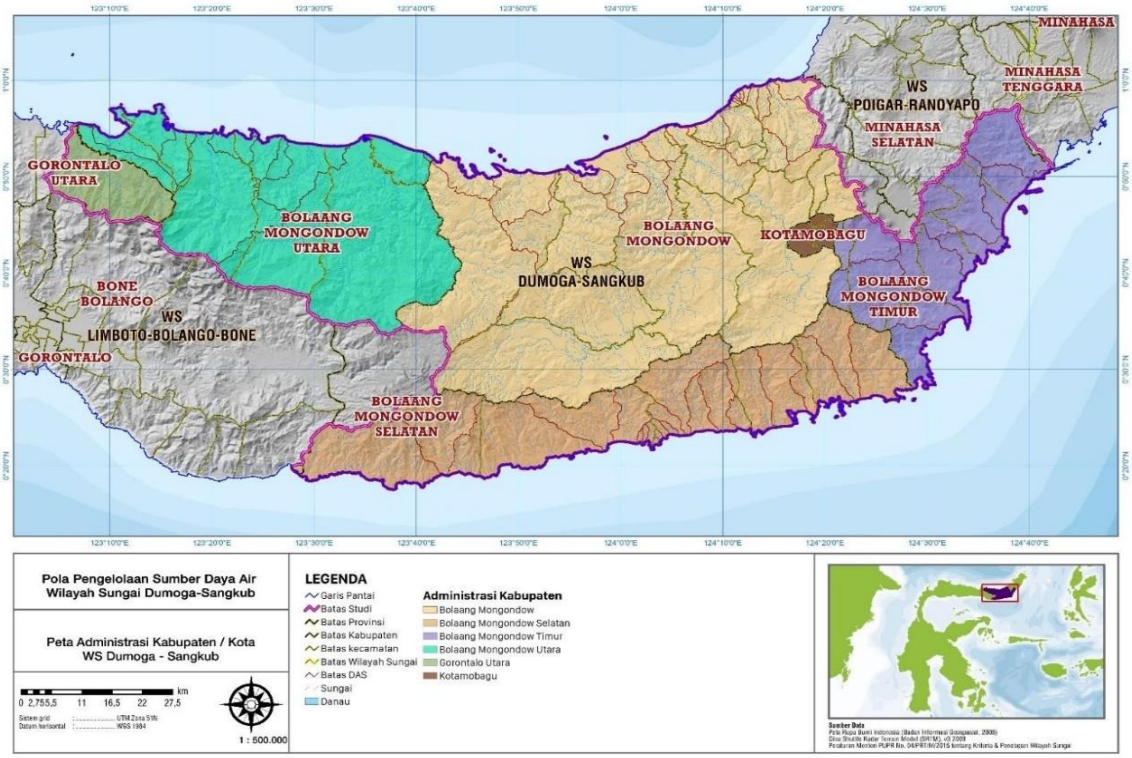

Sumber: Peta Rupa Bumi Indonesia 1:50.000 Tahun 2015

Gambar 2 - Peta Administrasi Kabupaten/Kota di WS. Dumoga-Sangkub

1.1.2 WS Tondano-Sangihe-Talaud-Miangas

WS Tondano-Sangihe-Talaud-Miangas terdiri atas 89 (delapan puluh sembilan) DAS, dengan luas total 469.467,70 ha seperti tersaji pada berikut:

Tabel 3 – WS Tondano-Sangihe-Talaud-Miangas Menurut DAS

No.	Nama DAS	Luas (Ha)	Lokasi (Kabupaten /Kota)
1	DAS Miangas	1.022,21	Kepulauan Talaud
2	DAS Nanusa	3.036,68	Kepulauan Talaud
3	DAS Bulude	1.965,73	Kepulauan Talaud
4	DAS Lalue/Essang	8.351,49	Kepulauan Talaud
5	DAS Arangka	4.718,36	Kepulauan Talaud
6	DAS Ranada/Bannada	1.372,91	Kepulauan Talaud
7	DAS Amat	1.850,42	Kepulauan Talaud
8	DAS Dapihe	1.462,37	Kepulauan Talaud
9	DAS BatumbalangoTataou	373,33	Kepulauan Talaud
10	DAS Talaud/Lobbo	34.834,63	Kepulauan Talaud

No.	Nama DAS	Luas (Ha)	Lokasi (Kabupaten /Kota)
11	DAS Talura/Beo	2.513,47	Kepulauan Talaud
12	DAS Daran	3.962,63	Kepulauan Talaud
13	DAS Niampak	9.287,73	Kepulauan Talaud
14	DAS Bowonbaru	1.828,18	Kepulauan Talaud
15	DAS Mala	2.525,48	Kepulauan Talaud
16	DAS Pampalu/Tarun	3.133,64	Kepulauan Talaud
17	DAS Sawang	1.630,91	Kepulauan Talaud
18	DAS Kolongan	2.354,35	Kepulauan Talaud
19	DAS Sare/Ambira	802,31	Kepulauan Talaud
20	DAS Balang	1.505,39	Kepulauan Talaud
21	DAS Moronge/Lentean	3.657,22	Kepulauan Talaud
22	DAS Batuniris	415,08	Kepulauan Talaud
23	DAS Salibabu/Dalawan	862,88	Kepulauan Talaud
24	DAS Kabaruan	9.562,61	Kepulauan Talaud
25	DAS Bahang	1.232,38	Kepulauan Sangihe
26	DAS Patung	900,68	Kepulauan Sangihe
27	DAS Moade	1.170,46	Kepulauan Sangihe
28	DAS Panumbuhing	558,74	Kepulauan Sangihe
29	DAS Batumahamu	551,35	Kepulauan Sangihe
30	DAS Bunahe	728,44	Kepulauan Sangihe
31	DAS Bunga	464,79	Kepulauan Sangihe
32	DAS Kekewang	1.701,86	Kepulauan Sangihe
33	DAS Bouwung	1.492,80	Kepulauan Sangihe
34	DAS Aluma	1.026,06	Kepulauan Sangihe
35	DAS Sangihe/Mahena	1.540,70	Kepulauan Sangihe
36	DAS Mahemba	3.320,41	Kepulauan Sangihe
37	DAS Malebuhe	1.551,15	Kepulauan Sangihe
38	DAS Kaluahagi	1.443,24	Kepulauan Sangihe
39	DAS Mentiki	901,71	Kepulauan Sangihe
40	DAS Petta	4.362,12	Kepulauan Sangihe

No.	Nama DAS	Luas (Ha)	Lokasi (Kabupaten /Kota)
41	DAS Kuma	9.240,64	Kepulauan Sangihe
42	DAS Bahoi	469,60	Kepulauan Sangihe
43	DAS Taminggihi	662,92	Kepulauan Sangihe
44	DAS Banaja	1.234,63	Kepulauan Sangihe
45	DAS Pepulu	413,44	Kepulauan Sangihe
46	DAS Peliang	3.354,81	Kepulauan Sangihe
47	DAS Pananaru	1.891,71	Kepulauan Sangihe
48	DAS Dagho	826,68	Kepulauan Sangihe
49	DAS Kaluwatu	666,37	Kepulauan Sangihe
50	DAS Kalihiang	14.495,29	Kepulauan Sangihe
51	DAS Kalama	563,56	Kepulauan Sangihe
52	DAS Kahakitang	1.017,11	Kepulauan Sangihe
53	DAS Para	344,56	Kepulauan Sangihe
54	DAS Siau	12.306,16	Kepulauan Sitaro
55	DAS Tagulandang	6.881,74	Kepulauan Sitaro
56	DAS Biaro	2.352,06	Kepulauan Sitaro
57	DAS Kalasey	2.038,89	Kota Manado
58	DAS Kolongan	1.312,39	Kota Manado
59	DAS Malalayang	5.955,47	Kota Manado/Tomohon
60	DAS Sario	2.056,46	Kota Manado
61	DAS Tondano	54.488,18	Kota Manado/Tomohon /Kabupaten Minahasa
62	DAS Maasing	1.028,33	Kota Manado
63	DAS Bailang	9.899,17	Kota Manado
64	DAS Kima	6.560,15	Kota Manado
65	DAS Talawan	12.822,59	Minahasa Utara
66	DAS Walangan	4.752,25	Minahasa Utara
67	DAS Mansilong	3.241,05	Minahasa Utara
68	DAS Batu	9.113,58	Minahasa Utara
69	DAS Likupang	7.460,75	Minahasa Utara

No.	Nama DAS	Luas (Ha)	Lokasi (Kabupaten /Kota)
70	DAS Maen	6.684,61	Minahasa Utara
71	DAS Batuputih	17.568,62	Minahasa Utara
72	DAS Posongdolong	5.394,23	Kota Bitung
73	DAS Girian	10.650,95	Minahasa Utara
74	DAS Bendungan Kema	4.191,77	Minahasa Utara
75	DAS Sawangan	12.284,94	Minahasa Utara
76	DAS Bulo	16.634,85	Minahasa
77	DAS Buraran	8.433,02	Minahasa
78	DAS Kaweruan	8.077,07	Minahasa
79	DAS Manembo	9.553,88	Minahasa Tenggara
80	DAS Kosal	14.137,18	Minahasa Tenggara
81	DAS Molompar	21.778,97	Minahasa Tenggara
82	DAS Wawosen	3.282,62	Minahasa Tenggara
83	DAS Totok	11.504,01	Minahasa Tenggara
84	DAS Bunaken	827,05	Kota Manado
85	DAS Manadotua	1.043,05	Kota Manado
86	DAS Mantehage	1.830,48	Kota Manado
87	DAS Talise	1.954,84	Minahasa Utara
88	DAS Bangka	4.438,27	Minahasa Utara
89	DAS Lembeh	5.769,83	Kota Bitung
Jumlah	469.467,70		

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2012

DAS Tondano sebagai DAS Terbesar didalam WS TOSATAM adalah salah satu wilayah aliran sungai utama di Provinsi Sulawesi Utara yang mencakup wilayah administratif Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Manado, dan Kota Tomohon. DAS ini memiliki luas sekitar 544,75 km² dan mencakup Danau Tondano sebagai bagian penting dari sistemnya. Danau Tondano sendiri mencakup sekitar 8 % dari total luas DAS Tondano dan berfungsi sebagai reservoir air utama serta pusat kegiatan lingkungan dan ekonomi di kawasan tersebut. DAS Tondano menjadi sumber utama air baku

bagi penduduk, irigasi pertanian, tenaga listrik melalui pembangkit hidro (PLTA), dan berperan strategis terhadap aktivitas masyarakat hingga ke Kota Manado. Secara fungsional, DAS Tondano memiliki peran yang sangat strategis: menjaga ketersediaan air permukaan dan tanah, mendukung produksi pertanian di dataran rendah, serta menjadi sumber energi listrik dan air minum. Sistem sungai ini juga dikenal dengan frekuensi banjir yang relatif tinggi terutama di wilayah hilir seperti Kota Manado apabila curah hujan ekstrem terjadi, karena kontur tanah yang landai dan aliran sungai yang cepat. Tantangan utama yang dihadapi DAS ini termasuk pendangkalan akibat sedimentasi, degradasi kualitas air akibat limbah serta perubahan tata guna lahan di hulu, serta risiko banjir di kawasan permukiman. Untuk itu, pemeliharaan kondisi DAS melalui rehabilitasi lingkungan, penanaman vegetasi penahan erosi, serta peran aktif masyarakat dalam konservasi menjadi hal yang terus didorong oleh pemerintah dan berbagai komunitas lokal. Secara administratif WS Tondano-Sangihe-Talaud-Miangas berada di sebagian wilayah Provinsi Sulawesi Utara, dengan luas sekitar 16.059 km2. Secara geografis Wilayah Provinsi Sulawesi Utara terletak antara 00˚15’51’ – 05˚34’06’ LU dan antara 123˚07’00’ – 127˚10’30’ BT. Provinsi Sulawesi Utara yang terdiri atas 11 (sebelas) kabupaten dan 4 (empat) kota. Dari 15 (lima belas) kabupaten/kota tersebut, yang masuk kedalam WS Tondano-Sangihe-Talaud-Miangas, adalah 6 (enam) kabupaten dan 3 (tiga) kota yang terbagi dalam 100 (seratus) Kecamatan dan 1.110 (seribu seribu seratus sepuluh) desa.

Tabel 4 – Kabupaten/Kota yang masuk WS TOSATAM

No.	Kabupaten/Kota	Ibukota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa
	Kabupaten			
1	Minahasa	Tondano	21	237
2	Kepulauan Sangihe	Tahuna	15	167
3	Kepulauan Talaud	Melonguane	19	153
4	Minahasa Utara	Airmadidi	10	125
5	Kepulauan Sitaro	Ondong Siau	10	84
6	Minahasa Tenggara	Ratahan	7	144
	Kota			
7	Manado	Manado	9	87

No.	Kabupaten/Kota	Ibukota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa
8	Bitung	Bitung	8	69
9	Tomohon	Tomohon	3	44
WS Tondano-Sangihe-Talaud-Miangas			100	1.11

Sumber: Hasil Analisis GIS, Tahun 2014

Sekitar 7,59% yang merupakan bagian dari Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kota Tomohon tidak masuk dalam WS Tondano-Sangihe-Talaud Miangas.

Tabel 5 - Jumlah Kecamatan dan Desa di WS Tondano-Sangihe-Talaud-Miangas menurut Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/Kota	Ibukota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa
	Kabupaten			
1	Minahasa	Tondano	21	237
2	Kepulauan Sangihe	Tahuna	15	167
3	Kepulauan Talaud	Melonguane	19	153
4	Minahasa Utara	Airmadidi	10	125
5	Kepulauan Sitaro	Ondong Siau	10	84
6	Minahasa Tenggara	Ratahan	7	144
	Kota			
7	Manado	Manado	9	87
8	Bitung	Bitung	8	69
9	Tomohon	Tomohon	3	44
WS Tondano-Sangihe-Talaud-Miangas			100	1.11

Sumber: Hasil Analisis dari Data BPS Provinsi Sulawesi Utara, Tahun 2013

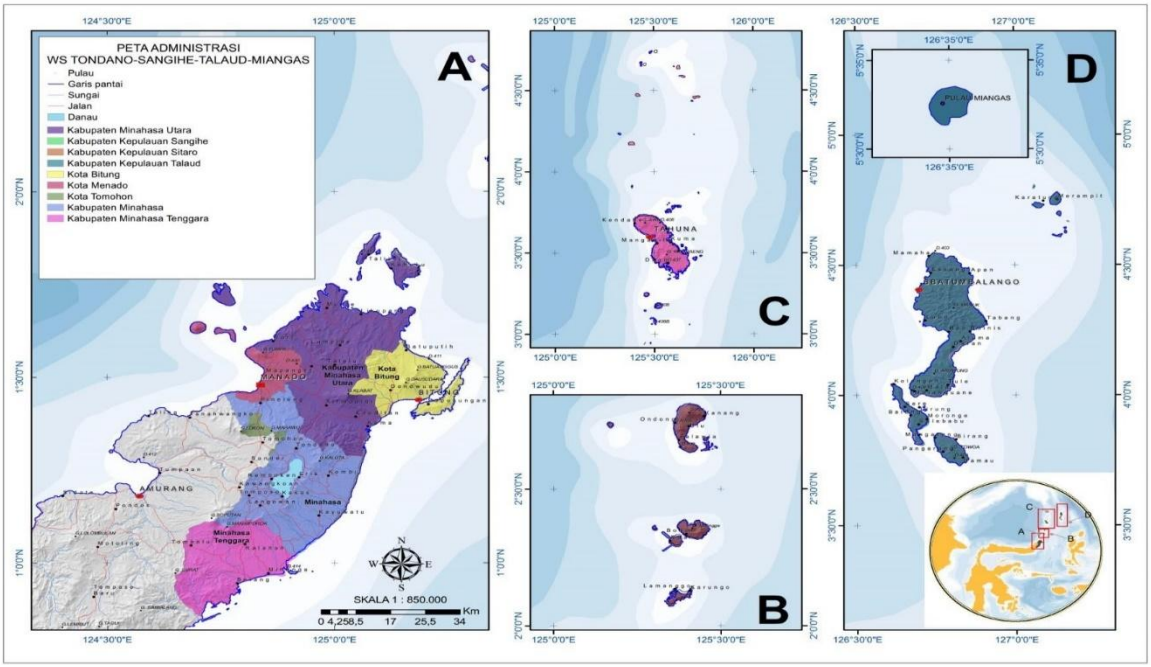

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2012

Gambar 4 - Peta Administrasi WS Tondano-Sangihe-Talaud-Miangas

Karena luas dan sangat beragam serta kondisi topografi dan geografi WS Tondano-Sangihe-Talaud-Miangas ini, yang terdiri dari bagian daratan dan gugusan kepulauan, maka dalam analisis hidrologi/neraca air, yang berhubungan dengan Aspek Pendayagunaan Sumber Daya Air, dibagi-bagi dalam beberapa zona yang didasarkan pada karakter hidrologis berbagai bagian tersebut. Pengelompokan zona ini didasarkan pada kondisi topografi yang memungkinkan interaksi secara hidrologis. Sedangkan untuk kepulauan masing-masing pulau dianggap berdiri sendiri. Atas dasar itu, maka secara garis besar seluruh WS dibagi dua zona utama, yaitu Zona Daratan dan Zona Kepulauan. Selanjutnya Zona Daratan dibagi menjadi dua, yaitu Zona Daratan Bagian Utara dan Zona Daratan Bagian Selatan, sedangkan untuk Zona Kepulauan dikelompokkan dalam tiga zona, yaitu Zona Kepulauan Sangihe, Zona Kepulauan Talaud dan Zona Kepulauan Siau-Tagulangan-Biaro (Sitaro), seperti diperlihatkan pada Gambar Selanjutnya analisis pendayagunaan dilakukan berdasarkan zonasi tersebut.

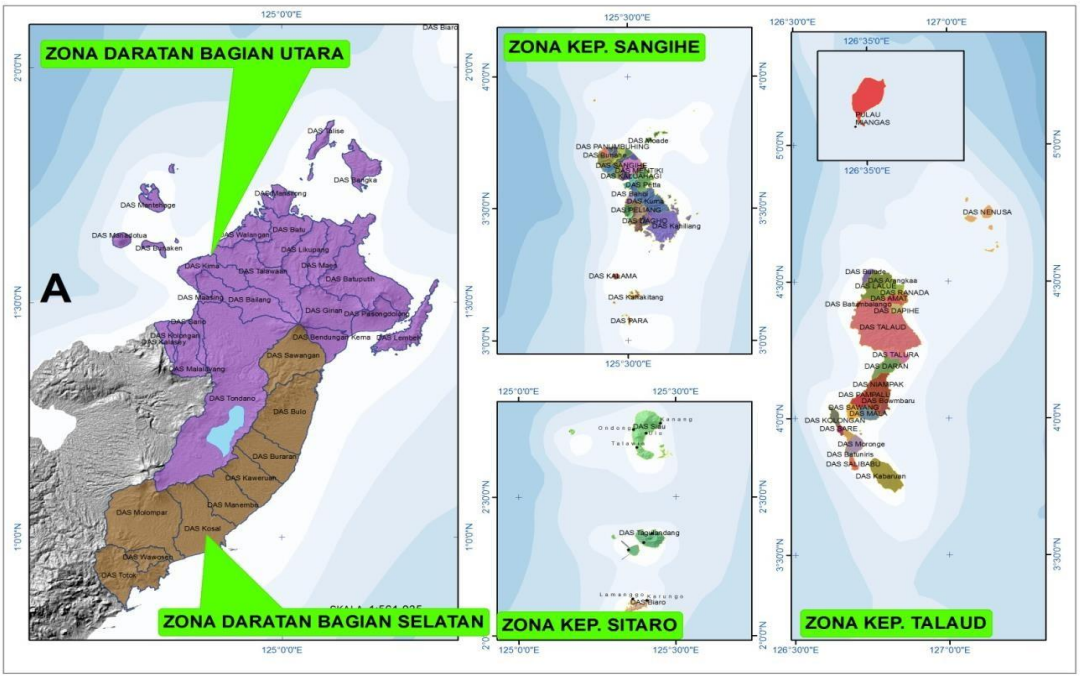

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2014

Gambar 5 – Zona Daratan dan Kepulauan
WS Tondano-Sangihe-Talaud-Miangas

1.1.3 Capaian Periode Sebelumnya

Pada tahun anggaran 2020-2024, BWS Sulawesi I telah berhasil merealisasikan beberapa kegiatan yang bersifat major baik fisik dan nonfisik terkait dengan pengelolaan SDA dengan performa tahunan berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2020 sampai dengan 2024 sebagai berikut:

1) Perjanjian Kinerja Tahun 2020

- Jumlah penambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku yang terbangun 0,001 m³ /detik
- Penurunan luas Kawasan terkenan dampak banjir 6 Ha
- Jumlah kumulatif penambahan kapasitas tamping sumber-sumber air yang dibangun 0,144 juta m³
- Jumlah luas daerah irigasi yang direhabilitasi melalui APBN, APBD dan DAK 1.091 Ha
- Tingkat layanan prasarana SDA 40,63%
- Dengan demikian, hingga tahun 2024, peningkatan kapasitas layanan air baku mencapai 0.632 m³/detik

2) Perjanjian Kinerja Tahun 2021
   - Jumlah penambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku yang terbangun 0,026 m³/detik
   - Penurunan luas kawasan terkena dampak banjir 124 Ha
   - Jumlah kumulatif penambahan kapasitas tampung sumber-sumber air yang dibangun 0,000174 Miliar m³
   - Jumlah luas daerah irigasi yang direhabilitasi melalui APBN, APBD dan DAK 4.883 Ha
   - Tingkat layanan prasarana SDA 60,40%
3) Perjanjian Kinerja 2022
   - Jumlah penambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku yang terbangun 0,055 m³/detik
   - Penurunan luas kawasanan terkena dampak banjir 42,4 Ha
   - Jumlah kumulatif penambahan kapasitas tampung sumber-sumber air yang dibangun 0,04319 Miliar m³
   - Jumlah potensi tenaga listrik dari infrastruktur SDA 3,83 MW
   - Jumlah luas daerah irigasi yang direhabilitasi melalui APBN, APBD dan DAK 3841 Ha
   - Tingkat layanan prasarana SDA 85,26%
4) Perjanjian Kinerja Tahun 2023
   - Jumlah penambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku yang terbangun 0,476 m³/detik
   - Penurunan luas Kawasan terkena dampak banjir 26,5 Ha
   - Jumlah kumulatif penambahan kapasitas tampung sumber-sumber air yang dibangun 662,42 Juta m³
   - Jumlah potensi tenaga listrik dari infrastruktur SDA 3,83 MW
   - Jumlah luas daerah irigasi yang direhabilitasi melalui APBN, APBD dan DAK 946,5 Ha
   - Jumlah DAS yang menerapkan modernisasi hidrologi 1 DAS
   - Tingkat layanan prasarana SDA 67,67%
   - Tingkat kualitas dukungan manajemen 100%
5) Perjanjian Kinerja Tahun 2024

- Jumlah penambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku yang terbangun 0,0695 m³/detik
- Penurunan luas Kawasan terkena dampak banjir 16,1 Ha
- Jumlah luas daerah irigasi yang direhabilitasi melalui APBN, APBD dan DAK 189,54 Ha
- Tingkat layanan prasarana SDA 68,28%
- Tingkat kualitas dukungan manajemen 100%

Beberapa kegiatan-kegiatan major yang menunjang perolehan jumlah kinerja di tahun 2020-2024 antara lain adalah:

- Penyelesaian Bendungan Kuwil-Kawangkoan dan Bendungan Lolak
- Hingga tahun 2024 terdapat 2 Bendungan dengan kapasitas tampung 16 juta m^3 (Bendungan Lolak) dan 26 juta m3 (Bendungan Kuwil-Kawangkoan)
- Pembangunan tanggul banjir
  - Revitalisasi danau tondano
  - KSPN Likupang
- Pembanguan Pengaman Pantai
  - Amurang
  - Batupinagut
  - Miangas
  - Hingga tahun 2024, pembangunan pengendali banjir dan pengaman pantai sepanjang 20,4 km, terdiri dari pengendali banjir sepanjang 12,3 km dan pengaman pantai sepanjang 8,1 km
- Pembanguan jaringan irigasi
  - Rehab DI Toraut
  - Rehab DI Kosinggolan
- Peningkatan dan Optimalisasis kapasitas air baku terbangun sebesar
  - Bendungan Lolak
  - Air Baku Kota Tomohon
  - Air Baku KEK Likupang

1.2 Potensi dan Permasalahan

1.2.1 Tantangan, Potensi dan Isu Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum

A. Target Penyediaan Air Bersih

Sesuai dengan target sasaran ke-6 SDG's untuk memastikan ketersediaan dan pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan 100% pada tahun 2030.

Dalam konsep IWRM ketahanan air mencakup perlindungan terhadap sistem sumber daya air yang rentan, termasuk pelayanan air, perlindungan terhadap daya rusak air (banjir dan kekeringan), dan terkait dengan pembangunan berkelanjutan sumber daya air dan menjamin akses terhadap fungsi dan pelayanan air.

Banjir dan kekeringan yang terjadi di WS disebabkan oleh semakin menurunnya daya tampung lahan terhadap air hujan akibat alih fungsi lahan, serta menurunnya kemampuan sarana dan prasarana Sumber daya air akibat meningkatnya sedimentasi.

1) Ketahanan Air WS TOSATAM

Untuk mencapai target program pemerintah dan SDG's di WS TOSATAM, PDAM mengembangkan potensi air bersih dengan kapasitas sebesar 4,97 m3/dt diseluruh kabupaten/kota dalam WS Tondano-Sangihe-Talaud-Miangas, sementara tingkat pelayanan saat ini adalah 78 % atau sebesar 2,25 Ltr/dtk dari total kebutuhan eksisting 2,9 ltr/dtk. Oleh karena itu dalam rangka pencapaian target SDGs, adalah perlu untuk merealisasikan pengembangan pemanfatan potensi air tersebut.

Selain penyediaan air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), penyediaan air bersih juga dapat dilakukan dengan investasi dari swasta. PT Air Manado di Kota Manado adalah contoh swasta yang melakukan investasi dalam pelayanan air bersih untuk Rumah Tangga, Perkotaan dan Industri (RKI) di wilayah kota Manado dan sekitarnya.

Permasalahan yang terjadi terhadap penyediaan air ini adalah ketersediaan air di daerah kepulauan yang mempunyai luas area tangkapan air yang kecil sehingga ketersediaan air permukaan yang tidak dapat berlangsung lama terutama pada musim kering dan posisi permukiman penduduk yang berada di daerah perbukitan yang tinggi

sehingga pendistribusian air secara gravitasi menjadi salah satu kendala. Dalam perkembangan kedepan, kuantitas dan kontinuitas sumber air ini akan menjadi permasalahan penting di WS Tondano-Sangihe-Talaud-Miangas terutama di bagian kepulauan

2) Ketahanan Air WS DUSANG

Jumlah layanan air bersih yang dilayani oleh air permukaan di WS. Dumoga-Sangkub saat ini sebesar 903 ltr/dtk atau baru mencapai 80 % dari total kebutuhan RKI pada Tahun yang sama, hal itupun terkonsentrasi di Kota Kotamobagu dan Kabupaten Bolaangmongondow.

Potensi terjadinya defisit air pada sumber air yang disebabkan oleh pemakaian air untuk kebutuhan RKI sampai pada Tahun 2045 tidak akan terjadi dikarenakan terdapat ketersediaan air pada sumber air dengan debit andalan (Q95%) sebesar 4,95 Miliar m^3 /Tahun di WS. Dumoga-Sangkub.

B. Ketahanan Pangan

1) Ketahanan Pangan WS TOSATAM

Produksi padi di WS Tondano-Sangihe-Talaud-Miangas mencapai 251.359 Ton/Tahun (sensus pertanian BPS 2019). Dengan besaran produksi tersebut maka kontribusi pangan terhadap kebutuhan sendiri di WS Tondano-Sangihe-Talaud-Miangas hanya mencapai 85% dari total kebutuhan pangan yaitu sebesar 295.716 Ton/tahun, defisit pangan tersebut mendapat suplai dari WS Dumoga-Sangkub untuk mencapai 100% kebutuhan tanaman pangan, sedangkan dalam skala provinsi, produksi pangan di WS Tondano-Sangihe-Talaud-Miangas mempunyai kontribusi sebesar 58% terhadap kebutuhan Provinsi Sulawesi Utara serta untuk kebutuhan pangan nasional hanya menyumbang 0,76% dari total kebutuhan pangan nasional.Luasan daerah irigasi di WS Tondano-Sangihe-Talaud-Miangas sebesar 19.492 Ha dan sudah tidak ada potensi pengembangan daerah irigasi lagi.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional harus bertumpu pada sumber daya pangan lokal yang mengandung keragaman antar daerah dan harus dihindari sejauh mungkin

ketergantungan pada pasokan pangan dari daerah lain. Untuk itu, maka seluruh sektor harus berperan secara aktif dan berkoordinasi secara rapi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan masyarakat untuk meningkatkan dan mewujudkan ketahanan nasional.

2) Ketahanan Pangan WS DUSANG

Menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) Produksi padi di WS. Dumoga-Sangkub pada Tahun 2024 adalah sebesar ±214.657 Ton, atau sekitar ±120.623 Ton beras sedangkan untuk kebutuhan beras di WS Dumoga-Sangkub sebesar ±94.459 Ton/Tahun pada jumlah penduduk Tahun 2025 dan sebesar ±113.848 Ton/Tahun pada proyeksi pertumbuhan penduduk sampai tahun 2045. Terjadi surplus beras sebanyak 26.165 Ton/Tahun, kelebihan atau surplus beras tersebut di distribusikan di WS terdekat yaitu WS Tondano-Sangihe-Talaud-Miangas dan WS Poigar Ranoyapo yang defisit/kekurangan produksi tanaman padi. Produksi tersebut didukung oleh jaringan irigasi fungsional yang melayani areal irigasi sebesar ± 31.415 ha dari total areal irigasi potensial ±49.047 ha dan sudah tidak ada pengembangan untuk areal irigasi yang baru. Berdasarkan kajian neraca air Tahun 2024, terdapat beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) yang didalamnya terdapat penggunaan air irigasi mempunyai status Defisit air sebanyak 23 DAS dari total 55 DAS, akan tetapi sebagian besar dapat di tanggulangi dengan membuat pengalokasian air dengan menggurangi secara proposional pada kebutuhan akan aliran pemeliharaan Sungai.

C. Ketersediaan Energi

1) Ketersediaan Energi WS TOSATAM

Pengelolaan listrik pada WS Tondano-Sangihe-Talaud-Miangas dilakukan oleh PT PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo (Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Gorontalo) yang mempunyai cakupan wilayah kerja pada 3 (tiga) Provinsi, dengan adanya satu kesatuan sistem tersebut maka ketersedian energi listrik pada suatu wilayah tertentu di kelola secara merata pada Wilayah Suluttenggo. Untuk daerah kepulauan sendiri, sebagian besar

menggunakan unit-unit Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan skala kecil.

Pada DAS Tondano terdapat 3 (tiga) PLTA secara bertingkat, masing-masing PLTA Tonsea Lama 14,38 Mega Watt (MW), PLTA Tanggari I 18,00 MW dan PLTA Tanggari II 19,00 MW. Disamping itu telah teridentifikasi potensi PLTA Sawangan (dengan membuat bendungan) sebesar 16 MW dan PLTA Kuwil sebesar 1,30 MW.

Sementara itu daya terpasang di Provinsi Sulawesi Utara saat ini ± 245 MW sedangkan beban puncak yang harus dipikul sebesar 242 MW ini menunjukkan terdapat surplus (cadangan daya sebesar) 3 MW. Pembangunan bendungan di WS Tondano-Sangihe-Talaud-Miangas akan memberikan kontribusi terhadap cadangan daya dan kapasitas terpasang tenaga listrik dimana terdapat potensi-potensi pengembangan listrik tenaga air (PLTM maupun PLTA) yang mencapai sekitar 20 MW.

2) Ketersediaan Energi WS DUSANG

Penyediaan energi listrik di Sulawesi utara sebagian besar dihasilkan dari PLTD, PLTG, PLTU dan tenaga surya. Sementara listrik tenaga air merupakan alternatif lain yang sedang diusahakan secara intensif di Indonesia. Pemanfaatan tenaga air yang sudah dilakukan di wilayah sungai Dumoga-Sangkub diantaranya PLTMH di desa Pomoman kec Poigar Kab Bolmong dg daya 10 kW(debit 120lt/dt, head 10m) di sungai bilobon dan PLTM Lobong (2 x 0,8 MW). Wilayah Sungai Dumoga-Sangkub memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air seperti: pemanfaatan debit air yang ditampung kedalam waduk (dalam bentuk PLTA) untuk menghasilkan sumber daya listrik dalam rencana pembangunan Bendungan Lolak sebesar 2,43 MW. Dan ada beberapa potensi lain untuk mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro pada beberapa wilayah sungai di Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

D. Perubahan Iklim Global

Perubahan iklim global sebagai fenomena alam harus diantisipasi dengan menciptakan dan meningkatkan daya dukung DAS yang kritis. Pemanasan

global mengakibatkan perubahan iklim dan kenaikan frekuensi, maupun intensitas kejadian cuaca ekstrem. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menyatakan bahwa berbagai risiko perubahan iklim akan semakin bertambah dan berkembang dalam jangka pendek (tingkat keyakinan tinggi) (*IPCC, 2023: Sections. In: Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, H. Lee and J. Romero (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, pp. 35-115, doi: 10.59327/IPCC/AR6-9789291691647*). Upaya yang sedang dilaksanakan di DAS yang berada pada WS. Dumoga-Sangkub dan WS Tondano-Sangihe-Talaud-Miangas antara lain Gerakan Nasional Rehabitasi Hutan dan Lahan (GNRHL), Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA).

1.2.2 Permasalahan Lokal

Beberapa permasalahan yang sering dihadapi terkait pengelolaan Sumber Daya Air antara lain:

A. Kerusakan Jaringan Irigasi

Provinsi Sulawesi Utara yang menjadi kewenangan Balai Wilayah Sulawesi I masih memiliki jaringan irigasi tidak berfungsi optimal akibat bencana alam serta belum lengkapnya sistem jaringan irigasi. Pengembangan lahan rawa sebagai alternatif lahan irigasi baru masih terbatas. Disisi lain, penggunaan air irigasi cenderung boros karena rendahnya efisiensi. Keterbatasan pendanaan serta masih rendahnya kualitas dan kualitas sumber daya manusia menyebabkan rendahnya kinerja operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Selain itu, partisipasi masyarakat petani dan kinerja kelembagaan pengelolaan irigasi belum optimal.

B. Layanan Air Baku yang belum optimal

Suplai air baku semakin terbatas akibat menurunnya debit pada sumber – sumber air dan tingginya laju sedimentasi pada tampungan air, seperti bendungan, embung, dan danau. Selain itu, kebutuhan air baku semakin tinggi akibat pesatnya pertumbuhan penduduk dan perkembangan industri, berkembangnya aktivitas manusia, dan tidak efisiensinya pola pemanfaatan air. Rendahnya ketersediaan prasarana air baku, terutama di perdesaan, daerah terpencil kawasan perbatasan, kawasan pariwisata dan pulau-pulau

terdepan menyebabkan tingginya eksploitasi air tanah yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan air minum dan kebutuhan pokok sehari-hari, sehingga menyebabkan Land Subsidence dan intrusi air laut.

C. Banjir dan Kekeringan

Frekuensi dan intensitas bencana banjir, kekeringan dan abrasi pantai meningkat, akibat kerusakan daerah tangkapan air dan alih fungsi lahan yang cukup masif. Alih fungsi lahan, khususnya pada kawasan tangkapan air (hulu) yang menyebabkan kerusakan DAS juga berkontribusi pada kondisi kuantitas (debit) air sungai menjadi fluktuatif antara musim penghujan yang mengakibatkan kekeringan. Hal lain yang menjadi penyebab bencana ini adalah perubahan iklim yang mengakibatkan perubahan pola hujan di Indonesia, perubahan suhu permukaan wilayah daratan, kenaikan suhu permukaan laut, kenaikan tinggi muka air laut dan tren kejadian cuaca dan iklim ekstrim. Peningkatan erosi pada daerah hulu yang mengakibatkan sedimentasi di hilir juga menjadi penyebab banjir karena kapasitas sungai di hilir menjadi berkurang.

Disisi lain, tidak meratanya distribusi dan pola hujan di Provinsi Sulawesi Utara menyebabkan beberapa wilayah kabupaten/kota mengalami kekeringan. Maka pentingnya perlu dibangun tampungan-tampungan air skala kecil sehingga air dapat tetap ada pada saat musim kemarau.

D. Pembangunan Infrastruktur perlu didukung oleh Ketersediaan Lahan

Pembangunan infrastruktur membutuhkan ketersediaan lahan yang cukup besar. Disisi lain, ketersediaan lahan ini dihadapkan pada isu keterbatasan lahan, sebagai implikasi meningkatnya jumlah penduduk dan kegiatan perekonomian. Perencanaan terhadap kebutuhan pengadaan tanah untuk infrastruktur juga menjadi salah satu isu dalam RPJMN dan RPJMD dan Perencanaan Program BWS Sulawesi I.

E. Keterpaduan Pengelolaan SDA dengan Pengembangan Wilayah

RPJMN 2022-2024 akan memfokuskan pembangunan pada beebrapa wilayah strategis nasional, baik dalam kerangka pengembangan kegiatan industri, kegiatan pariwisata, pengembangan daerah proyek strategis KEK Likupang dan lainnya. Identifikasi ketersediaan air selaras dengan rencana pengembangan wilayah kedepan perlu menjadi perhatian dalam

ketersediaan dan keberlanjutan penyediaan air untuk berbagai kebutuhan diwilayah yang akan dikembangkan.

F. Pelaksanaan OP yang belum optimal

Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan infrastruktur SDA antara lain disebabkan oleh manual OP yang belum seluruhnya tersedia, kurangnya fasilitas OP, kurangnya kesiapan kelembagaan dan personil pelaksana OP, belum seluruhnya pedoman dan Angka Kebutuhan Nyata OP (AKNOP) tersedia. Hal ini mengakibatkan fungsional infrastruktur tersebut membutuhkan rehabilitasi meningkat dan hal ini membutuhkan dana yang lebih besar. Guna menjaga keberlangsungan fungsi infrastruktur SDA, dilaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan (OP) seluruh infrastruktur SDA Kewenangan Balai Wilayah Sungai Sulawesi I yang telah dibangun dan telah menjadi aset BMN.

G. Keterpaduan Pengelolaan SDA

Pelaksanaan Pengelolaan SDA secara terpadu sebagaimana prinsip Integrated Water Resources Management (IWRM) yang belum terlaksana secara optimal. Beberapa isu yang masih harus dihadapi terkait pengelolaan SDA secara terpadu dan menyeluruh, antara lain:

1) Koordinasi antar instansi, antar pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten/kota) dan antar *stakeholder* terkait agar terbaginya pembagian tugas sesuai dengan kewenangan masing-masing. Wadah koordinasi dibentuk sebagai upaya mengatasi potensi konflik pengelolaan sumber daya air secara alamiah berbasis wilayah sungai yaitu Dewan SDA tingkat Nasional dan Provinsi serta Tim TKPSDA pada masing-masing Wilayah Sungai.
2) Kesadaran dan Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Air masih rendah, karena kurangnya pemahaman atas fungsi sosial, ekonomi dan lingkungan dari air.
3) Kelembagaan pengelolaan SDA baik di tingkat Pusat, Daerah, Tingkat Dinas,Unit Kerja hingga di Tingkat Unit Pengelola perlu ditata dan diperkuat untuk mencapai pemisahan fungsi yang jelas dengan tetap menjaga sinergi antarfungsi. Perkuatan ini juga harus didukung dengan SDM yang berkualitas dan kompeten.

4) Pendanaan yang tidak berkelanjutan menyebabkan ketidakpastian akan pelaksanaan pengelolaan SDA yang berkelanjutan. Keterbatasan pendanaan menuntut adanya penetapan skala prioritas berdasarkan urgensi dan kesiapan pelaksanaan serta terbatasnya pendanaan dari APBN yang memerlukan sumber alternatif pembiayaan lainya.
5) Pengelolaan data dan informasi SDA perlu ditingkatkan, terutama terkait akurasi dan keterbaharuannya sehingga dapat menjadi dasar bagi penyusunan rencana pengelolaan yang efisien dan tepat sasaran. Seiring meningkatnya pembangunan Infrastruktur SDA, data dan informasi diperlukan tentunya tidak hanya terkait data hidrologi, debit air, kualitas air,dll namun juga data dan informasi terkait jumlah dan sebaran infrastruktur SDA yang sudah dibangun dan kondisi infrastrukturnya.
6) Ditetapkan UU Nomor 17 tahun 2019 sebagai dasar hukum pengelolaan sumber daya air, masih perlu didukung oleh turunan peraturan perundang-undangan dibawahnya, sebagai pedoman operasional pelaksanaan pengelolaan sumber daya air.
7) Penyusunan / penyesuaian Rencana Pengelolaan SDA pada masing-masing Wilayah Sungai (WS) masih perlu percepatan.
8) Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Penggunaan SDA dan Persetujuan Penggunaan SDA harus berdasarkan prioritas.

BAB II
INTERNALISASI VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PU

2.1 Visi Kementerian Pekerjaan Umum

Berdasarkan RPJMN 2025-2029, visi pembangunan jangka menengah nasional yang didasarkan atas integrasi RPJPN 2025-2045 dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029 adalah “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi ini menegaskan semangat kolaboratif bangsa dalam mewujudkan transformasi Indonesia menuju negara maju. Selaras dengan hal tersebut, sebagai wujud kontribusi terhadap pencapaian visi nasional, Visi Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029 adalah “Terwujudnya Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Andal dan Berkelanjutan dalam rangka Menggapai Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”.

Kementerian Pekerjaan Umum, sebagai instansi penyelenggara urusan pekerjaan umum di tingkat nasional, secara aktif berkomitmen untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan infrastruktur yang unggul dan berkualitas. Ke depannya, Kementerian PU diharapkan untuk secara konsisten melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur yang andal dan berkelanjutan. Infrastruktur yang andal merujuk pada makna infrastruktur yang berkualitas tinggi dan tahan terhadap berbagai kondisi risiko, serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien. Sementara itu, infrastruktur yang berkelanjutan mengacu pada penyelenggaraan infrastruktur yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan, yaitu ramah lingkungan dan tangguh terhadap bencana, inklusif secara sosial, dan efisien dalam pemanfaatan sumber daya ekonomi. Kementerian Pekerjaan Umum memiliki peran strategis dalam mendukung kemajuan nasional serta berorientasi panjang dalam menjangkau visi besar Indonesia Emas 2045. Peran tersebut diwujudkan melalui dukungan terhadap arah pembangunan nasional menuju transformasi ekonomi, penguatan ketahanan wilayah, dan peningkatan kualitas hidup, melalui penyediaan infrastruktur yang berfungsi sebagai enabler: pengungkit

utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing nasional.

2.2 Misi Kementerian Pekerjaan Umum

Visi pembangunan jangka menengah nasional dicapai melalui 8 (delapan) Asta Cita Misi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029, yang selanjutnya diimplementasikan menjadi 8 (delapan) Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Untuk mewujudkan visi penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum yang andal dan berkelanjutan yang selaras dengan prioritas nasional, Misi Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029 adalah:

1. Meningkatkan ketahanan air nasional melalui pembangunan dan

pengelolaan infrastruktur sumber daya air yang berkelanjutan untuk mendukung swasembada pangan, energi, dan air;

2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur konektivitas jalan dan jembatan yang berkualitas dan terintegrasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing nasional;
3. Meningkatkan akses infrastruktur keciptakaryaan yang berkualitas untuk mendukung pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan;
4. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana strategis untuk mendukung prioritas pembangunan nasional;
5. Meningkatkan kapasitas SDM, khususnya bidang konstruksi dan infrastruktur, yang berdaya saing, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi;
6. Menguatkan tata kelola pembangunan infrastruktur yang efektif, transparan, dan akuntabel; dan
7. Meningkatnya peran kawasan perkotaan sebagai pusat ekonomi nasional yang inklusif, berketahanan dan berkelanjutan.

2.3 Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi yang telah diuraikan sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum menetapkan 6 (enam) tujuan pembangunan jangka menengah sebagai berikut:

1. Meningkatnya ketahanan air nasional;
2. Menguatnya kinerja layanan konektivitas yang berkelanjutan;
3. Menguatnya akses infrastruktur keciptakaryaan yang andal dan berkelanjutan;
4. Meningkatkan kontribusi pemenuhan ketersediaan prasarana yang mendukung Perekonomian, Peribadatan, Pendidikan, Olahraga, Sosial Budaya dan Kesehatan yang andal dan berkualitas;
5. Meningkatnya pembinaan SDM vokasional dan tenaga kerja konstruksi;
6. Menguatnya tata kelola penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, efisien, bersih, dan terpercaya; dan
7. Terwujudnya infrastruktur PU di perkotaan yang berketahanan dan berkelanjutan.

Untuk menjamin ketercapaian tujuan tersebut, telah disusun indikator tujuan yang terukur dan selaras dengan sasaran pembangunan nasional. Berikut adalah Indikator Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029 beserta dengan target tahunannya.

Tabel 6 - Indikator Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum

Tagging **Tujuan**	**Indikator Tujuan**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Tujuan 1	Persentase capaian ketahanan air nasional	70%	70%	70%	75%	75%
Tujuan 2	Persentase capaian kinerja layanan konektivitas jalan	80%	85%	87,5%	90%	92,5%
Tujuan 3	Persentasecapaian penyelenggaraan akses infrastruktur keciptakaryaan	80%	85%	87,5%	90%	92,5%
Tujuan 4	Persentase capaian Pembangunan sarana prasarana strategis yang mendukung penguatan Perekonomian, Peribadatan,Pendidikan, Olahraga, Sosial Budaya dan Kesehatan dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional sesuai Penugasan kepada Kementarian PU	80%	85%	87,5%	90%	92,5%

Tagging Tujuan	Indikator Tujuan	2025	2026	2027	2028	2029
Tujuan 5	Persentase capaian SDM vokasional dan tenaga kerja konstruksi yang terbina	80%	85%	87,5%	90%	92,5%
Tujuan 6	Persentase capaian penguatan kualitas tata Kelola penyelanggaraan pembangunan infrastruktur	80%	85%	87,5%	90%	92,5%

2.4 Sasaran Strategis Kementerian Pekerjaan Umum

Sasaran Strategis (SS) merupakan kondisi yang secara nyata ingin dicapai dalam jangka menengah sebagai wujud kontribusi Kementerian Pekerjaan Umum dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Sasaran ini berperan sebagai ukuran dampak (outcome) dari intervensi penyelenggaraan infrastruktur, serta menjadi representasi atas kontribusi Kementerian Pekerjaan Umum dalam memenuhi mandat pembangunan nasional. Berikut adalah penyelarasan antara tujuan dan SS Kementerian PU

Tabel 7 - Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Pekerjaan Umum

Tujuan	Kode Sasaran Strategis	Sasaran Strategis
Meningkatnya ketahanan air nasional	SS-01	Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air
Menguatnya kinerja layanan konektivitas yang berkelanjutan	SS-02	Meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur konektivitas jalan

Tujuan	Kode Sasaran Strategis	Sasaran Strategis
Menguatnya akses infrastruktur keciptakaryaan yang andal dan berkelanjutan	SS-03	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur Cipta Karya yang andal, aman, dan berkelanjutan
Meningkatkan kontribusi pemenuhan ketersediaan prasarana yang mendukung Perekonomian, Peribadatan, Pendidikan, Olahraga, Sosial Budaya dan Kesehatan yang andal dan berkualitas	SS-04	Meningkatnya kontribusi pemenuhan sarana prasarana yang mendukung perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan yang andal dan berkualitas
Meningkatnya pembinaan SDM vokasional dan tenaga kerja konstruksi	SS-05	Meningkatnya SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional
Menguatnya tata kelola penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, efisien, bersih, dan terpercaya	SS-06	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian Pekerjaan Umum dan tugas teknis lainnya
Mewujudkan infrastruktur PU di perkotaan yang berketahanan dan berkelanjutan	SS-07	Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur Perkotaan yang berketahanan dan berkelanjutan

Setiap Sasaran Strategis telah disusun dengan mempertimbangkan identifikasi indikasi risiko. Identifikasi indikasi risiko sendiri merupakan proses yang bertujuan untuk mengenali dan menentukan risiko yang berpengaruh terhadap pencapaian Sasaran Strategis. Risiko Sasaran Strategis merupakan efek dari ketidakpastian terhadap pencapaian Sasaran Strategis. Berikut adalah identifikasi indikasi risiko SS Kementerian PU.

Tabel 8 - Identifikasi Indikasi Risiko Sasaran Strategis Kementerian Pekerjaan Umum

No.	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Unor
1	Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air		DJSDA
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Infrastruktur Konektivitas Jalan	Dokumen Readiness Criteria yang belum siap serta terjadinya proses tender ulang pada sejumlah paket	DJBM
		Pembebasan lahan yang terkendala izin lingkungan dan perizinan penggunaan kawasan hutan	
		Tingkat kesulitan penanganan kendala sosial, keamanan dan akses pengiriman material	
3	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur Cipta Karya yang andal, aman, dan berkelanjutan	Keterbatasan anggaran yang dapat digunakan antara pembangunan infrastruktur meliputi unit air baku, unit pengolahan dan unit distribusi, dengan unit pelayanan dan sambungan rumah	DJCK
		Konflik sosial dalam pekerjaan sektor sanitasi dan persampahan	
		Pembagian konstribusi pencapaian sasaran nasional antara pemerintah pusat dan	

No.	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Unor
		pemerintah daerah yang belum jelas	
4	Meningkatnya kontribusi pemenuhan sarana prasarana yang mendukung perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan yang andal dan berkualitas	Penanganan bersifat direktif dan diluar masterplan jangka panjang	DJPS
		Komitmen Pemda untuk mendukung kegiatan operasional dan pemeliharaan pasca konstruksi	
		Koordinasi antar stakeholders guna mewujudkan perencanaan dan pembangunan infrastruktur sesuai standar dan kebutuhan	
5	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	Terdapat Provinsi yang belum memiliki OPD Sub urusan jasa konstruksi	DJBK
		Perubahan dan perpindahan anggota antar asosiasi karena banyak asosiasi yang belum memenuhi persyaratan utama	
		Jumlah asesor badan usaha yang terbatas	
		Pengembangan kompetensi ASN PU belum terintegrasi dengan manajemen talenta yang relevan dengan kebutuhan organisasi	BPSDM
		Teknologi digital dan modernisasi infrastruktur dalam mendukung kegiatan	

No.	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Unor
		pelatihan dan pengembangan kompetensi	
6	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya	Perbedaan persepsi dalam perhitungan pencapaian target dukungan manajemen serta koordinasi lintas unit organisasi dalam merumuskan nilai Reformasi Birokrasi	Sekjen & Unor lainnya
		Penurunan persepsi/sentimen positif karena meningkatnya dukungan teknologi yang memungkinkan monitoring media hingga tingkat balai dan UPT	
		Potensi perubahan metode perhitungan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan menggunakan indikator yang lebih kompleks	
		Rekomendasi LHR AKIP yang belum dapat ditindaklanjuti sepenuhnya	
		Implementasi aplikasi SIMAN untuk pengelolaan BMN yang belum optimal	
		Pendampingan pemutakhiran RPD untuk mendukung peningkatan nilai IKPA	
		Belum ada kriteria proyek KPBU untuk setiap sektor di Kementerian PU	DJPI

No.	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Unor
		Komitmen Pemda sebagai PJPK masih rendah	
		Koordinasi penanganan pengaduan umum di Itjen yang belum optimal	Itjen
		Sosialisasi dan peningkatan budaya sadar risiko kepada seluruh pegawai dan unit pengelola risiko di setiap Unor belum optimal	
		Perbedaan data program dari rencana aksi RPIW dan dokumen perencanaan di luar BPIW	BPIW
		Kerentanan perubahan prioritisasi setiap K/L yang berpartisipasi di Rakorbangwil	
7	Meningkatnya Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur PU di Perkotaan yang berketahanan dan berkelanjutan	Kontribusi eskternal terhadap capaian target kontribusi PDRB perkotaan wilayah Metropolitan dan Non metroplitan	BPIW
		Dukungan infrastruktur PU yang tidak secara langsung mendukung peningkatan PDRB, sekaligus hanya salah satu pendukung dalam hal tersebut	
		Kelembagaan yang berwenang dalam pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pencapaian target, masih terbatas	

1) Indikasi Risiko SS-1 Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air.

   Bencana yang mengancam kawasan pesisir seperti banjir, penurunan muka air tanah, intrusi air laut serta tingginya tingkat pencemaran wilayah sungai dapat mempengaruhi ketahanan air, hal ini karena rusak/tercemarnya sumber air yang mengakibatkan penurunan kuantitas dan kualitas air. Di samping itu, akan ada dampak signifikan terhadap infrastruktur pengelolaan sumber daya air yang akan bekerja ekstra dan berpotensi menjadi kurang optimal untuk pengoperasian jangka panjang.

   Sedangkan proses pembebasan lahan dan penanganan dampak sosial untuk pembangunan waduk dan modernisasi irigasi kerap memerlukan perhatian khusus, sulitnya penanganan hal tersebut seringkali disebabkan karena status kepemilikan tanah yang tidak jelas, nilai ganti rugi tidak disepakati serta relokasi penduduk yang memerlukan waktu, hal tersebut dapat berdampak pada pembangunan waduk yang tertunda sehingga memperlambat penyediaan pasokan air untuk pertanian, air baku dan keperluan dasar lainnya.

2) Indikasi Risiko SS-2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Infrastruktur Konektivitas Jalan

   Penyiapan dokumen Readiness Criteria yang tepat dari sisi teknis dan waktu pelaksanaan menuntut pengerjaan yang terkoordinasi, disiplin dan selalu mengacu pada standar dan pedoman yang berlaku. Proses perizinan yang panjang dan kompleks dapat menjadi faktor risiko dalam pengembangan infrastruktur konektivitas, dimana reviu desain/trase jalan yang tidak sesuai rekomendasi dapat menimbulkan permasalahan yang mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan. Dari sisi dampak sosial seperti potensi penolakan masyarakat dan LSM, aktivitas pada daerah rawan konflik, juga dapat menjadi penghambat pelaksanaan pekerjaan, hal ini perlu diantisipasi sebaik mungkin demi tercapainya pekerjaan sesuai target.

   Kinerja pelayanan infrastruktur konektivitas jalan sangat bergantung pada kualitas dan operasionalisasi infrastruktur konektivitas itu sendiri. Permasalahan seperti pengiriman material yang terhambat karena topografi dan cuaca ekstrem serta akses terbatas dapat mempengaruhi

kualitas dan waktu penyelesaian pekerjaan, yang kemudian menjadi permasalahan dalam pengoperasionalan aset infrastruktur secara optimal.

3) Indikasi Risiko SS-3 Meningkatnya ketersediaan infrastruktur Cipta Karya yang andal, aman, dan berkelanjutan

Tumpang tindih kewenangan serta tidak sinkronnya target sasaran nasional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat menjadi risiko dalam peningkatan ketersediaan infrastruktur cipta karya. Sasaran nasional kerap ditetapkan secara top-down tanpa rincian kontribusi yang harus dicapai oleh daerah maupun pusat menjadi kendala dalam penentuan program dan anggaran. Keterbatasan fiskal pemerintah pusat dan daerah yang seringkali disertai keterbatasan SDM dan kelembagaan juga meningkatkan risiko terhambatnya penyediaan infrastruktur Cipta Karya, akibatnya proyek akan bergantung pada intervensi pemerintah pusat dan membuat pengelolaan pasca konstruksi menjadi kurang optimal. Di samping itu, potensi konflik sosial kerap terjadi. Penolakan masyarakat terhadap pelaksanaan infrastruktur sanitasi dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat yang menilai infrastruktur tersebut akan mengganggu kesehatan, mencemari hingga mempengaruhi nilai properti di sekitarnya, harus ditanggulangi dengan cermat. Selain itu, proyek sanitasi yang dibangun tanpa konsultasi dan edukasi masyarakat cukup berisiko ditolak atau tidak dimanfaatkan secara optimal, karena masyarakat enggan beralih ke sistem sanitasi terpusat.

4) Indikasi Risiko SS-4 Meningkatnya kontribusi pemenuhan sarana prasarana yang mendukung perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan yang andal dan berkualitas

Pemenuhan prasarana strategis sangat erat hubungannya dengan sejumlah stakeholders seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial, Kementerian Pemuda dan Olahraga dan lainnya, hal ini disebabkan penyusunan regulasi, standar teknis dan kebutuhan prasarana tersebut merupakan tugas pokok dan fungsi langsung dari stakeholders terkait. Oleh karena itu lemahnya koordinasi antar stakeholders dapat menjadi risiko yang perlu dipertimbangkan karena hal ini dapat berdampak pada perencanaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, standar

teknis dan kualitas yang tidak terpenuhi serta rentan akan tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan.

Pelaksanaan prasarana strategis yang berlandaskan arahan direktif juga kerap menghadapi sejumlah kendala seperti realokasi anggaran, proses perencanaan yang sangat terbatas, kurangnya integrasi antar sektor dan lain-lain. Hal ini dapat berdampak pada kurangnya dukungan pada saat operasional dan pemeliharaan karena keterbatasan anggaran atau belum direncanakan, serta belum ditentukan siapa yang berwenang terhadap hal tersebut.

5) Indikasi Risiko SS-5 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional

Keterbatasan asesor badan usaha menjadi risiko dalam pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi, hal ini karena asesor memegang peran penting dalam verifikasi badan usaha jasa konstruksi, termasuk dalam hal pemenuhan persyaratan teknis dan administrasi untuk sertifikasi. Selain itu proses sertifikasi badan usaha konstruksi yang terhambat dapat menunda pelaksanaan pekerjaan konstruksi karena minimnya pelaku usaha yang sesuai standar.

Sedangkan dari sisi eksternal, masih ada provinsi yang belum memiliki OPD Sub urusan jasa konstruksi sehingga tidak ada lembaga yang bertanggungjawab penuh terhadap SDM vokasional di tingkat daerah. Hal ini akan berdampak pada risiko lain seperti minimnya program pelatihan berbasis kebutuhan lokal, karena perencanaan SDM konstruksi tidak menjadi prioritas dalam anggaran daerah, serta minimnya koordinasi dengan LPJK dan Balai Jasa Konstruksi Kementerian PU yang seharusnya menjadi mitra Pengembangan SDM Konstruksi.

Pengembangan kompetensi ASN PU yang belum terintegrasi dengan manajemen talenta menjadi risiko yang harus dipertimbangkan karena akan memicu ketidaksesuaian antara pelatihan dengan kebutuhan jabatan serta akan banyak program pengembangan ASN yang dilakukan secara generik dan administratif, bukan berdasarkan kebutuhan spesifik jabatan teknis.

6) Indikasi Risiko SS-6 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya

Upaya meningkatkan kualitas tata kelola Kementerian PU dan tugas teknis lainnya dapat menemui banyak faktor risiko, diantaranya adalah dari segi media informasi, dimana kemajuan teknologi informasi dan media digital membuat aktivitas ASN lebih mudah dimonitor publik, dimana hal ini dapat memberi dampak positif seperti mempermudah penyampaian informasi kinerja K/L secara umum, menjaring masukan konstruktif dan mempercepat koordinasi antar stakeholders, namun di sisi lain dapat memberi dampak negatif seperti terjadi mispersepsi, kesalahan komunikasi, atau pelayanan yang kurang optimal dapat menyebar cepat dan memengaruhi persepsi masyarakat terhadap pemerintah.

Risiko pengelolaan dan pendataan BMN dapat terjadi dan berdampak pada pendataan aset yang kurang akurat, siklus perawatan dan pemeliharaan yang kurang terencana dan pemanfaatan aset yang tidak maksimal, hal ini menyebabkan aset cepat mengalami kerusakan/penurunan nilai bahkan tanpa diketahui secara administratif dan dapat menurunkan kualitas pengelolaan BMN.

Sedangkan faktor risiko dari perubahan metode penilaian Reformasi Birokrasi (RB) dan perlunya koordinasi lintas sektor untuk merumuskan nilai RB juga berpotensi terjadi, perubahan metode pengukuran yang kompleks dapat menyulitkan pihak penilai dan menuntut perlunya sosialisasi atau penyamaan persepsi, lalu penetapan nilai RB yang melibatkan lintas sektor memerlukan koordinasi yang disiplin dan terkontrol, demi penetapan nilai yang tepat waktu dan sesuai dengan standar penilaian.

7) Indikasi Risiko SS-7 Meningkatnya Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur PU di Perkotaan yang berketahanan dan berkelanjutan

Terdapat sejumlah risiko yang harus dihadapi dalam upaya meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur PU di Perkotaan dimana salah satu target nya adalah peningkatan PDRB Perkotaan dan indeks kota berkelanjutan, yaitu karena beberapa infrastruktur PU cenderung penting secara fungsional namun tidak langsung berdampak pada peningkatan PDRB, hal ini disebabkan tidak ada output ekonomi secara langsung atau kontribusi tidak tercermin eksplisit dalam statistik makro ekonomi.

Di sisi lain, banyak kota metropolitan yang berkembang dan bergantung pada investasi dan konsumsi dari luar wilayahnya, pembangunan infrastruktur PU sendiri mungkin kurang mampu mengimbangi atau investasi, urbanisasi dan mobilitas eksternal, yang dengan kata lain masih perlu kolaborasi dengan banyak infrastruktur dari sektor di luar PU, dan ketidak selarasan perencanaan infrastruktur dapat menjadi bottleneck jika bersinggungan dengan kepentingan sektor lain.

Selanjutnya, untuk memastikan pencapaian setiap SS dapat diukur secara objektif, akuntabel, dan konsisten, disusun pula Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS). IKSS dirumuskan dengan merujuk pada kontribusi Kementerian PU dalam mendukung tercapainya Indikator Kinerja sasaran pembangunan pada RPJMN 2025-2029.

Selanjutnya, untuk memastikan pencapaian setiap SS dapat diukur secara objektif, akuntabel, dan konsisten, disusun pula Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS). IKSS dirumuskan dengan merujuk pada kontribusi Kementerian PU dalam mendukung tercapainya Indikator Kinerja sasaran pembangunan pada RPJMN 2025-2029.

Tabel 9 - Indikator Sasaran Strategis

Kode	Indikator	Satuan	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
IKSS-01.01	Indeks ketahanan air nasional	Nilai	3,5	3,5	3,5	3,75	3,75
IKSS-02.01	Waktu tempuh pada lintas utama jaringan jalan nasional	Jam/100 km	1,90	1,85	1,80	1,75	1,70
IKSS-02.02	Waktu tempuh pada jaringan jalan nasional	Jam/100 km	2,20	2,20	2,10	2,10	2,10
IKSS-03.01	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan infrastruktur keciptakaryaan yang	%	67,72	75,34	83,87	92,12	100

Kode	Indikator	Satuan	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
	andal, aman, dan berkelanjutan						
IKSS-04.01	Persentase kontribusi pemenuhan sarana prasarana perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan yang dibangun dan diperbaiki sesuai penugasan kepada Kementerian PU	%	47,96	57,96	73,04	86,21	100
IKSS-05.01	Tingkat SDM bidang konstruksi yang bersertifikat	%	24,31	27,06	28,03	29,19	30,14
IKSS-05.02	Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional pendidikan bidang pekerjaan umum yang kompeten dan siap kerja	%	77,50	78,50	79,50	80,50	81,50
IKSS-06.01	Tingkat kualitas tata kelola Kementerian PU	%	91,14	91,38	91,63	91,88	92,13
IKSS-06.02	Tingkat kualitas pengawasan intern dalam penyelenggaraan infrastruktur	%	79,15	81,78	84,41	87,10	89,90
IKSS-06.03	Tingkat keterpaduan infrastruktur PU	%	75,94	76,72	77,50	78,27	79,05

Kode	Indikator	Satuan	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
IKSS-06.04	Tingkat kualitas penyelenggaraan konstruksi	%	81,18	83,57	87,05	89,44	91,76
IKSS-06.05	Tingkat pemenuhan investasi/pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	%	100	100	100	100	100
IKSS-06.06	Tingkat pengembangan kompetensi SDM aparatur PU	%	80,15	81,50	84,00	85,92	87,82
IKSS-07.01	Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional	%	57,29	57,7	58,16	58,68	59,25

Untuk mewujudkan cita-cita besar tersebut, Kementerian PU mengusung sasaran utama “PU608” dimana Kementerian PU berperan sebagai enabler pertumbuhan ekonomi yang membantu investasi sektor produktif seperti industri dan pariwisata lebih efisien.

- 6 (enam), dimaknai efisiensi investasi dengan target nilai Incremental Capital Investment Output (ICOR) kurang dari 6, dicapai melalui strategi:
  1) Optimalisasi biaya melalui manajemen proyek yang efektif dan efisien untuk mewujudkan proyek infrastruktur dengan life cycle yang tepat serta memiliki kualitas dan kapasitas yang sesuai perencanaan;
  2) Optimalisasi aset untuk menghasilkan output maksimal serta memiminalisir risiko kerusakan idle infrastruktur sehingga mendukung efisiensi biaya pemeliharaan dan pembangunan baru; serta
  3) Investasi infrastruktur yang efisien, terencana, dan fokus pada sektor-sektor produktif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang signifikan dengan incremental cost yang efisien.

- 0 (nol), bermakna menuju pengentasan kemiskinan 0%, dicapai melalui strategi:
  1) percepatan akses infrastruktur dasar secara terintegrasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menurunkan tingkat kesenjangan sosial-ekonomi melalui peningkatan akses air minum, sanitasi dan persampahan, serta pembangunan dan rehabilitasi prasarana strategis; serta
  2) penyerapan tenaga kerja lokal, khususnya pada proyek-proyek PU dan kegiatan padat karya infrastruktur, yang didukung dengan pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM.
- 8 (delapan), mendorong pertumbuhan ekonomi 8% per tahun, dicapai melalui strategi:
  1) penguatan dukungan infrastruktur di kawasan prioritas guna menghasilkan dampak pengganda yang signifikan bagi perekonomian;
  2) perwujudan swasembada pangan melalui penyediaan dan efisiensi pemanfaatan jaringan irigasi dengan sumber air berkelanjutan untuk mendorong peningkatan produktivitas pertanian; serta
  3) peningkatan konektivitas jalan mantap dalam rangka memicu pertumbuhan multi sektor, memastikan kelancaran distribusi logistik, dan membuka keterisolasian pada daerah tertinggal dan perbatasan.

2.5 Target Outcome Utama Kementerian Pekerjaan Umum

Target-target kegiatan utama Kementerian Pekerjaan Umum mengedepankan progresivitas yang terukur dengan peningkatan bertahap dari tahun 2025 hingga 2029

2.5.1 Pengelolaan Sumber Daya Air (DJSDA)

Memiliki beberapa indikator kunci. Target kapasitas tampung air mencapai 63,54 m^3 per kapita pada tahun 2029, dengan peningkatan bertahap dari 59,59 m^3/kapita di tahun 2024. Untuk efisiensi pemanfaatan air irigasi, target akhir adalah 0,43 USD/m^3 pada 2029, menunjukkan peningkatan efisiensi dari 0,31 USD/m^3 pada baseline 2024. Selain itu, persentase luas baku sawah fungsional terus ditingkatkan hingga mencapai 62,37% pada 2029, serta rasio luas

jaringan irigasi yang ketersediaan airnya dijamin oleh waduk mencapai 16,57% pada akhir periode.

2.5.2 Pembangunan Jaringan Jalan dan Jembatan (DJBM)

menargetkan efisiensi waktu tempuh yang konsisten pada 1,7 jam per 100 km untuk lintas utama jaringan jalan nasional, dengan target yang stabil di 1,70 jam/100km pada tahun 2029. Untuk jaringan jalan nasional secara keseluruhan, target waktu tempuh ditetapkan pada 2,10 jam per 100 km pada akhir periode.

2.5.3 Peningkatan Pelayanan Dasar Keciptakaryaan (DJCK)

Menunjukkan ambisi yang progresif dalam tiga area utama. Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman ditargetkan meningkat drastis dari 30,12% pada 2024 menjadi 43% pada 2029. Persentase rumah tangga dengan akses air siap minum perpipaan juga mengalami peningkatan signifikan dari 15% menjadi 38% pada periode yang sama. Sementara itu, timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah ditargetkan meningkat dari 24% menjadi 38% pada akhir periode.

2.5.4 Peningkatan Penyediaan Prasarana (DJPS)

Memiliki target ambisius dalam dua indikator utama. Persentase sarana pendidikan yang ditingkatkan kualitas sarana-prasarananya ditargetkan mencapai 100% pada 2029, meningkat dari baseline 19,57% pada 2025. Demikian pula untuk persentase sarana prasarana perekonomian, kesehatan, olahraga dan sosial budaya yang ditingkatkan, dengan target akhir 100% pada 2029 dari baseline 37,34% pada 2025.

2.5.5 Peningkatan Kontribusi Ekonomi Perkotaan Secara Berkelanjutan (BPIW)

Fokus pada pengembangan kawasan metropolitan melalui beberapa indikator. Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap PDRB nasional ditargetkan mencapai 45,60% pada 2029. Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) untuk rata-rata metropolitan ditargetkan mencapai 45,61 pada akhir periode. Selain itu, proporsi kontribusi PDRB perkotaan non-wilayah metropolitan terhadap PDRB nasional ditargetkan meningkat menjadi 8,13% pada 2029, sementara skor IKB rata-rata perkotaan non-wilayah metropolitan ditargetkan mencapai 49,86 pada periode yang sama.

Target-target tersebut mencerminkan komitmen Kementerian Pekerjaan Umum dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan merata, dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan infrastruktur dasar yang memadai, efisien, dan berkelanjutan.

Tabel 2.4 Target Outcome Utama Kementerian Pekerjaan Umum

Outcome	UNOR	Satuan	2024 (baseline)	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
Kapasitas tampungan air	DJSDA	m3 /kapita	59,59	59,31	59,39	59,08	59,90	63,54
Rasio kapasitas air baku terpasang terhadap kebutuhan penduduk	DJSDA	%	53,34	53,01	53,16	55,09	56,47	56,18
Persentase Luas Baku Sawah Fungsional Beririgasi	DJSDA	%	61,55	61,61	61,73	61,92	62,14	62,37
Rasio Luas Layanan Irigasi yang Ketersediaan Airnya Dijamin oleh Waduk	DJSDA	%	15,60	15,60	15,83	16,07	16,34	16,57
Efisiensi Pemanfaatan Air Irigasi	DJSDA	USD/m3	0,31	0,34	0,36	0,39	0,41	0,43
Persentase Luas Kawasan Prioritas yang Dilindungi dari Daya Rusak Air	DJSDA	%	0	12	32	61	83	100
Waktu tempuh	DJBM	Jam/100km	1,90	1,90	1,85	1,80	1,75	1,70

Outcome	UNOR	Satuan	2024 (baseline)	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
pada lintas utama jaringan jalan nasional								
Waktu tempuh pada jaringan jalan nasional	DJBM	Jam/100km	2,30	2,20	2,20	2,10	2,10	2,10
Persentase RT dengan akses air minum aman	DJCK	%	30,12	33	36	38	40	43
Persentase RT dengan sanitasi (akses air limbah domestik) aman	DJCK	%	12	12,5	17	21	26	30
Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	DJCK	%	15	24	28	31	34	38
Persentase satuan pendidikan yang ditingkatkan kualitas sarana-prasarananya	DJPS	%	0	19,57	39,81	61,11	82,41	100
Persentase sarana prasarana perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya yang	DJPS	%	0	37,34	46,66	66,16	81,53	100

Outcome	UNOR	Satuan	2024 (baseline)	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
kualitasnya ditingkatkan								
Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional	BPIW	%	44,13 (2022)	44,35	44,65	44,95	45,25	45,60
Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) rerata wilayah metropolitan	BPIW	%	44,61 (2023)	44,81	45	45,2	45,4	45,61
Proporsi kontribusi PDRB Perkotaan non-wilayah metropolitan terhadap PDB nasional	BPIW	%	6,97 (2022)	7,47	7,64	7,8	7,95	8,13
Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) rerata Perkotaan non-wilayah metropolitan	BPIW	%	48,36 (2023)	48,66	48,96	49,26	49,56	49,86

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Strategi Operasional Direktorat Jenderal SDA

Dalam rangka mencapai arah kebijakan di tingkat nasional dan di tingkat Kementerian Pekerjaan Umum, strategi operasional Direktorat Jenderal SDA 2025-2029 dibagi atas 4 (empat) strategi utama selaras dengan kegiatan prioritas (KP) pada program prioritas (PP) ke-12 Swasembada Air untuk prioritas nasional (PN) ke-2, dengan tetap memperhatikan pilar utama pengelolaan sumber daya air (konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak, pemberdayaan masyarakat, serta sistem informasi sumber daya air).

3.1.1 Strategi Operasional Pembangunan dan Pengelolaan Tampungan Air

Strategi operasional pembangunan dan pengelolaan tampungan air oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air pada tahun 2025-2029 diarahkan untuk meningkatkan dan menjaga kapasitas tampungan air yang dapat dimanfaatkan, melalui:

1. Upaya mempertahankan kapasitas tampung bendungan-bendungan eksisting, melalui kegiatan operasi dan pemeliharaan yang optimal, melaksanakan rehabilitasi untuk mengembalikan fungsi tampungan pada bendungan dan embung eksisting, serta pelaksanaan dam up-grading misalnya dengan menambah pintu pada bagian spillway pada beberapa bendungan eksisting tersebut.
2. Pelaksanaan inspeksi rutin dan inspeksi berkala sebagai upaya mengidentifikasi kesiapan operasi waduk dan peralatan penunjangnya, dilihat dari keamanan struktur, hidrolis, and operasi, serta mengidentifikasi persoalan yang ada untuk kemudian menjadi dasar perumusan saran yang dilakukan untuk meningkatkan keamanan bendungan.
3. Penyelesaian pembangunan 15 bendungan dan 1 (satu) bangunan pengarah yang sudah dimulai pada periode 2020-2024, serta pembangunan 1 (satu) bendungan baru, yang terdiri dari Bendungan Mbay, Jenelata, Cibeet, Cijurey, Cabean, Riam Kiwa, Karangnongko, Jragung,

Way Apu, Bulango Ulu, Budong-Budong, Bagong, Manikin, Bener, Tigadihaji, Bangunan Pengarah Bendungan Rukoh, dan Pelosika.

4. Pemanfaatan potensi manfaat bendungan dalam rangka meningkatkan konektivitas bendungan dengan jaringan irigasi, jaringan penyediaan air baku, serta sebagai sumber energi. Penyelesaian 16 bendungan akan menambah kapasitas tampung sebesar 1.909,92 juta m3/detik, serta potensi manfaat berupa layanan air untuk irigasi seluas 207.280 Hektar, layanan air baku dengan kapasitas 24,44 m3/detik, pengendalian banjir dengan debit 5.701,53 m3/detik, dan potensi energi listrik sebesar 120,34 MW.
5. Lanjutan upaya penyelamatan 15 danau prioritas berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2021, untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan ekosistem danau, memulihkan fungsi dan memelihara ekosistem danau, dan memanfaatkan danau dengan tetap memperhatikan kondisi dan fungsinya secara berkelanjutan, dengan melakukan penyusunan kajian sempadan, penetapan sempadan, penyusunan konsep/desain revitalisasi, serta melaksanakan revitalisasi dan pengendalian sedimen yang masuk ke danau.
6. Pelaksanaan inspeksi rutin dan inspeksi berkala sebagai upaya mengidentifikasi kesiapan operasi waduk dan peralatan penunjangnya, dilihat dari keamanan struktur, hidrolis, and operasi, serta mengidentifikasi persoalan yang ada untuk kemudian menjadi dasar perumusan saran yang dilakukan untuk meningkatkan keamanan bendungan.
7. Penyelesaian pembangunan 15 bendungan dan 1 (satu) bangunan pengarah yang sudah dimulai pada periode 2020-2024, serta pembangunan 1 (satu) bendungan baru, yang terdiri dari Bendungan Mbay, Jenelata, Cibeet, Cijurey, Cabean, Riam Kiwa, Karangnongko, Jragung, Way Apu, Bulango Ulu, Budong-Budong, Bagong, Manikin, Bener, Tigadihaji, Bangunan Pengarah Bendungan Rukoh, dan Pelosika.
8. Pemanfaatan potensi manfaat bendungan dalam rangka meningkatkan konektivitas bendungan dengan jaringan irigasi, jaringan penyediaan air baku, serta sebagai sumber energi. Penyelesaian 16 bendungan akan menambah kapasitas tampung sebesar 1.909,92 juta m3, serta potensi manfaat berupa layanan air untuk irigasi seluas 207.280 Hektar, layanan

air baku dengan kapasitas 24,44 m3/detik, pengendalian banjir dengan debit 5.701,53 m3/detik, dan potensi energi listrik sebesar 120,34 MW.

9. Lanjutan upaya penyelamatan 15 danau prioritas berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2021, untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan ekosistem danau, memulihkan fungsi dan memelihara ekosistem danau, dan memanfaatkan danau dengan tetap memperhatikan kondisi dan fungsinya secara berkelanjutan, dengan melakukan penyusunan kajian sempadan, penetapan sempadan, penyusunan konsep/desain revitalisasi, serta melaksanakan revitalisasi dan pengendalian sedimen yang masuk ke danau.
10. Mengoptimalkan perencanaan teknis dengan mempertimbangkan adanya efek dari perubahan iklim yang meningkatkan ketidakpastian siklus hidrologi guna menghasilkan perencanaan teknis yang andal dan tangguh terhadap potensi peningkatan kejadian ekstrim dan perubahan siklus hidrologi.

3.1.2 Strategi Operasional Penyediaan Pasokan Air Berkelanjutan

Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan kegiatan perekonomian, urbanisasi, serta tantangan perubahan iklim dan kualitas sumber-sumber air, penyediaan air baku ke depan menjadi bagian yang tidak lepas dari pengembangan air bersih yang aman dan terpadu, mulai dari sumber air hingga masyarakat sebagai konsumen (source to tap). Penyediaan air baku tetap memperhatikan kelayakan alokasi air, kelayakan kontinuitas, kelayakan kualitas air baku, kelayakan teknis infrastruktur air baku (pengambilan, reservoir, jaringan transmisi beserta utilitasnya), kelayakan proses pembangunan, kelayakan ekonomi, kelayakan operasional, serta kelayakan keberlanjutan pemanfaatan prasarana air baku.

Berdasarkan hal tersebut, strategi operasional penyediaan pasokan air berkelanjutan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air pada tahun 2025-2029 diarahkan untuk meningkatkan pasokan air berkelanjutan dan produktivitas penggunaan air serta mendukung pencapaian tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, melalui pembangunan dan pengelolaan infrastruktur sumber daya air yang mendukung kestabilan harga pangan dalam rangka pengendalian inflasi, melalui:

1. Pemenuhan air baku untuk air bersih dan air minum, dengan strategi operasional sebagai berikut:
   a. Pemenuhan air baku ditujukan untuk mendukung pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terintegrasi dari hulu ke hilir.
   b. Pemenuhan kebutuhan air baku dari sumber air terlindungi untuk memenuhi kebutuhan air untuk kehidupan sehari-hari serta kebutuhan sosial dan ekonomi produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber air permukaan termasuk pemanfaatan bendungan selesai dan pembangunan embung terutama di daerah yang rawan kekeringan dan sulit air.
   c. Pemanfaatan air dari bendungan yang sudah dibangun, terutama yang bersumber dari 61 bendungan yang selesai pada periode 2015-2024, dilakukan secara terintegrasi dengan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
   d. Pemenuhan air baku melalui sumber air tanah secara terbatas, dengan memperhatikan potensi dan keberlanjutan cekungan air tanah (CAT), didukung dengan sistem monitoring berkala.
   e. Pembangunan dan rehabilitasi embung di daerah sulit air, dalam kerangka satu kesatuan sistem penyediaan air baku (termasuk intake dan pipa transmisi), dan terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum.
   f. Pembangunan, rehabilitasi dan re-development sumur-sumur dalam rangka penyediaan air baku untuk masyarakat skala kecil dan mengantisipasi dampak kekeringan panjang di beberapa lokasi rawan kekeringan.
   g. Penyediaan air baku di pulau-pulau kecil (*small islands*) dilakukan dalam kerangka *Integrated Water Resources Management* (IWRM), melalui pembangunan tampungan-tampungan kecil, Akuifer Buatan Simpangan Air Hujan (ABSAH), dan metode lainnya berdasarkan kajian atau studi yang dilakukan.
   h. Pemanfaatan sistem informasi dalam pengelolaan air tanah dan air baku melalui metode berbasis *real-time data system*, guna meningkatkan efisiensi pengelolaan air baku, didukung oleh regulasi dan penguatan kelembagaan pengelolaan air baku.

i. Integrasi dan sinergi peran *stakeholder* utama, yaitu: Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum (Direktorat Jenderal SDA dan Direktorat Jenderal Cipta Karya), Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) melalui PDAM-nya, serta BUMN terkait seperti Perum Jasa Tirta dalam mengintegrasikan penyusunan program dan kegiatan serta dalam penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, utamanya untuk memanfaatkan *idle* dan *reserved capacity* yang ada hingga saat ini.

j. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perilaku hemat air dan pengurangan penggunaan air tanah sebagai sumber air utama. Melalui kegiatan penguatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan air berkelanjutan.

k. Perlindungan sumber sumber air strategis untuk menjaga keberlanjutan penyediaan air baku melalui perlindungan dan pemeliharaan mata air.

l. Mengoptimalkan perencanaan teknis dengan mempertimbangkan adanya efek dari perubahan iklim yang meningkatkan ketidakpastian siklus hidrologi guna menghasilkan perencanaan teknis yang andal dan tangguh terhadap potensi peningkatan kejadian ekstrim dan perubahan siklus hidrologi.

2. Pemenuhan air untuk irigasi, dengan strategi operasional sebagai berikut:

a. Pengembangan daerah irigasi waduk, terutama yang bersumber dari 61 bendungan yang selesai pada periode 2015-2024.

b. Pembangunan daerah irigasi baru, dengan mempertimbangkan ketersediaan lahan, kesesuaian lahan. Fokus areal pengembangan mempertimbangkan luas layanan irigasi yang termasuk dalam luas baku sawah (LBS) dan konektivitas dengan bendungan yang telah selesai dibangun.

c. Rehabilitasi dan peningkatan daerah irigasi eksisting, guna mengembalikan fungsi jaringan, baik yang rusak karena bencana atau karena usia bangunan.

d. Pemanfaatan air tanah untuk kebutuhan pertanian multi-komoditas diarahkan pada pembangunan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi air tanah (JIAT).

e. Menerapkan *single management irrigation* untuk menghindari pengembangan dan pengelolaan penyedia air, jaringan irigasi, dan cetak sawah yang tidak bersinergi, didukung dengan pemanfaatan sistem informasi geospasial terpadu (*one map policy*).
f. Menerapkan konsep modernisasi irigasi yang berupaya untuk mewujudkan sistem pengelolaan irigasi partisipatif yang berorientasi pada pemenuhan tingkat layanan irigasi secara efektif, efisien, dan berkelanjutan dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan air. Penerapan konsep modernisasi irigasi difokuskan pada pilar keandalan penyediaan air irigasi dan perbaikan sarana prasarana irigasi didukung dengan pilar penyempurnaan sistem pengelolaan irigasi, penguatan institusi pengelola irigasi, dan pemberdayaan sumber daya manusia pengelola irigasi.
g. Penyempurnaan sistem pengelolaan irigasi melalui pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan yang didukung dengan ketersediaan anggaran yang sesuai dengan Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP), peningkatan kapasitas personil dan kelembagaan pengelola irigasi, serta ketersediaan pedoman dan tata cara pengelolaan irigasi.
h. Penguatan institusi pengelola irigasi, dan pemberdayaan sumber daya manusia pengelola irigasi yang dikoordinasikan dan dikolaborasikan dengan K/L terkait, misalnya Kementerian Pertanian.
i. Membentuk Unit Pengelola Irigasi (UPI) pada daerah irigasi yang belum memiliki UPI dan meningkatkan peran serta operasionalisasi UPI yang sudah terbentuk, didukung dengan ketersediaan fasilitas OP yang baik, SDM yang kompeten, dan tata cara OP yang lengkap.
j. Penerapan sistem *water accounting* pada sistem irigasi dalam rangka meningkatkan nilai produktivitas dan efisiensi air irigasi
k. Mengoptimalkan perencanaan teknis dengan mempertimbangkan adanya efek dari perubahan iklim yang meningkatkan ketidakpastian siklus hidrologi guna menghasilkan perencanaan teknis yang andal dan tangguh terhadap potensi peningkatan kejadian ekstrim dan perubahan siklus hidrologi.

3.4.0 Strategi Operasional Pengelolaan Risiko Daya Rusak Air

Strategi operasional pengelolaan risiko daya rusak air oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air pada tahun 2025-2029 diarahkan untuk meningkatkan ketahanan metropolitan dan wilayah sungai terhadap potensi daya rusak air serta mewujudkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan, dan tangguh bencana, melalui:

1. Pembangunan berketahanan iklim untuk menekan potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim, melalui peningkatan kapasitas pesisir dengan upaya mitigasi dan adaptasi, baik struktural dan non-struktural, didasarkan pada *Flood Risk Strategy and Master Plan* dan penataan kawasan pesisir**.**
2. Upaya mitigasi dan adaptasi secara struktural dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur pengendali daya rusak, yang terintegrasi dan bersifat multifungsi (penyediaan layanan dasar, infrastruktur sosial, sekaligus tanggap darurat bencana), dengan tetap memperhatikan kerawanan bencana dan perubahan iklim.
3. Upaya mitigasi dan adaptasi secara non-struktural dilaksanakan melalui pengembangan *flood forecasting dan early warning system*, diutamakan pada kawasan-kawasan strategis, seperti destinasi pariwisata prioritas, kawasan perbatasan NKRI dan pulau terluar, kawasan metropolitan dan kota baru, serta pesisir pantai kritis di wilayah pesisir Indonesia.
4. Pemantauan fungsi bendungan atau waduk untuk reduksi potensi banjir.
5. Pengembangan konsep *Nature Based Solution* (NBS) untuk pengendalian daya rusak air dengan memperhatikan tingkat efektivitas pengendalian daya rusak air dan sebagai penggerak inovasi infrastruktur yang berkelanjutan serta sebagai upaya konservasi lingkungan yang berkelanjutan.
6. Pengaliran lumpur Sidoarjo ke Kali Porong secara berkala untuk mengendalian dampak luapan lumpur, didukung dengan peningkatan dan pemeliharaan tanggul lumpur.
7. Pelaksanaan pemulihan pasca bencana di daerah-daerah yang mengalami banjir, abrasi pantai, dan bencana lainnya pada periode sebelumnya.
8. Pelibatan Pemerintah Daerah dan masyarakat, baik pada upaya struktural, maupun non- struktural, sehingga terwujud rasa memiliki (*sense of*

belonging) terhadap wilayahnya dan meningkatkan upaya untuk mandiri bermitigasi terhadap risiko bencana.

9. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan dengan sumber pendanaan pinjaman luar negeri baik yang sudah selesai (sebagai pembelajaran dan dapat direplikasi ke wilayah/kawasan lainnya), maupun yang akan berjalan hingga tahun 2029.
10. Mengintegrasikan perencanaan yang terpadu pengendalian daya rusak air yang terpadu, mendorong nilai tambah infrastruktur pengendalian daya rusak air yang multifungsi dan mudah untuk ditingkatkan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan tantangan perubahan tata guna lahan.
11. Mengoptimalkan perencanaan teknis dengan mempertimbangkan faktor dampak perubahan iklim yang meningkatkan ketidakpastian siklus hidrologi guna menghasilkan perencanaan teknis yang andal dan tangguh terhadap potensi peningkatan kejadian ekstrim dan perubahan siklus hidrologi.

3.4.1 Strategi Operasional Pengembangan Terpadu Pesisir Utara Jawa

Strategi operasional pengembangan terpadu Pesisir Utara Jawa oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air pada tahun 2025-2029 diarahkan untuk meningkatkan ketahanan terhadap daya rusak air di Pesisir Utara Jawa, melalui:

1. Pembangunan infrastruktur pengendali daya rusak, yang terintegrasi dan bersifat multi- fungsi (penyediaan layanan dasar, infrastruktur sosial, sekaligus tanggap darurat bencana), dengan tetap memperhatikan kerawanan bencana dan perubahan iklim di Pesisir Utara Jawa.
2. Upaya mitigasi dan adaptasi secara non-struktural dilaksanakan melalui pengembangan flood forecasting dan early warning system, diutamakan pada kawasan-kawasan strategis di Pesisir Utara Jawa.
3. Pengembangan konsep Nature Based Solution (NBS), untuk pengendalian daya rusak air pada kawasan Pesisir Utara Jawa dengan memperhatikan tingkat efektivitas pengendalian daya rusak air dan sebagai penggerak inovasi infrastruktur yang berkelanjutan serta sebagai upaya konservasi lingkungan yang berkelanjutan..
4. Penyediaan air baku dengan sumber air permukaan sebagai upaya meningkatkan kapasitas layanan air baku kepada masyarakat serta

menurunkan potensi penurunan muka tanah akibat eksploitasi air tanah yang berlebihan, terutama di kawasan pesisir Pesisir Utara Jawa.

3.4.2 Strategi Operasional Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan

Strategi Operasional Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan dalam rangka Pembangunan dan Pengelolaan Tampungan Air, Penyediaan Pasokan Air Berkelanjutan, Pengelolaan Risiko Daya Rusak Air, serta Pengembangan Terpadu Pesisir Utara Jawa.

Seiring dengan banyaknya infrastruktur yang dibangun selama 10 tahun terakhir, kegiatan operasi dan pemeliharaan difokuskan pada upaya untuk menjaga keberlanjutan fungsi infrastruktur sumber daya air dan sumber-sumber air alami, melalui:

Seiring dengan banyaknya infrastruktur yang dibangun selama 10 tahun terakhir, kegiatan operasi dan pemeliharaan difokuskan pada upaya untuk menjaga keberlanjutan fungsi infrastruktur sumber daya air dan sumber-sumber air alami, melalui:

1. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan seluruh aset, yang melilputi jaringan irigasi, bendungan, sarana prasarana air baku, dan sarana prasarana pengendali banjir.
2. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan wadah (alami) yang strategis, yang meliputi: sungai perkotaan dan danau/situ.
3. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan didukung dengan pedoman dan manual OP, ketersediaan alat OP, ketersediaan anggaran sesuai dengan AKNOP, serta ketersediaan personil OP sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi.
4. Penyusunan manual OP disusun setelah tahapan konstruksi selesai, sebagai dasar dan acuan pelaksanaan OP infrastruktur tersebut.
5. Meningkatkan dan mengoptimalkan fungsi unit-unit teknis pelaksana operasi dan pemeliharaan, seperti UPI, UPB, dan unit kerja lainnya, didukung dengan SDM yang profesional dan kompeten, fasilitas pendukung, fasilitas perkantoran, dan fasilitas operasional (kendaraan dan peralatan operasional).
6. Mendorong pelaksanaan operasi dan pemeliharaan yang lebih efisien dengan memperhatikan kesesuaian lokasi infrastruktur dan penggunaan teknologi yang tepat guna.

7. Pelibatan masyarakat dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan:
   a. Mendorong masyarakat untuk membentuk komunitas-komunitas yang terlibat pengelolaan sumber daya air di skala kecil, misalnya Komunitas Peduli Sungai.
   b. Melakukan pembinaan terhadap komunitas-komunitas yang sudah terbentuk, termasuk memberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi.
8. Peningkatan kesiapsiagaan darurat bencana, dilengkapi dengan ketersediaan personil, alat berat, dan SOP tanggap darurat.
9. Pelaksanaan padat karya berupa P3TGAI, dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, serta sistem informasi yang transparan dan kredibel.
10. Pengembangan sistem informasi yang mendukung kegiatan operasi dan pemeliharaan dalam kerangka pembangunan smart water management. Pengembangan ini dapat merujuk pada best practice beberapa negara, seperti Korea.
11. Pelibatan Pemerintah Daerah dalam skema Tugas Pembantuan OP Irigasi, yang dilengkapi dengan pedoman teknis yang jelas, termasuk sistem pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
12. Pengintegrasian peran dengan Perum Jasa Tirta dalam kerangka pengelolaan SDA terpadu.

3.1.6 Strategi Pendukung

Strategi pendukung difokuskan pada upaya peningkatan keterpaduan tata kelola SDA yang lebih *accountable*, didukung oleh decision making process yang lebih partisipatif dan demokratif dalam rangka terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan, melalui:

1. Perencanaan pengelolaan SDA pada masing-masing wilayah sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, meliputi:
   a. Penyelesaian penyusunan, pembahasan dan penetapan dokumen pola dan rencana pengelolaan SDA pada masing-masing WS di wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
   b. Penyusunan rencana alokasi air pada masing-masing wilayah sungai

yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang- undangan.

c. Pemantauan implementasi rencana pengelolaan SDA pada masing-masing WS di wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

d. Operasionalisasi unit perencanaan pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, untuk memperkuat kapasitas desain infrastruktur SDA, didukung oleh:

1) Pemberian rekomendasi teknis sebagai dasar pemberian izin pengusahaan dan pendayagunaan sumber daya air.

2) Perencanaan, pemrograman, dan penganggaran yang didasarkan pada kebijakan dan strategi operasional pada dokumen pola dan rencana pengelolaan SDA WS kewenangan Pemerintah Pusat.

2. Peningkatan peran serta *stakeholders*, meliputi:

a. Optimalisasi peran stakeholder pada Tim Koordinasi Pengelolaan SDA (TKPSDA) pada masing-masing WS kewenangan Pemerintah Pusat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga O&P pengelolaan SDA, untuk meminimalkan konflik kepentingan dalam pengelolaan air di WS yang bersangkutan, terutama pada penyusunan pola dan rencana pengelolaan SDA, rencana prioritas dan alokasi penggunaan air, kesepakatan mengenai program, rencana kegiatan dan alokasi pembiayaan pengelolaan SDA antar instansi, serta hal-hal lain yang bersifat taktis operasional di tingkat WS.

1) Pembinaan masyarakat, Pemerintah Daerah, dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pengelolaan SDA pada WS kewenangan Pemerintah Pusat.

2) Penilaian kinerja wadah organisasi pengelolaan sumber daya air dengan melakukan:

a) River Basin Organization (RBO) Benchmarking menggunakan indikator penilaian indeks RBO Benchmarking.

b) Pembatasan pelibatan swasta hanya pada pemberian ijin pendayagunaan sumber daya air, bukan pada bentuk

kerjasama, sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan terkait.

b. Pelaksanaan kegiatan melalui skema padat karya dengan melibatkan masyarakat. Sebagai contoh adalah kegiatan padat karya dengan melibatkan masyarakat pengguna air irigasi dilaksanakan melalui Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) dan pembuatan Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH).

c. Peningkatan sinergi antara PJT I, PJT II serta BBWS/BWS terkait dalam hal:

1) Sinkronisasi dan integrasi dalam penyusunan rencana kerja 5 tahunan sehingga Renstra yang disusun BBWS/BWS dengan rencana kerja PJT I dan II dapat sejalan.

2) Penyusunan *clear-cut* kegiatan pengelolaan SDA di Wilayah Kerja PJT (dilengkapi dengan matriks siapa berbuat apa).

3) Penataan dan inventarisasi BMN yang diserahoperasikan oleh PJT.

4) Identifikasi pelaksanaan pengelolaan SDA yang dilakukan oleh PJT sehingga tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan pekerjaan.

d. Peningkatan sinergi pelaksanaan program prioritas dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagaimana diatur melalui Nota Kesepahaman antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Tentara Nasional Indonesia, yang kemudian diturunkan ke dalam Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal SDA dengan TNI AD.

e. Peningkatan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam kerangka implementasi pengelolaan sumber daya air terpadu.

3. Optimalisasi peran data dan informasi sumber daya air untuk seluruh tahapan terkait pengelolaan sumber daya air, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi guna meningkatkan kualitas data dan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan, dan peningkatan transparansi informasi publik melalui:

a. Pemantapan *website* Direktorat Jenderal SDA yang dapat menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, dan akuntabel. *Website* ini didukung oleh pemantapan website di masing-masing Unit Pelaksana Teknis dan Balai Teknik di lingkungan Direktorat Jenderal

SDA yang menampilkan data dan informasi lebih detil terkait pengelolaan WS dan infrastruktur SDA di wilayah kerjanya masing-masing.

b. Optimalisasi fungsi dari sistem *Water Resources Data Centre* (WRDC) menuju Satu Data Indonesia (SDAI) dalam kerangka modernisasi sistem informasi SDA, sebagai pusat data dan informasi SDA nasional yang dilengkapi dengan sistem pemantauan data dan pengumpulan data, standardisasi data, dan penyediaan produk/layanan nasional.

c. Optimalisasi fungsi Sistem Informasi Hidrologi dan Kualitas Air (SIHKA) sebagai portal data terintegrasi untuk pengumpulan dan pengelolaan data-data hidrologi dan kualitas air, untuk deteksi dan peringatan dini (*early warning system*), termasuk pemanfaatan data hujan satelit, pengadaan peralatan pendukung dan laboratorium kualitas air, dan survei hidrologi. Adaptasi dan pembaruan perkiraan data hidrologi dengan memperhatikan potensi perubahan iklim dan kondisi ekstrim.

d. Pengembangan konsep modernisasi hidrologi dalam kerangka *smart water management*, setidaknya meliputi:
   - Revitalisasi pos pemantauan hidrologi.
   - Pembangunan pos baru hidrologi telemetri.
   - Pemenuhan peralatan pendukung minimal.
   - Pengembangan dan integrasi SIH3.
   - Penyelenggaraan sistem manajemen mutu (ISO 9001:2015): akreditasi baru dan *surveillance*.

e. Pengembangan sistem operasi dan perencanaan sumber daya air dalam kerangka *smart water management*, guna mendukung pengelolaan sumber daya air terpadu, efektif, dan efisien, termasuk di dalamnya pemasangan alat monitoring hidrogeologi dan/atau penggunaan metode monitoring alternatif seperti monitoring dari satelit, interpolasi, pemodelan dan sebagainya untuk daerah tanpa alat ukur (*ungauged catchments*) dan pengembangan *control-room* yang dilengkapi dengan seluruh perangkat yang dibutuhkan di beberapa BBWS/BWS prioritas, mengacu pada praktik baik (*best*

practice) di negara-negara lain atau yang sudah dilaksanakan pada proyek sebelumnya.

f. Penerapan *one map policy* pada penyelenggaraan pengelolaan SDA sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku.

g. Penerapan perizinan penggunaan dan pengusahaan sumber daya air secara transparan dan akuntabel, yang didukung oleh pemberian Rekomendasi Teknis (Rekomtek) serta sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan, dengan tetap mengacu prioritas pemberian izin sesuai UU Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

h. Penerapan transformasi digital untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan. Direkotrat Jenderal SDA mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mendukung penyelenggaraan pengelolaan SDA di lingkungan Direktorat Jenderal SDA, secara terintegrasi dengan SPBE di lingkungan Kementerian PU, antara lain:

   1) Penggunaan dan pengembangan E-Programming untuk pelaksanaan kegiatan perencanaan, pemrograman, dan penganggaran jangka menengah (5 tahunan) dan tahunan internal Direktorat Jenderal SDA.
   2) Penggunaan i-emonitoring yang dikembangkan di lingkungan Kementerian PU, untuk penganggaran dan monitoring pelaksanaan kegiatan termasuk progres pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pelibatan tenaga kerja, kebutuhan perhitungan rantai pasok, dll.
   3) Penggunaan dan pengembangan Water Resources Data Center (WRDC) untuk pusat data sumber daya air.
   4) Penggunaan dan pengembangan sistem informasi hidrologi dan kualitas air (SIHKA) untuk pusat informasi data hidrologi dan kualitas air.
   5) Sistem manajemen informasi pelaksanaan teknis dan manajemen aset meliputi: sistem pemantauan pelaksanaan konstruksi bendungan (SIBENDA), sistem informasi air tanah dan air baku (SIATAB), sistem informasi bendungan dan waduk (SINBAD), sistem pengelolaan asset dan kinerja sistem irigasi (Epaksi),

sistem pengelolaan aset sungai (ePAS), sistem informasi elektronik irigasi (SIEDI), sistem manajemen operasi dan pemeliharaan irigasi (SMOPI), sistem informasi kepatuhan intern dan manajemen risiko (SIKIMR), geodatabase online data dan informasi site lumpur Sidoarjo (LusiMap), sistem monitoring program padat karya (P3TGAI), dan Manajemen pengelolaan database loan secara keseluruhan (PMIS).

6) Sistem pelayanan teknis, perizinan, dan peringatan meliputi: Sistem informasi perizinan SDA (Perizinan SDA), sistem pemantauan hujan dan banjir lahar Merapi (SIPELA), sistem peringatan dini potensi kejadian longsor (LEWS), sistem layanan infromasi terpadu Balai Teknik Bendungan (BTBku), dan sistem pelaporan kejadian bencana (SIMADU).

i. Pemantapan sistem komunikasi publik Direktorat Jenderal SDA yang didasarkan pada data dan informasi yang transparan, lengkap, akurat, dan akuntabel.

j. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) pada jabatan fungsional terkait, untuk menciptakan SDM yang kompeten dan berkualitas melalui pelatihan, studi banding, dan lain-lain.

k. Peningkatan kerangka regulasi, kelembagaan dan tata kelola, serta pemenuhan standar, pedoman, dan manual.

l. Meningkatkan koordinasi dan integrasi dengan K/L dan sektor lainnya untuk sinkronisasi data dalam rangka penyediaan informasi yang aktual dan up-to-date, disertai dengan pembagian peran yang jelas dan proporsional antarinstitusi, pengaturan akses data, serta pengaturan pemanfaatan data.

4. Pemberian izin kepada usaha swasta dan badan usaha lainnya untuk melakukan pengusahaan atas air dilakukan dengan syarat tertentu dan ketat, mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air yang memuat pertimbangan teknis dan saran teknis dengan prinsip pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan serta mengacu pada aturan yang berlaku. Prioritas pemberian izin diarahkan untuk:

a. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari bagi kelompok yang memerlukan air dalam jumlah besar;

b. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang mengubah kondisi alami Sumber Air;
c. pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada;
d. pengusahaan Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum;
e. kegiatan bukan usaha;
f. pengusahaan sumber daya air oleh BUMN/BUMD;
g. pengusahaan sumber daya air oleh badan usaha swasta

3.1.7 Dukungan Manajemen dan Tata Kelola

Dukungan manajemen dilaksanakan untuk menjamin terlaksananya sistem tata kelola yang andal guna pencapaian sasaran program Direktorat Jenderal SDA, melalui:

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Direktorat Jeneral SDA, melalui:
   a. Penambahan SDM yang dilakukan dengan mempekerjakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sesuai yang diatur oleh UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
   b. Percepatan regenerasi dan peningkatan kualitas SDM di lingkungan Direktorat Jenderal SDA, melalui pelatihan/pendidikan, rotasi pegawai, dan *on-site placement* SDM muda sesuai dengan latar belakang pendidikan. Standar kompetensi jabatan dan penilaian kompetensi pegawai menjadi dasar perencanaan karir pegawai, serta penempatan dalam jabatan.
   c. Peningkatan kapasitas jabatan fungsional pada masing-masing bidang keahlian melalui Diklat dan Uji Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatannya.
   d. Peningkatan pengelolaan kepegawaian, antara lain penertiban data kehadiran dan kinerja pegawai melalui penggunaan BRAVO-PU, e-Kinerja PU, dan sistem lainnya yang mengintegrasikan penyusunan target dan pencapaian kinerja secara berjenjang serta penilaian kinerja secara berkala sebagai dasar perhitungan pembayaran tunjangan kinerja.
   e. Peningkatan budaya kerja di lingkungan Direktorat Jenderal SDA yang difokuskan pada upaya penerapan budaya kerja Sigap Membangun Negeri untuk Rakyat di lingkungan Direktorat Jenderal

SDA. Penerapan sistem kinerja pegawai dan unit juga menjadi bagian peningkatan budaya dan etika kerja.

2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengelolaan tata naskah dinas, kearsipan, penatausahaan Barang Milik Negara, dan pengelolaan ketatausahaan, termasuk peningkatan penataan dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), sebagai tindak lanjut temuan berulang BPK RI guna menjawab isu sebagai berikut:
   a. BMN tidak ditemukan, dimana BMN tercatat dalam Daftar Barang, namun tidak ditemukan di lapangan. Hal ini terjadi karena aset sebelumnya terdampak kegiatan rehabilitasi/perbaikan/renovasi atas aset, namun belum dihapus dari Daftar Barang sesuai ketentuan pemindahtanganan berupa penghapusan BMN
   b. Hibah BMN berlarut-larut, BMN yang direncanakan untuk dihibahkan kepada Masyarakat/Pemda belum dipindahtangankan, sehingga biaya pemeliharaan aset tidak jelas dan mekanisme penggunaan/pemanfaatan aset tidak sesuai perencanaan
   c. BMN dikuasai pihak lain.
3. Peningkatan layanan pembentukan produk hukum, melalui:
   a. Penyelesaian rancangan Peraturan Pemerintah turunan UU Nomor 17 tahun 2019 serta kerangka regulasi lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan pengelolaan sumber daya air.
   b. Penyelesaian proses permasalahan hukum terkait institusi Direktorat Jenderal SDA dan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal SDA.
4. Peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran melalui Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebagai indikator yang digunakan oleh Kementerian Keuangan untuk mendukung belanja berkualitas, penguatan *value for money* dalam penilaian kinerja, serta penetapan derajat kewajaran (*fairness treatment*) dalam penilaian kinerja pada level Satuan Kerja, unit organisasi, dan K/L, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.05/2024 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 5/PB/2024, dengan aspek yang dinilai meliputi: kualitas perencanaan anggaran (25%), kualitas pelaksanaan anggaran (50%), dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran (25%). Akselerasi nilai IKPA dapat dilakukan melalui upaya sebagai berikut:

a. Akselerasi belanja dengan percepatan pelaksanaan kegiatan, percepatan penyelesaian tagihan, mengutamakan LS daripada UP, percepatan revoving UP.
b. Disiplin melaksanakan rencana kerja dan anggaran sesuai Halaman III DIPA.
c. Mematuhi batas-batas pengajuan SPM sesuai Langkah-Langkah akhir tahun anggaran.

5. Peningkatan layanan komunikasi publik, melalui e-PPID, TNDE, dan SP4N-LAPOR, maupun media massa dan media sosial yang dikelola baik oleh Kementerian Pekerjaan Umum maupun Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
6. Peningkatan tata kelola upaya tindak lanjut dan penyelesaian temuan melalui:
   a. Melakukan evaluasi atas kinerja satuan secara berjenjang terhadap seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan, khususnya memprioritaskan yang belum tuntas lebih dari 10 tahun dan menyampaikan hasil evaluasi kepada Inspektorat Jenderal;
   b. Melakukan pembinaan terhadap pejabat/pegawai yang masih memiliki tanggung jawab terhadap tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang belum sesuai;
   c. Melakukan identifikasi dan verifikasi secara berjenjang terhadap rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti;
   d. Menyusun rencana aksi tindak lanjut rekomendasi dengan status Belum Sesuai/Belum Tindak Lanjut, dan disampaikan ke Inspektorat Jenderal;
   e. Salah satu tujuan kebijakan dalam proses *profiling* atas usulan pejabat bahwa yang diusulkan harus bebas dari sisa temuan adalah untuk meningkatkan kepatuhan atas TLRLHP BPK RI;
   f. Unor agar mendorong percepatan tindak lanjut terhadap sisa temuan pada Pejabat Struktural/Pejabat Fungsional yang diusulkan dan memperoleh catatan dari Inspektorat Jenderal.
7. Peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), melalui upaya perbaikan dan peningkatan pada tema dan fokus reformasi

birokrasi, seperti: pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, dan prioritas presiden yaitu pengendalian inflasi dan mendorong penggunaan produk dalam negeri.

8. Peningkatan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan bagian dari reformasi penyelenggaraan pemerintahan. SAKIP sendiri merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP di Kementerian PU diatur berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 09/PRT/M/2018.
9. Penerapan dan peningkatan Nilai Efektivitas Manajemen Risiko diarahkan pada upaya:
    a. Mendorong keterlibatan pimpinan (*tone at the top*) dalam penerapan manajemen risiko melalui pembinaan dan permintaan bukti dukung keterlibatan pimpinan dalam penyusunan dokumen manajemen risiko
    b. Menambahkan anggaran khusus untuk penerapan manajemen risiko kepada UPT dan Unit Kerja.
    c. Melakukan pelatihan peningkatan kompetensi bagi pemilik dan pengelola risiko UPT dan Unit kerja bekerjasama dengan BPKP
    d. Mendorong penyampaian bukti hasil pelaksanaan inovasi pengendalian
    e. Penyusunan MR berbasis Data dan Bukti Kejadian Temuan serta Mengacu pada SE Menteri PUPR Nomor 12 Tahun 2024
10. Peningkatan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 20/PRT/M/2018, sebagai upaya meningkatkan nilai maturitas SPIP Direktorat JenderaL SDA, melalui:
    a. Pelaksanaan rapat *kick-off* meeting penilaian SPIP sebelum periode penilaian di bulan Juni s.d September
    b. Internalisasi modul petunjuk bukti dukung penilaian SPIP yang telah disusun oleh Biro Keuangan
    c. Inventarisasi pemenuhan kebutuhan bukti dukung berdasarkan

catatan AOI (*Area of Improvement*) dari Itjen dan BPKP

d. Peningkatan tata Kelola sIstem pemerintahan berbasis Elektronik dengan membentuk SK Tim, SOP dan regulasi yang diperlukan di tingkat Ditjen SDA

e. Pengelolaan pemeliharaan dan pendokumentasian sistem pengendalian Internal (SPI), transaksi, dan kejadian penting lainnya.

11. Pembangunan Zona Integritas (ZI), sebagai salah satu *role model* Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas, serta dalam rangka pencegahan korupsi di pemerintahan, melalui penetapan target pembangunan ZI dan WBK/WBBM pada minimal 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis di Direktorat Jenderal SDA.
12. Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sebagaimana tertuang dalam ISO 37001:2016 sebagai serangkaian standar untuk membantu organisasi baik sektor publik, swasta dan nirlaba dalam membangun, mengimplementasikan, dan terus meningkatkan program kepatuhan dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mendeteksi penyuapan, pada seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Direktorat Jenderal SDA.

3.5 Strategi Operasional BWS Sulawesi I

Strategi operasional Balai Wilayah Sungai Sulawesi I difokuskan pada akselerasi pengelolaan air yang terpadu, adaptif, dan berkelanjutan guna menjawab tantangan hidrologis di Sulawesi Utara. Sebagai landasan fundamental, strategi rencana kerja ini tentunya berkesesuaian dan berjalan tegak lurus dengan agenda pembangunan nasional didalam RPJMN serta Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum. Sinergi kebijakan tersebut diterjemahkan secara teknis ke lapangan dengan melingkupi 5 Pilar Sumber Daya Air yakni konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, sistem informasi SDA, serta pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan air dan kedaulatan pangan yang tangguh di wilayah ini.

Strategi Operasional Terkait Konservasi Sumber Daya Air

Strategi operasional konservasi dalam lingkup sumber daya air difokuskan pada tindakan teknis untuk menjaga kuantitas, kualitas, dan keberlanjutan air

permukaan maupun air tanah. Upaya ini meliputi pembangunan dan pemeliharaan bangunan konservasi seperti embung, waduk kecil, dan kolam retensi untuk menyimpan air saat musim hujan; pembuatan sumur resapan dan sistem imbuhan buatan (artificial recharge) untuk meningkatkan pengisian air tanah; serta pembangunan check dam guna mengurangi kehilangan air akibat limpasan berlebih. Dari sisi pengendalian kualitas, dilakukan pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), pengendalian pencemar sebelum masuk badan air, serta pemantauan kualitas air secara berkala menggunakan alat ukur hidrologi. Selain itu, efisiensi pemanfaatan air ditingkatkan melalui rehabilitasi jaringan irigasi, pengurangan kebocoran pada sistem distribusi, dan optimalisasi pola operasi bendung atau pintu air agar distribusi air lebih merata. Seluruh tindakan teknis ini bertujuan menjaga keseimbangan neraca air, mempertahankan debit andalan sungai, serta menjamin ketersediaan air secara berkelanjutan. Berikut beberapa upaya yang direncanakan terkait konservasi sumber daya air:

- Pembangunan Embung Kawaluso, Embung Nunuka, Embung Bohabak, Embung Melonguane
- Lanjutan Revitalisasi Danau Tondano
- Revitalisasi Mahena

Strategi Operasional Terkait Pendayagunaan Sumber Daya Air

Strategi operasional terkait pendayagunaan sumber daya air dalam lingkup teknis difokuskan pada optimalisasi pemanfaatan air permukaan dan air tanah agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat tanpa mengganggu keberlanjutannya. Tindakan teknis meliputi pembangunan dan optimalisasi bendung, waduk, dan jaringan irigasi untuk mendukung pertanian; pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) melalui instalasi pengolahan air dan jaringan distribusi; pengaturan pola operasi pintu air dan waduk untuk menjaga keseimbangan suplai dan kebutuhan; serta pembangunan infrastruktur pengambilan air baku yang efisien dan aman. Selain itu, dilakukan peningkatan efisiensi melalui modernisasi irigasi, pengurangan kehilangan air pada jaringan distribusi, serta penerapan sistem monitoring debit dan penggunaan air secara real-time. Dalam konteks energi, pendayagunaan juga mencakup pemanfaatan potensi aliran sungai untuk pembangkit listrik tenaga air (PLTA/PLTMH) dengan tetap memperhatikan

debit ekologis. Seluruh strategi ini bertujuan memastikan air dimanfaatkan secara optimal, adil, dan berkelanjutan sesuai daya dukung sumber daya air yang tersedia. Berikut beberapa upaya yang direncanakan terkait pendayagunaan sumber daya air:

- SPAB Bimantara
- Penyediaan air baku di pulau-pulau kecil terluar

Strategi Operasional Terkait Pengendalian Daya Rusak Air

Strategi operasional terkait pengendalian daya rusak air difokuskan pada tindakan teknis untuk mengurangi dan mengantisipasi dampak merugikan air seperti banjir, erosi, longsor, abrasi, dan kekeringan. Upaya ini meliputi pembangunan dan peningkatan kapasitas tanggul, revetment (penguatan tebing sungai), serta normalisasi dan pelebaran alur sungai untuk meningkatkan kapasitas tampung debit banjir. Di wilayah hulu, dibangun check dam, sabo dam, dan bangunan pengendali sedimen untuk menahan material erosi serta memperlambat aliran permukaan. Pada kawasan perkotaan diterapkan sistem drainase terpadu, kolam retensi, dan polder untuk mengendalikan genangan. Selain itu, dilakukan pengaturan pola operasi waduk dalam pengendalian banjir, pemasangan sistem peringatan dini (early warning system), serta pemetaan daerah rawan banjir dan longsor berbasis data hidrologi. Untuk pengendalian kekeringan, dibangun embung dan sumur dalam sebagai cadangan air saat debit menurun. Seluruh tindakan teknis ini bertujuan meminimalkan risiko kerusakan infrastruktur dan kerugian sosial ekonomi akibat kejadian ekstrem yang berkaitan dengan air. Berikut beberapa upaya yang direncanakan terkait pengendalian daya rusak air:

- Bendungan Sawangan
- Bendungan Kali
- Sungai Tondano, Tikala, Sario, Bailang, Mahawu
- Penyelesaian Pantai Miangas
- Pengaman pantai di pulau-pulau kecil terluar

Strategi Operasional Terkait Sistem Informasi Sumber Daya Air

Strategi operasional terkait sistem informasi sumber daya air difokuskan pada penguatan infrastruktur teknis pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data hidrologi secara akurat dan real-time. Tindakan teknis meliputi pemasangan dan pemeliharaan stasiun hidrologi seperti pos hujan otomatis (ARR), pos duga

air (AWLR), dan alat ukur debit. Data yang diperoleh diintegrasikan melalui sistem telemetri dan dikirim ke pusat data untuk dianalisis menggunakan perangkat lunak hidrologi dan model neraca air. Selain itu, dikembangkan basis data terpadu berbasis GIS untuk pemetaan DAS, zona rawan banjir, ketersediaan air, dan kualitas air, serta dashboard monitoring yang dapat diakses oleh instansi terkait. Sistem ini juga dilengkapi dengan mekanisme peringatan dini (early warning system) untuk banjir dan kekeringan, serta pembaruan data berkala guna mendukung perencanaan operasi waduk, alokasi air, dan pengambilan keputusan berbasis data. Seluruh upaya teknis ini bertujuan meningkatkan akurasi informasi, respons cepat terhadap kondisi ekstrem, serta efektivitas pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan. Berikut beberapa upaya yang direncanakan terkait system informasi sumber daya air:

- Pembangunan sistem FEWS di kota manado
- WRDC
- Moderenisasi Pos hidrologi dan klimatologi

Strategi operasional terkait pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air difokuskan pada langkah-langkah teknis yang mendorong keterlibatan langsung masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan air secara berkelanjutan. Tindakan operasional meliputi pembentukan dan penguatan kelembagaan lokal seperti Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), komunitas peduli sungai, serta kelompok pengelola sistem penyediaan air minum desa; pelatihan teknis mengenai operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, embung, dan sumur resapan; serta pendampingan dalam pemantauan kualitas dan kuantitas air secara partisipatif. Selain itu, dilakukan penyusunan prosedur operasi dan pemeliharaan (SOP) berbasis masyarakat, fasilitasi program padat karya untuk rehabilitasi saluran dan konservasi sumber air, serta penyediaan alat sederhana monitoring debit atau curah hujan di tingkat lokal. Strategi ini bertujuan meningkatkan kapasitas teknis masyarakat agar mampu menjaga infrastruktur air, mengurangi kerusakan, serta memastikan keberlanjutan fungsi sumber daya air secara mandiri dan berkesinambungan. Berikut berapa upaya yang direncanakan terkait strategi operasional terkait pemberdayaan masyarakat:

- Padat karya p3tgai

- Komisi irigasi
- Pembinaan komunitas air
- Penguatan TKPSDA

3.6 Kerangka Regulasi

Regulasi Pengelolaan Sumber Daya Air telah diatur di dalam UU 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air dengan arahan sebagai berikut:

Turunan UU Nomor 17 tahun 2019 ditetapkan meliputi:

- Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan SDA
- Peraturan Pemerintah tentang Sumber Air (didalamnya termasukan muatan pengaturan mengenai sungai, danau, rawa dan sumber air lainnya)
- Peraturan Pemerintah tentang Irigasi
- Peraturan Pemerintah tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Peraturan Menteri PUPR masih berlaku:

- Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai
- Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Air dan Bangunan Pengairan
- Pengamanan Pantai
- Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi
- Penggunaan SDA
- Rencana dan Rencana Teknis Pengaturan Air dan Tata Pengairan
- Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Reklamasi Rawa Pasang Surut
- Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
- Penanggulangan Darurat Bencana Akibat Daya Rusak Air
- Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi
- Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa Lebak
- Komisi Irigasi
- Iuran Eksploitasi dan Pemeliharaan Bangunan Pengairan
- Pengelolaan Aset Irigasi
- Pengalihan Alur Sungai dan/atau Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai
- Bendungan
- Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau
- Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi
- Izin Penggunaan Air dan/atau Sumber Air

- Tata Cara Perizinan Pengusahaan SDA dan Penggunaan SDA

3.4 Kerangka Kelembagaan

3.4.1 Struktur Organiasai

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9/PRT/M/2024 perubahan kedua atas peraturan menteri pekerjaan umum dan Perumahan rakyat nomor 16 tahun 2020 tentang organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pasal 18 Bahwa Balai Wilayah Sungai Sulawesi I merupakan Balai Besar Wilayah Sungai Tipe A memiliki susunan organisasi sebagai berikut:

1. Subbagian Umum dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, organisasi, dan tatalaksana, pelaksanaan pembinaan pegawai, pelaksanaan fasilitasi kegiatan reformasi birokrasi di balai, penyusunan rencana dan pengelolaan urusan kas dan perbendaharaan, administrasi dan akuntansi keuangan, administrasi dan fasilitasi penyelesaian laporan hasil pemeriksaan dan pengaduan masyarakat, pelaksanaan pemungutan, penerimaan, dan penggunaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air, pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, dan rumah tangga, pelaksanaan komunikasi publik dan hukum, penatausahaan, pengelolaan, administrasi, dan akuntansi barang milik negara, pengamanan fisik barang milik negara, pengelolaan kekayaan negara lainnya, koordinasi kegiatan terkait penanganan bencana, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern balai.
2. Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air melakukan penyusunan pola, program, dan rencana pengelolaan sumber daya air, analisis dan evaluasi kelayakan program dan kegiatan pengelolaan sumber daya air, analisis dampak lingkungan, penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja balai, koordinasi dan fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dibidang program dan perencanaan umum pengelolaan sumber daya air, pengelolaan sistem hidrologi serta sistem informasi dan data sumber daya air, dan pelaksanaan koordinasi terkait pengadaan tanah.

3. Seksi Pelaksanaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, perencanaan teknik, konstruksi dan non konstruksi bidang sungai, pantai, muara, drainase utama perkotaan, bendungan, danau, situ, tampungan air lainnya, irigasi, rawa, air tanah, air baku, embung, sarana dan prasarana konservasi air tanah dan air baku, persiapan operasi dan pemeliharaan, fasilitasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pencetakan sawah, pemberdayaan masyarakat, serta pemberian bimbingan teknis kepada pemerintah daerah di bidang sungai, pantai, muara, drainase utama perkotaan, bendungan, danau, situ, tampungan air lainnya, irigasi, rawa, air tanah, air baku, embung, dan sarana dan prasarana konservasi air tanah dan air baku serta penyusunan rekomendasi teknis untuk pengalihan alur sungai, pemanfaatan irigasi dan penyiapan keterangan ketersediaan air permukaan.
4. Seksi Operasi dan Pemeliharaan melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan padat karya di bidang operasi dan pemeliharaan, pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana, pengelolaan sistem peringatan dini, pelaksanaan penyusunan rencana alokasi air tahunan, pelaksanaan penyusunan kajian penetapan garis sempadan sungai, garis sempadan danau, garis sempadan situ, garis sempadan jaringan irigasi, garis sempadan mata air, garis sempadan waduk, garis sempadan embung, dan garis sempadan rawa, perhitungan biaya jasa pengelolaan sumber daya air, fasilitasi kegiatan tim koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai, pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pemanfaatan sumber daya air, pelaksanaan penyusunan rekomendasi teknis dalam perizinan dan persetujuan penggunaan sumber daya air, penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air, serta fasilitasi dan koordinasi Unit Pengelola Bendungan, Unit Pengelola Irigasi, dan Unit Pengelola Prasarana Pengendali Banjir.

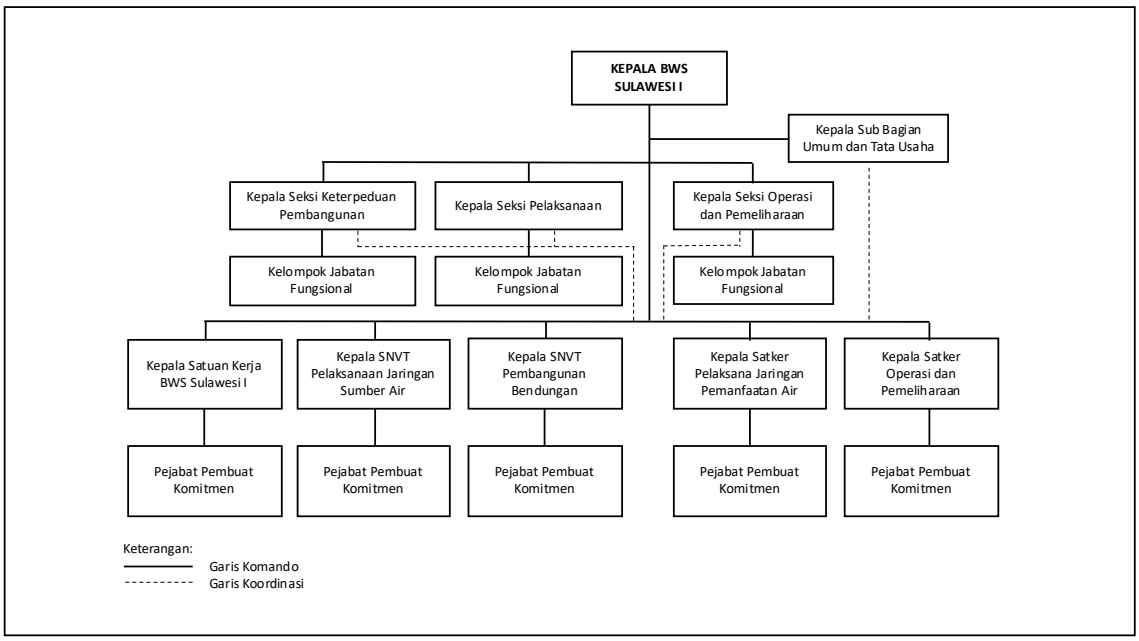

Gambar – Struktur Organisasi Balai Wilayah Sungai Sulawesi I

3.4.2 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data terakhir, secara keseluruhan BWS Sulawesi I didukung Sumber Daya Manusia (SDM) sejumlah 466 Orang, yang terdiri dari PNS sejumlah 136 Orang, PPPK 190 Orang, PPPK PW 33 orang, Tenaga Pendukung 49 orang dan Konsultan Individu 58 orang.

A. SDM Struktural dan Satker Balai

Tabel 3.1 Pegawai PNS, PPPK, Non-PNS dan KI di Struktural & Satker Balai BWS Sulawesi I

No.	Pendidikan	ASN			TP	KI
		PNS	PPPK	PPPK-PW		
1	S2	8				
2	S1	15	13	1	20	9
3	DIII	2	1	1	2	1
4	SLTA	8	31			
5	SLTP	1				
6	SD	1	4			

B. Satuan Kerja Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Sulawesi I

Tabel 3.2 Pegawai PNS, PPPK, Non-PNS dan KI di Satuan Kerja Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Sulawesi I

No.	Pendidikan	ASN			TP	KI
		PNS	PPPK	PPPK-PW		
1	S2	4				
2	S1	11	12			20
3	DIII	1	3			
4	SLTA	9	72	12		3
5	SLTP	1				
6	SD		5			

C. SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sulawesi I Provinsi Sulawesi Utara

Tabel 3.3 Pegawai PNS, PPPK, Non-PNS dan KI di Satuan Kerja SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sulawesi I Provinsi Sulawesi Utara

No.	Pendidikan	ASN			TP	KI
		PNS	PPPK	PPPK-PW		
1	S2	6	1			
2	S1	7	5	1	4	6
3	DIII	2				
4	SLTA	12	5	1		
5	SLTP					
6	SD					

D. SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sulawesi I Provinsi Sulawesi Utara

Tabel 3.4 Pegawai PNS, PPPK, Non-PNS dan KI di Satuan Kerja SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sulawesi I Provinsi Sulawesi Utara

No.	Pendidikan	ASN			TP	KI
		PNS	PPPK	PPPK-PW		
1	S2	5				
2	S1	8	10		1	15
3	DIII	3				2
4	SLTA	8	6	3		2
5	SLTP					
6	SD					

E. SNVT Pembangunan Bendungan BWS Sulawesi I

Tabel 3.5 Pegawai PNS, PPPK, Non-PNS dan KI di Satuan Kerja di SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sulawesi I Provinsi Sulawesi Utara

No.	Pendidikan	ASN			TP	KI
		PNS	PPPK	PPPK-PW		
1	S2	5				
2	S1	8	10		1	15
3	DIII	3				2
4	SLTA	8	6	3		2
5	SLTP					
6	SD					

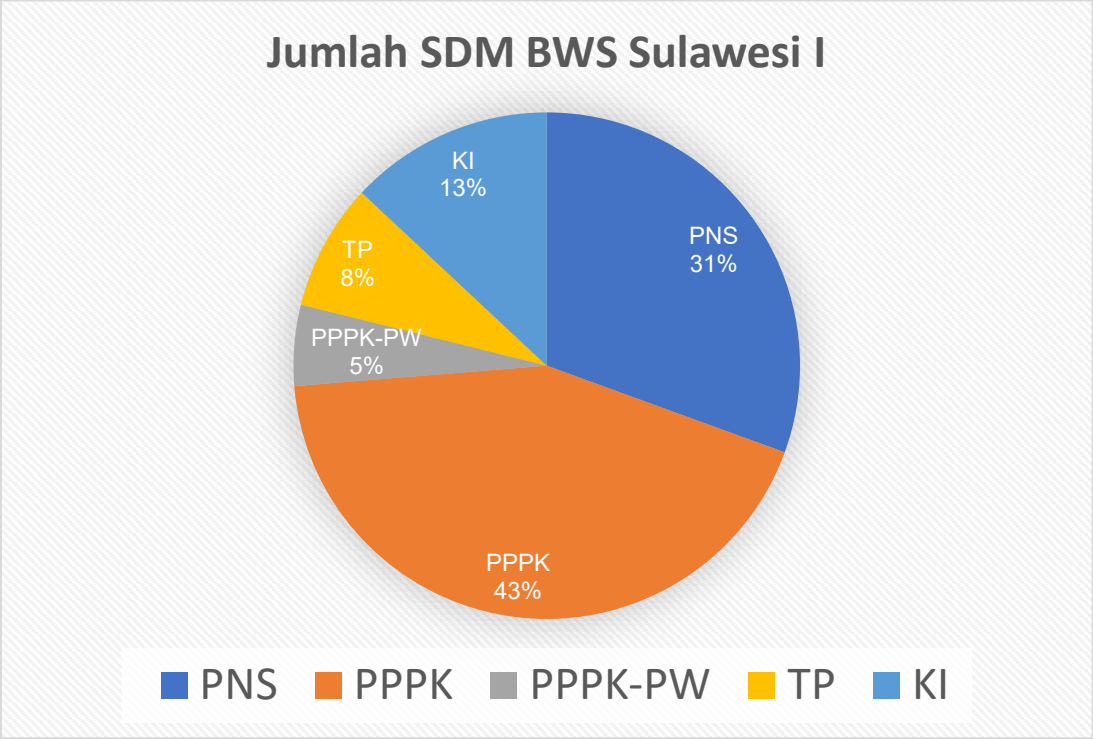

Gambar 3.2 Presentase Pegawai di lingkungan BWS Sulawesi I berdasarkan status PNS / Non PNS dan KI

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Dalam konteks ini, target kinerja merujuk pada sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tingkat kinerja tertentu, baik dalam bentuk sasaran strategis, program, maupun kegiatan, yang dilengkapi dengan indikator terkait. Target kinerja ini menggambarkan tingkat pencapaian spesifik yang ingin diraih oleh BWS Sulawesi I, mencakup program dan kegiatan dalam periode waktu yang ditentukan. Penyusunan target kinerja BWS Sulawesi I tahun 2025-2029 ditetapkan dengan mempertimbangkan:

1. Target menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran
2. Penetapan target harus relevan dengan indikator kinerja, logis, dan didasarkan pada data dasar yang jelas.
3. Penetapan target kinerja pada tahun 2025 didasarkan pada DIPA awal BWS Sulawesi I tahun anggaran 2025
4. Penetapan target kinerja pada tahun 2026 didasarkan pada pagu alokasi anggaran tahun anggaran 2026
5. Penetapan target didasarkan pada kertas kerja Bersama unit kerja pengampu kegiatan yang disusun berdasarjan kondisi tahun 2025

Pelaksanaan kegiatan untuk mendukung capaian target kinerja tetap mengikuti kaidah dan aturan yang berlaku seperti kewenangan, pendanaan dan kriteria kesiapan baik teknis maupun pemograman. Perubahan lokus dan besaran target dimungkinkan dengan mempertimbangkan kesiapan dan kondisi di lapangan serta perubahan kebijakan.

Matriks Target Sasaran dan Alokasi Pendanaan BWS Sulawesi I untuk tahun 2025-2029 dapat dilihat pada LAMPIRAN. Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja tetap mengikuti kaidah dan peraturan yang berlaku, mencakup aspek kewenangan, pendanaan, serta kriteria kesiapan teknis dan pemrograman. Perubahan lokasi dan besaran target dimungkinkan dengan mempertimbangkan kesiapan dan kondisi di lapangan serta adanya perubahan kebijakan.

4.2 Cascading Kinerja (tambahkan cascading kinerja BWS Sulawesi I (merujuk pada narasi renstra ditjen SDA) dengan sasaran program dan sasaran kegiatan disesuaikan dengan BWS Sulawesi I.

4.3 Kerangka Pendanaan

Investasi pemerintah dalam pengelolaan SDA, terutama di bawah Direktorat Jenderal SDA, menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan pendanaan yang sesungguhnya diperlukan.

Diperlukan pengelolaan yang hati-hati terhadap keterbatasan pendanaan yang tersedia, mengingat ketidakpastian yang tinggi (sangat tergantung pada penerimaan negara), agar sasaran strategis nasional yang telah ditetapkan dapat tercapai. Pengelolaan yang cermat dilakukan dengan menetapkan skala prioritas anggaran, di mana alokasi anggaran harus lebih difokuskan pada program dan kegiatan yang memiliki peran penting dalam pencapaian prioritas pengelolaan SDA secara terpadu, guna mendukung pertumbuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, diperlukan efisiensi pengeluaran dalam aspek operasional sehingga alokasi yang terbatas dapat dimaksimalkan penggunaannya.

Berikut ini adalah ringkasan kerangka pendanaan dan kriteria pengusulan proyek prioritas untuk pengelolaan SDA sesuai arahan Direktorat Jenderal SDA:

1. Sumber Pendanaan:
   Pendanaan berasal dari APBN, yang mencakup Rupiah Murni (RM), Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN), dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
2. Pendanaan melalui Rupiah Murni (RM)
   Difokuskan untuk proyek dengan urgensi tinggi, kompleksitas rendah, dan persyaratan yang mudah. Biasanya proyek ini bisa diselesaikan dalam 1-2 tahun.
3. Pendanaan melalui Pinjaman/Hibah Luar Negeri
   Dikhususkan untuk proyek dengan urgensi rendah namun kompleksitas tinggi. Proyek ini seringkali membutuhkan teknologi canggih yang belum ada di dalam negeri.

4. Kriteria Pengusulan Proyek Prioritas, didasarkan pada:
   a) Kesesuaian dengan pola pengelolaan SDA WS,
   b) Integrasi pada Wilayah Pengembangan Strategis (WPS),
   c) Kewenangan sesuai peraturan perundangan,
   d) Kriteria kesiapan (feasibility study, desain, lingkungan, pengadaan tanah).
5. Kriteria Penyusunan Program dan Anggaran Prioritas, didasarkan pada:
   a) Agenda nasional sesuai RPJPN dan RPJMN,
   b) Program prioritas dalam Rencana Strategis (RENSTRA),
   c) Arahan dari Presiden, hasil kunjungan DPR RI, serta masukan dari Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP),
   d) Arahan Menteri PUPR dan Direktur Jenderal SDA.

Kerangka dan kriteria ini memastikan pengelolaan SDA dilakukan secara efektif dan efisien, dengan alokasi anggaran yang sesuai prioritas untuk mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis BWS Sulawesi I 2025-2029 merupakan perwujudan dan penjabaran dari target-target dalam Rencana Strategis Kementerian PU 2025-2029 untuk sektor sumber daya air dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya Air 2025-2029. Target-target ini menjadi hasil logis dari perubahan lingkungan strategis, termasuk penyesuaian untuk memenuhi kebutuhan baru.

Rencana Strategis BWS Sulawesi I 2025-2029 berfungsi sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan pembangunan di bidang sumber daya air dan program pengelolaan sumber daya air di setiap unit kerja BWS Sulawesi I. Rencana Strategis ini dirancang untuk memastikan setiap kegiatan mencapai sasaran yang telah ditetapkan dengan memenuhi standar akuntabilitas selama lima tahun ke depan.

Rencana Strategis ini selanjutnya dijadikan acuan oleh setiap Unit Kerja BWS Sulawesi I dalam menyusun Dokumen Perencanaan Satuan Kerja. BWS Sulawesi I berkomitmen melaksanakan program dan kegiatan sesuai Renstra, yang memerlukan koordinasi, konsolidasi, serta sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan dunia usaha. Sinergi ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya air, guna mencapai kinerja maksimal dalam meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur secara merata dalam periode lima tahun ke depan.

KODE		UNIT/SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KRO/RO/INDIKATOR RO	SATUAN	Baseline	Lokasi	LINK CASCADING	Target					Alokasi (Rp Ribu)					
							2025	2026	2027	2028	2029	2,025	2,026	2,027	2,028	2,029	2025-2029
RO	002	Kepatuhan intern dan manajemen risiko serta pembangunan zona integritas	Rekomendasi Kebijakan			SK 02	1					35,000					
IRO						ISK 01											
KRO	EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Dokumen														
RO	975	Layanan Manajemen Kinerja	Dokumen			SK 02		1	1	1	1		72,782	80,060	88,066	96,872	
IRO		Indikator RO: Tingkat Pelaksanaan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko Unit	Nilai			ISK 01		76.84	76.86	76.88	76.90						
RO	952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen			SK 03		1	1	1	1						
IRO		Indikator RO: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Unit Kerja	Nilai			ISK 01		89.06	89.56	90.06	90.56						
RO	961	Layanan Reformasi Kinerja	Dokumen			SK 04		1	1	1	1						
IRO		Indikator RO: Nilai SAKIP Unit Kerja	Nilai			ISK 01		76.84	76.86	76.88	76.90						
KEGIATAN	7688	Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, dan Evaluasi										3,973,176,026	6,421,915,791	5,208,054,471	4,832,089,530	2,783,708,479	
SK	01	Meningkatnya kualitas penyusunan program jangka panjang				SP 02											
ISK	01	Tingkat fasilitasi program pengelolaan SDA jangka panjang	%			ISP 04	66%	68%	70%	72%	74%						
ISK	02	Jumlah dokumen pola dan rencana yang ditetapkan/direvisi	Dokumen			ISP 04	7	7	9	7	7						
ISK	03	Tingkat implementasi RPSDA WS Kewenangan Pusat	%			ISP 04	38%	42%	48%	52%	55%						
SK	02	Meningkatnya perencanaan, pemrograman, dan penganggaran				SP 02											
ISK	01	Tingkat pembinaan dan penyelarasan perencanaan, pemrograman, penganggaran	%			ISP 04	84.73%	87.83%	87.83%	88.46%	89.69%						
ISK	02	Tingkat layanan kerja sama luar negeri yang efektif bidang sumber daya air	%			ISP 04	81.33%	81.33%	82.33%	89.00%	90.00%						
ISK	03	Tingkat pelaksanaan program dan anggaran UPT di Direktorat Jenderal SDA	%			ISP 04	68.44%	68.44%	70.55%	70.55%	72.95%						
ISK	04	Tingkat indikator kinerja pelaksanaan anggaran Unit Kerja	Nilai			ISP 04	78.36	78.86	79.36	79.86	80.36						
SK	03	Meningkatnya pemantauan dan evaluasi serta SAKIP				SP 02											
ISK	01	Tingkat pembinaan pemantauan dan evaluasi	%			ISP 05	85.31%	88.09%	89.94%	91.80%	93.65%						
ISK	02	Tingkat penyelenggaraan SAKIP pada Entitas di Direktorat Jenderal SDA	%			ISP 05	65.00%	67.50%	70.00%	72.50%	75.00%						
ISK	03	Tingkat penyelenggaraan SAKIP pada Entitas di BBWS/BWS	%			ISP 05	25.00%	25.00%	50.00%	75.00%	75.00%						
ISK	04	Tingkat pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pada BBWS/BWS	%			ISP 05	87.57%	87.57%	90.69%	93.82%	93.82%						
ISK	05	Tingkat implementasi penyelenggaraan SAKIP Unit Kerja	Nilai			ISP 05	79.82	79.84	79.86	79.88	79.90						
SK	04	Meningkatnya layanan pengadaan tanah infrastruktur sumber daya air				SP 02											
ISK	01	Tingkat layanan pembinaan pengadaan tanah infrastruktur sumber daya air	%			ISP 04	91%	91%	91%	91%	91%						
ISK	02	Jumlah luas pengadaan tanah infrastruktur sumber daya air	Ha			ISP 04	100.00	220.00	420.00	500.00	550.00						
SK	05	Meningkatnya pelaksanaan kepatuhan intern				SP 02											
ISK	01	Tingkat pelaksanaan kepatuhan intern dan manajemen risiko Unit Kerja	%			ISP 03	76.00%	76.40%	77.80%	80.20%	81.60%						
KRO	ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	Rekomendasi kebijakan														
RO	001	Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan Upaya Pengelolaan SDA WS Kewenangan	Rekomendasi kebijakan			SK 01	3	1	1	1	1	3,530,000	3,883,000	4,271,300	4,698,430	5,168,273	
IRO		Indikator RO: 1. Tingkat Fasilitasi Program Pengelolaan SDA Jangka Panjang	%			ISK 01	66%	68%	70%	72%	74%						
	002	Layanan administrasi dan pembinaan rencana, program, dan anggaran	Rekomendasi Kebijakan			SK 02	3					3,190,544					
						ISK 01											
	003	Flood Management in North Java Project	Kajian			SK 02	1					10,865,750					
						ISK 02											
	004	National Urban Flood Resilience Project (NUFReP)	Kajian			SK 02	1					10,628,750					
						ISK 02											
	005	Layanan administrasi dan pembinaan pelaksanaan SBSN dan kerja sama luar negeri	Kajian			SK 02	1					2,000,000					
						ISK 02											
	006	Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP)	Kajian			SK 02	1					10,897,320					
						ISK 02											
	007	Layanan administrasi dan pembinaan pemantauan dan evaluasi	Rekomendasi Kebijakan			SK 03	2					2,470,058					
						ISK 01											
	008	Dokumen pembinaan pelaksanaan pengadaan tanah	Rekomendasi Kebijakan			SK 04	1					1,059,942					
						ISK 01											
	009	Kepatuhan intern dan manajemen risiko serta pembangunan zona integritas	Rekomendasi Kebijakan			SK 05	2					35,000					
						ISK 01											
RO	010	Pola dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai	Rekomendasi kebijakan			SK 01		7	9	7	7		54,975,516	51,450,791	51,325,000	54,351,343	
IRO		Indikator RO: 1. Jumlah Dokumen Pola dan Rencana yang Ditetapkan/Direvisi	Dokumen			ISK 03		7	9	7	7						
IRO		Indikator RO: 2. Tingkat Implementasi RPSDA WS Kewenangan Pusat	%			ISK 04		42%	48%	52%	55%						
KRO	CBR	Dukungan Teknis	Dokumen														
RO	001	Bidang Tanah untuk Infrastruktur Sumber Daya Air	Dokumen			SK 04	381	38	38	38	38	3,877,098,662	6,311,327,114	5,095,432,702	4,713,479,954	2,655,347,604	
IRO		Indikator RO: 1. Jumlah Luas Tanah untuk Infrastruktur Sumber Daya Air yang	Ha			ISK 02	100	120	200	80	50						
IRO		Indikator RO: 2. Tingkat Layanan Pembinaan Pengadaan Tanah Infrastruktur Sumber	%			ISK 03	91%	91%	91%	91%	91%						
RO	002	Fasilitasi Unit Manajemen atau Pelaksanaan Proyek (PMU/PIU)	Dokumen			SK 02		2	2	2	2		22,000,000	24,200,000	26,620,000	29,282,000	
IRO		Indikator RO: Tingkat Layanan Kerja Sama Luar Negeri yang Efektif Bidang Sumber	%			ISK 02		0	0	0	0						
KRO	FAD	Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen														
RO	001	Dokumen penyusunan/revisi/reviu pola dan rencana pengelolaan SDA WS	Dokumen			SK 01	13					19,750,000					
IRO						ISK 02											
RO	002	Dokumen pemantauan dan evaluasi pola dan rencana pengelolaan SDA WS	Dokumen			SK 01	30					12,325,000					
IRO						ISK 03											
RO	003	Dokumen program dan anggaran	Layanan			SK 02	44					7,925,000					
IRO						ISK 03											
KRO	FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	Laporan														
RO	001	Pemantauan, evaluasi dan penyelenggaraan SAKIP Unit Kerja, UPT, dan Satuan	Laporan			SK 03	50					11,400,000					
IRO						ISK 03											
IRO						ISK 04											
KRO	EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Dokumen														
RO	952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen			SK 02		40	40	40	40		33,084,036	35,516,036	37,764,579	42,591,037	
IRO		Indikator RO: 1. Tingkat Pembinaan dan Penyelarasan Perencanaan, Pemrograman,	%			ISK 01		87.83%	87.83%	88.46%	89.69%						
IRO		Indikator RO: 2. Tingkat Layanan Kerja Sama Luar Negeri yang Efektif Bidang	%			ISK 02		81.33%	82.33%	89.00%	90.00%						
IRO		Indikator RO: 3. Rata-rata Tingkat Pelaksanaan Program dan Anggaran UPT di	%			ISK 03		68.44%	70.55%	70.55%	72.95%						
IRO		Indikator RO: 4. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Unit Kerja Dit.	Nilai			ISK 04		78.86	61.25%	79.86	80.36						
RO	953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen			SK 03		39.00	39.00	39.00	39.00		2,717,064	2,988,770	3,287,647	3,616,412	
IRO		Indikator RO: 1. Tingkat Kualitas Pemantauan dan Evaluasi Bidang Sumber Daya Air	%			ISK 01		88.09%	89.94%	91.80%	93.65%						
IRO		Indikator RO: 2. Tingkat Kualitas Pemantauan dan Evaluasi Bidang Sumber Daya Air	%					87.57%	90.69%	93.82%	93.82%						
RO	961	Layanan Reformasi Kinerja	Dokumen			SK 03		39	39	39	39		12,540,000	13,794,000	15,173,400	16,690,740	
IRO		Indikator RO: 1. Tingkat Kualitas Evaluasi SAKIP Entitas di Direktorat Jenderal SDA	%			ISK 02		67.50%	70.00%	72.50%	75.00%						
		Indikator RO: 2. Tingkat Kualitas Evaluasi SAKIP Entitas di BBWS/BWS	%			ISK 03		25.00%	50.00%	75.00%	75.00%						
IRO		Indikator RO: 3. Nilai SAKIP Unit Kerja Dit. SSPSDA	Nilai			ISK 04		79.84	79.86	79.88	79.90						
RO	975	Layanan Manajemen Kinerja	Dokumen			SK 05		1	1	1	1		72,782	80,060	88,066	96,872	

KODE		UNIT/SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KRO/RO/INDIKATOR RO	SATUAN	Baseline	Lokasi	LINK CASCADING	Target					Alokasi (Rp Ribu)					
							2025	2026	2027	2028	2029	2,025	2,026	2,027	2,028	2,029	2025-2029
IRO		Indikator RO: Tingkat Pelaksanaan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko Unit	%			ISK 01		76.40%	77.80%	80.20%	81.60%						
KEGIATAN	7689	Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Sumber Daya Air										25,834,427	50,755,839	55,831,422	61,414,565	67,556,021	
SK	01	Meningkatnya maturitas kepatuhan intern				SP 02											
ISK	01	Tingkat pelaksanaan kepatuhan intern dan manajemen risiko UPT	%			ISP 03	66.83%	67.13%	68.77%	70.90%	72.53%						
ISK	02	Tingkat pelaksanaan kepatuhan intern dan manajemen risiko Satuan Kerja	%			ISP 03	76.00%	76.40%	76.80%	80.20%	80.60%						
ISK	03	Tingkat pembinaan kepatuhan intern dan manajemen risiko	%			ISP 03	67.40%	68.20%	69.00%	69.80%	70.60%						
ISK	04	Tingkat pelaksanaan kepatuhan intern dan manajemen risiko Unit Kerja	%			ISP 03	83.20%	83.20%	84.60%	86.60%	88.00%						
SK	02	Meningkatnya nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran				SP 02											
ISK	01	Tingkat indikator kinerja pelaksanaan anggaran Unit Kerja	Nilai			ISP 04	96.23	96.73	97.23	97.73	98.23						
SK	03	Meningkatnya nilai SAKIP				SP 02											
ISK	01	Tingkat implementasi penyelenggaraan SAKIP Unit Kerja	Nilai			ISP 05	75.12	75.14	75.16	75.18	75.20						
KRO	ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	Rekomendasi Kebijakan														
RO	001	Rekomendasi kebijakan pembinaan kepatuhan intern	Rekomendasi Kebijakan			SK 01	4					120,000					
IRO						ISK 03											
RO	002	Kepatuhan intern dan manajemen risiko serta pembangunan zona integritas	Rekomendasi Kebijakan			SK 01	226					25,714,427					
IRO						ISK 01											
IRO						ISK 02											
IRO						ISK 04											
KRO	EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Dokumen														
RO	952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen			SK 02		1	1	1	1		6,307,125	6,937,838	7,631,621	8,394,783	
IRO		Indikator RO: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Unit Kerja	Nilai			ISK 01		96.73	97.23	97.73	98.23						
RO	961	Layanan Reformasi Kinerja	Dokumen			SK 03		1	1	1	1		6,307,125	6,937,838	7,631,621	8,394,783	
IRO		Indikator RO: Nilai SAKIP Unit Kerja	Nilai			ISK 01		75.14	75.16	75.18	75.20						
RO	975	Layanan Manajemen Kinerja	Dokumen			SK 01		772	772	772	772		38,141,589	41,955,747	46,151,322	50,766,454	
IRO		Indikator RO: 1. Tingkat Pembinaan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko	%			ISK 03		68.2	69	69.8	70.6						
IRO		Indikator RO: 2. Tingkat Pelaksanaan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko UPT	%			ISK 01		67.13	68.77	70.9	72.53						
IRO		Indikator RO: 3. Tingkat Pelaksanaan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko	%			ISK 02		76.4	76.8	80.2	80.6						
IRO		Indikator RO: 4. Tingkat Pelaksanaan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko Unit	%			ISK 04		83.20	84.60	86.60	88.00						
KEGIATAN	7690	Layanan Teknis SDA										404,643,223	588,898,450	628,888,989	629,515,074	622,468,220	
SK	01	Meningkatnya kesiapan teknis dalam rangka meningkatkan pasokan air berkelanjutan				SP 02											
ISK	01	Tingkat layanan sistem informasi sumber daya air (SISDA) Direktorat Jenderal	%			ISP 06	70.96%	82.50%	85.00%	85.00%	87.50%						
ISK	02	Jumlah wilayah sungai dengan pengembangan sistem informasi sumber daya air	Wilayah sungai			ISP 06	19	23	24	25	26						
ISK	03	Jumlah dokumen perhitungan nilai indeks ketahanan air wilayah sungai (IKtA-WS)	Dokumen			ISP 06	0	64	0	64	0						
ISK	04	Tingkat kesiapan teknis	%			ISP 06	85.00%	87.50%	90.00%	90.00%	90.00%						
ISK	05	Jumlah dokumen perhitungan neraca air wilayah sungai	Dokumen			ISP 06	64	64	64	64	64						
SK	02	Meningkatnya pembinaan kesiapan dan layanan teknis infrastruktur SDA dalam				SP 02											
ISK	01	Tingkat layanan pengelolaan jabatan fungsional dan pengembangan profesi	%			ISP 06	100%	100%	100%	100%	100%						
ISK	02	Tingkat pembinaan layanan teknis sumber daya air	%			ISP 06	100%	100%	100%	100%	100%						
ISK	03	Tingkat pembinaan sistem informasi sumber daya air (SISDA) direktorat jenderal	%			ISP 06	76.00%	77.24%	78.55%	79.91%	82.00%						
	04	Tingkat penerapan NSPK, teknologi dan peralatan infrastruktur sumber daya air	%			ISP 06	100%	100%	100%	100%	100%						
ISK	05	Tingkat keandalan infrastruktur sumber daya air	%			ISP 06	100%	100%	100%	100%	100%						
ISK	06	Jumlah wilayah sungai Kewenangan Pusat dengan neraca air tidak dalam kondisi	Wilayah Sungai			ISP 06	50	50	50	50	50						
ISK	07	Tingkat pembinaan implementasi transformasi digital	%			ISP 07	32.14%	42.86%	53.57%	64.29%	75.00%						
SK	03	Meningkatnya layanan teknis infrastruktur SDA				SP 02											
ISK	01	Persentase layanan teknis Balai Teknik/Balai	%			ISP 06	100%	100%	100%	100%	100%						
ISK	02	Jumlah dokumen pengembangan, perekayasaan, dan penerapan teknologi Balai	Dokumen			ISP 06	26	52	79	106	132						
ISK	03	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap layanan Balai	Indeks			ISP 06	82.13	83.56	85.13	86.56	88.13						
ISK	04	Jumlah dokumen perhitungan indeks ketahanan air nasional (IKtA-N)	Dokumen			ISP 06	0	1	0	1	0						
ISK	05	Jumlah dokumen perhitungan neraca air nasional	Dokumen			ISP 06	1	1	1	1	1						
SK	04	Meningkatnya pelaksanaan kepatuhan intern				SP 02											
ISK	01	Tingkat pelaksanaan kepatuhan intern dan manajemen risiko Unit Kerja	%			SP 03	76.00%	76.40%	77.80%	80.20%	81.60%						
SK	05	Meningkatnya nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran				SP 02											
ISK	01	Tingkat indikator kinerja pelaksanaan anggaran Unit Kerja	Nilai			ISP 04	92.42	92.92	93.42	93.92	94.42						
SK	06	Meningkatnya nilai SAKIP				SP 02											
ISK	01	Tingkat implementasi penyelenggaraan SAKIP Unit Kerja	Nilai			ISP 05	71.07	71.09	71.11	71.13	71.15						
KRO	ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	Rekomendasi Kebijakan														
RO	001	Layanan teknis dan pengelolaan jabatan fungsional serta fasilitasi pengembangan	Rekomendasi Kebijakan			SK 02	1					2,824,068					
IRO						ISK 01											
RO	002	Layanan teknis bidang SDA	Rekomendasi kebijakan			SK 02	4					9,800,000					
IRO						ISK 02											
RO	003	Flood Management in North Java Project	Kajian			SK 01	1					8,319,603					
IRO						ISK 02											
RO	004	National Urban Flood Resilience Project (NUFReP)	Kajian			SK 01	1					4,745,287					
IRO						ISK 02											
RO	005	Sistem Data Air Indonesia (SDAIR)	Kajian			SK 02	1					4,750,000					
IRO						ISK 03											
RO	006	NSPK, teknologi dan peralatan infrastruktur sumber daya air	Kajian			SK 02	9					3,225,932					
IRO						ISK 04											
RO	007	Dokumen evaluasi keandalan infrastruktur SDA	Rekomendasi kebijakan			SK 02	1					2,100,000					
IRO						ISK 05											
RO	009	Kepatuhan intern dan manajemen risiko serta pembangunan zona integritas	Rekomendasi kebijakan			SK 04	2					285,884					
IRO						ISK 01											
KRO	BMA	Data dan Informasi Publik	Dokumen														
RO	001	Sistem Informasi SDA	Dokumen			SK 01	56	38	38	38	38	34,096,740	21,907,421	23,473,361	25,475,743	27,180,339	
IRO		Indikator RO: Tingkat Layanan Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA) Direktorat	%			ISK 01											
RO	002	Sistem Informasi Hidrologi dan Kualitas Air	Dokumen			SK 01	102	38	38	38	38	180,587,015	143,039,189	153,174,749	161,088,189	168,983,802	
IRO		Indikator RO: Tingkat Layanan Hidrologi untuk Sistem Informasi Hidrologi,	%			ISK 01											
RO	003	Neraca air wilayah sungai	Layanan			SK 01	12					3,339,649					
IRO						ISK 05											
RO	004	Dokumen perhitungan indeks ketahanan air wilayah sungai	Dokumen			SK 01	29					10,500,000					
IRO						ISK 03											
KRO	CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Unit														
RO	001	Sistem Data dan Informasi SDA	Unit			SK 01	4	23	24	25	26	976,368	145,082,062	149,576,433	147,707,486	129,706,522	

KODE		UNIT/SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KRO/RO/INDIKATOR RO	SATUAN	Baseline	Lokasi	LINK CASCADING	Target					Alokasi (Rp Ribu)					
							2025	2026	2027	2028	2029	2,025	2,026	2,027	2,028	2,029	2025-2029
IRO		Indikator RO: Jumlah Wilayah Sungai dengan Pengembangan Sistem Informasi	Wilayah Sungai			ISK 02		23	24	25	26						
RO	002	Pos Hidrologi	Unit			SK 01											
IRO		Indikator RO: Jumlah Pos Hidrologi yang dibangun	Unit			ISK 01											
KRO	CBR	Dukungan Teknis	Dokumen														
RO	001	Layanan teknis balai teknik/balai	Dokumen			SK 03	8					43,784,709					
IRO						ISK 01											
RO	002	Dokumen Pengembangan, Perekayasaan, dan Penerapan Teknologi	Dokumen			SK 03	6	8	8	8	8	14,153,200	38,335,871	40,910,746	47,127,326	45,550,306	
IRO		Indikator RO: Jumlah Dokumen Pengembangan, Perekayasaan, dan Penerapan	Dokumen			ISK 02	6	8	8	8	8						
RO	003	Dokumen pengukuran IKM	Dokumen			SK 03	4					25,425,000					
IRO						ISK 03											
RO	004	Unit desain BBWS/BWS	Dokumen			SK 01	40					27,325,000					
IRO						ISK 04											
RO	008	Dokumen Perhitungan Indeks Ketahanan Air Wilayah Sungai	Dokumen			SK 01		64	64	64	64		32,000,000	32,000,000	32,000,000	32,000,000	
IRO		Indikator RO: Jumlah Dokumen Perhitungan Nilai Indeks Ketahanan Air Wilayah	Dokumen			ISK 03		64	64	64	64						
RO	006	Dokumen Neraca Air Wilayah Sungai	Dokumen			SK 01		64	64	64	64		32,000,000	32,000,000	32,000,000	32,000,000	
IRO		Indikator RO: Jumlah Dokumen Neraca Air Wilayah Sungai yang Disusun	Dokumen			ISK 05		64	64	64	64						
RO	007	Fasilitasi Unit Manajemen atau Pelaksanaan Proyek (PMU/PIU)	Dokumen			SK 02		2	2	1			14,371,378	15,808,516	11,073,391		
IRO		Indikator RO: Jumlah Dokumen Dukungan Proyek yang Disusun	Dokumen			ISK 02		2	2	1							
RO	005	Dokumen Perhitungan Indeks Ketahanan Air Nasional	Dokumen			SK 03	3	1		1		8,820,000			2,000,000		
IRO		Indikator RO: Jumlah Dokumen Perhitungan Nilai Indeks Ketahanan Air Nasional	Dokumen			ISK 04		1		1							
RO	009	Dokumen Neraca Air Nasional	Dokumen			SK 03		1	1	1	1		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
IRO		Indikator RO: Jumlah Dokumen Neraca Air Nasional yang Disusun	Dokumen			ISK 05		1	1	1	1						
KRO	QMA	Data dan Informasi Publik (Prioritas)	Dokumen														
RO	002	Flood Management in North Java Project	Dokumen			SK 01	2					13,967,400					
						ISK 02											
IRO	003	National Urban Flood Resilience Project (NUFReP)	Dokumen			SK 01	6					5,617,368					
						ISK 02											
KRO	BAH	Pelayanan Publik Lainnya	Layanan														
RO	001	Layanan Teknis Sumber Daya Air	Layanan			SK 03		8	8	8	8		96,397,786	110,244,541	92,843,948	101,167,866	
IRO		Indikator RO: 1. Persentase Layanan Teknis Balai Teknik/Balai	%			ISK 01		100	100	100	100						
IRO		Indikator RO: 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Balai	Indeks			ISK 03	82.13	83.43	85.13	86.71	88.13						
RO	002	Layanan Unit Kaji Cepat	Layanan			SK 01		38	38	38	38						
IRO		Indikator RO: Tingkat Kesiapan Teknis	%			ISK 04		87.50%	90.00%	90.00%	90.00%						
KRO	EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	Layanan														
RO	954	Layanan Manajemen SDM	Layanan			SK 02		1	1	1	1		2,965,271	3,106,474	3,162,956	3,247,678	
IRO		Indikator RO: Tingkat Layanan Pengelolaan Jabatan Fungsional dan Pengembangan	%			ISK 01		100	100	100	100						
KRO	EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Dokumen														
RO	952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen			SK 02		4	4	4	4		20,785,000	22,478,250	24,408,524	27,041,445	
IRO		Indikator RO: 1. Tingkat Pembinaan Layanan Teknis Sumber Daya Air	%			ISK 02		100	100	100	100						
IRO		Indikator RO: 2. Tingkat Pembinaan Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA)	%			ISK 03		77.24%	78.55%	79.91%	82.00%						
IRO		Indikator RO: 3. Tingkat Penerapan NSPK, Teknologi dan Peralatan Infrastruktur	%			ISK 04		100	100	100	100						
IRO		Indikator RO: 4. Tingkat Keandalan Infrastruktur SDA	%			ISK 05		100	100	100	100						
IRO		Indikator RO: 5. Tingkat Pembinaan Implementasi Transformasi Digital	%			ISK 07		42.86	53.57	64.29	75						
IRO		Indikator RO: 6. Jumlah Wilayah Sungai Kewenangan Pusat dengan Neraca Air	Wilayah Sungai			ISK 06		50	50	50	50						
RO	975	Layanan Manajemen Kinerja	Dokumen			SK 04		1	1	1	1						
IRO		Indikator RO: Tingkat Pelaksanaan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko Unit	%			ISK 01		76.40%	77.80%	80.20%	81.60%						
RO	955	Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen			SK 05		1	1	1	1						
IRO		Indikator RO: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Unit Kerja	Nilai			ISK 01		92.92	93.42	93.92	94.42						
RO	961	Layanan Reformasi Kinerja	Dokumen			SK 06		1	1	1	1		314,472	345,919	380,511	418,562	
IRO		Indikator RO: Nilai SAKIP Unit Kerja	Nilai			ISK 01		71.09	71.11	71.13	71.15						
KEGIATAN	7691	Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Non-Padi										5,285,988,115	65,516,341,775	69,105,081,137	52,775,596,775	32,356,765,934	
SK	01	Meningkatnya pasokan air irigasi berkelanjutan dan produktivitas penggunaan air				SP 01											
ISK	01	Jumlah luas layanan irigasi yang ketersediaan airnya dijamin oleh waduk	Ha (Kumulatif)			ISP 04	466	17,229	34,378	53,607	72,319						
ISK	02	Jumlah luas layanan irigasi yang dibangun untuk pertanian multikomoditas	Ha (Kumulatif)			ISP 03	10,000	29,000	57,000	87,000	118,000						
ISK	03	Jumlah luas layanan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkan	Ha (Kumulatif)			ISP 03	75,864	222,864	454,864	656,864	788,864						
ISK	04	Jumlah dukungan teknis bidang irigasi dan rawa	Dokumen			ISP 03	126	137	84	11	3						
SK	02	Meningkatnya pembinaan layanan irigasi dalam rangka peningkatan pasokan air				SP 01											
ISK	01	Tingkat kinerja layanan pembinaan irigasi dan rawa	%			ISP 03	100%	100%	100%	100%	100%						
SK	03	Meningkatnya pelaksanaan kepatuhan intern				SP 02											
ISK	01	Tingkat pelaksanaan kepatuhan intern dan manajemen risiko Unit Kerja	%			ISP 03	76.00%	76.40%	77.80%	80.20%	81.60%						
SK	04	Meningkatnya nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran				SP 02											
ISK	01	Tingkat indikator kinerja pelaksanaan anggaran Unit Kerja	Nilai			ISP 04	84.58	85.08	85.58	86.08	86.58						
SK	05	Meningkatnya nilai SAKIP				SP 02											
ISK	01	Tingkat implementasi penyelenggaraan SAKIP Unit Kerja	Nilai			ISP 05	65.17	65.19	65.21	65.23	65.25						
KRO	ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	Rekomendasi Kebijakan														
RO	001	Layanan teknis dan pembinaan bidang irigasi dan rawa	Rekomendasi Kebijakan			SK 02	38					11,209,228					
IRO						ISK 01											
RO	002	Kepatuhan intern dan manajemen risiko serta pembangunan zona integritas	Rekomendasi kebijakan			SK 03	2					35,000					
IRO						ISK 01											
RO	004	Komering Irrigation Project Stage III	Kajian			SK 02	1					2,132,027					
IRO						ISK 01											
RO	005	Rentang Irrigation Modernization Project (RIMP)	Kajian			SK 02	1					2,800,000					
IRO						ISK 01											
RO	006	The Urgent Rehabilitation of Strategic Irrigation for Western Region of Indonesia	Kajian			SK 02	1					30,515,331					
IRO						ISK 01											
RO	007	Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP)	Kajian			SK 02	4					128,195,700					
IRO						ISK 01											
KRO	CBG	Prasarana Bidang SDA dan Irigasi	Unit														
RO	001	Bendung Irigasi	Unit			SK 01	4.00	15.00	30.00	24.00	13.00	148,749,117	918,312,562	1,623,041,540	1,789,016,288	1,585,085,013	
IRO		Indikator RO: 1. Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	Unit			ISK 02	4.00	4.00	7.00	11.00	13.00						
IRO		Indikator RO: 2. Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi/Ditingkatkan	Unit			ISK 03	12.00	11.00	24.00	12.00	0.00						
RO	002	Rehabilitasi bendung	Unit			SK 01	12.00					316,462,000					
IRO						ISK 03											

KODE		UNIT/SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KRO/RO/INDIKATOR RO	SATUAN	Baseline	Lokasi	LINK CASCADING	Target					Alokasi (Rp Ribu)					
							2025	2026	2027	2028	2029	2,025	2,026	2,027	2,028	2,029	2025-2029
RO	003	Bangunan Air Irigasi	Unit			SK 01											
IRO		Indikator RO: 1. Jumlah Bangunan Air Irigasi yang Dibangun	Unit			ISK 02											
IRO		Indikator RO: 2. Jumlah Bangunan Air Irigasi yang Direhabilitasi/Ditingkatkan	Unit			ISK 03											
KRO	CBR	Dukungan Teknis	Dokumen														
RO	001	Dokumen Teknis Bidang Irigasi dan Rawa	Dokumen			SK 01	157.00	259.00	122.00	49.00	41.00	294,158,172	649,503,485	254,229,500	81,222,450	46,244,695	
IRO		Indikator RO: Jumlah Dokumen Teknis yang Disusun	Dokumen			ISK 04	126.00	259.00	122.00	49.00	41.00						
RO	002	Fasilitasi Unit Manajemen atau Pelaksanaan Proyek (PMU/PIU)	Dokumen			SK 01		7.00	5.00	5.00	4.00		55,567,647	50,000,000	48,964,589	40,000,000	
IRO		Indikator RO: Jumlah Dokumen Dukungan Proyek yang Disusun	Dokumen			ISK 04											
RO	003	Unit Desain	Dokumen			SK 01		39.00	39.00	39.00	39.00		13,000,000	13,000,000	13,000,000	13,000,000	
IRO		Indikator RO: Jumlah Dokumen Teknis yang Disusun	Dokumen			ISK 04		39.00	39.00	39.00	39.00						
KRO	CBS	Prasarana Jaringan Sumber Daya Air	Km														
RO	001	Jaringan Irigasi untuk Komoditas Non Padi dan Tambak	Km			SK 01	12.00	305.24	143.99	224.91	199.38	60,000,000	235,753,923	193,869,699	152,798,997	252,041,742	
IRO		Indikator RO: 1. Jumlah Luas Daerah Irigasi yang Dibangun	Ha			ISK 02	1,250.83	1,356.55	1,822.84	975.84	197.06						
IRO		Indikator RO: 2. Jumlah Luas Daerah Irigasi yang Direhabilitasi/Ditingkatkan	Ha			ISK 03	21,935.19	6,702.68	6,966.34	7,144.37	6,057.97						
RO	002	Jaringan Irigasi di Sentra Produksi Lumbung Pangan	Km			SK 01		2,853.55	2,571.37	2,571.37	2,719.56		6,802,112,099	10,086,754,600	10,775,510,692	8,471,886,666	
IRO		Indikator RO: 1. Jumlah Luas Daerah Irigasi yang Dibangun	Ha			ISK 02	7,126.56	10,569.27	22,791.99	22,077.76	27,788.06						
IRO		Indikator RO: 2. Jumlah Luas Daerah Irigasi yang Direhabilitasi/Ditingkatkan	Ha			ISK 03	33,156.35	184,917.77	312,521.57	240,482.81	164,410.81						
RO	005	Pembangunan jaringan tersier irigasi permukaan dan irigasi rawa	Km			-	41.78					38,600,000					
IRO																	
RO	006	Rehabilitasi/peningkatan jaringan irigasi multikomoditas	Km			SK 01	334.00					344,500,000					
IRO						ISK 03											
RO	008	Rehabilitasi/peningkatan prasarana irigasi Untuk Mendukung Ketahanan Pangan	Km			SK 01	47.00					191,093,730					
IRO						ISK 03											
RO	010	Rehabilitasi/peningkatan jaringan tersier irigasi permukaan dan irigasi rawa	Km			-	5.00					56,791,000					
IRO																	
KRO	RBR	Dukungan Teknis (Prioritas)	Dokumen														
RO	501	Komering Irrigation Project Stage III	Dokumen			SK 01	1.00					35,409,463					
IRO						ISK 04											
KRO	RBG	Prasarana Bidang SDA dan Irigasi (Prioritas)	Unit														
RO	001	Bangunan Irigasi di Lokasi Optimasi Lahan Kementerian Pertanian	Unit			SK 01											
IRO		Indikator RO: 1. Jumlah Luas Daerah Irigasi yang Dibangun	Ha			ISK 02											
IRO		Indikator RO: 2. Jumlah Luas Daerah Irigasi yang Direhabilitasi/Ditingkatkan	Ha			ISK 03											
RO	002	Bangunan Irigasi Kewenangan Pemerintah Daerah	Unit			SK 01							26,185,623,750	26,185,623,750	17,457,082,500	8,728,541,250	
IRO		Indikator RO: 1. Jumlah Bangunan Air Irigasi yang Dibangun	Unit			ISK 02		1.00	1.00	1.00	1.00						
IRO		Indikator RO: 2. Jumlah Bangunan Air Irigasi yang Direhabilitasi/Ditingkatkan	Unit			ISK 03		1.00	1.00	1.00	1.00						
KRO	RBS	Prasarana Jaringan Sumber Daya Air (Prioritas)	Km														
RO	001	Jaringan Irigasi Waduk	Km			SK 01	22.00	82.88	110.56	168.72	167.81	242,713,690	563,599,128	976,254,764	1,177,831,672	1,391,011,089	
IRO		Indikator RO: 1. Jumlah Luas Layanan Irigasi yang Dijamin Waduk	Ha			ISK 01	12,230.84	13,128.99	13,529.17	21,067.34	19,958.16						
IRO		Indikator RO: 2. Jumlah Luas Daerah Irigasi yang Dibangun	Ha			ISK 02	2,307.60	3,573.75	6,105.51	7,562.46	8,533.75						
IRO		Indikator RO: 3. Jumlah Luas Daerah Irigasi yang Direhabilitasi/Ditingkatkan	Ha			ISK 03	9,923.24	9,555.24	7,423.66	13,504.88	11,424.41						
RO	002	Pengembangan dan pengelolaan irigasi di Kawasan Sentra Produksi Pangan	Km			SK 01	21.70					7,000,000					
IRO						ISK 02											
RO	009	Jaringan Irigasi di Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Sumatera Utara	Km			SK 01		19.71	0.00	0.00	0.00						
IRO		Indikator RO: 1. Jumlah Luas Daerah Irigasi yang Dibangun	Ha			ISK 02	868.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
IRO		Indikator RO: 2. Jumlah Luas Daerah Irigasi yang Direhabilitasi/Ditingkatkan	Ha			ISK 03	0.00	934.85	0.00	0.00	0.00						
RO	004	Jaringan Irigasi di Lokasi Optimasi Lahan Kementerian Pertanian	Km			SK 01											
IRO		Indikator RO: 1. Jumlah Luas Daerah Irigasi yang Dibangun	Ha			ISK 02											
IRO		Indikator RO: 2. Jumlah Luas Daerah Irigasi yang Direhabilitasi/Ditingkatkan	Ha			ISK 03											
RO	003	Jaringan Irigasi di Sentra Produksi Lumbung Pangan	Km			SK 01	66	635.33	604.67	329.23	289.61	410,730,000	4,669,889,399	4,865,397,612	3,499,038,707	2,279,137,345	
IRO		Indikator RO: 1. Jumlah Luas Daerah Irigasi yang Dibangun	Ha			ISK 02		11,728.47	10,533.55	7,734.79	9,421.42						
IRO		Indikator RO: 2. Jumlah Luas Daerah Irigasi yang Direhabilitasi/Ditingkatkan	Ha			ISK 03		51,758.24	51,738.27	51,738.27	19,782.03						
RO	005	Jaringan Irigasi Kewenangan Pemerintah Daerah	Km			SK 01		18,699	18,699	12,466	6,233		26,185,623,750	26,185,623,750	17,457,082,500	8,728,541,250	
IRO		Indikator RO: 1. Jumlah Luas Daerah Irigasi yang Dibangun	Ha			ISK 02	84,984	254,953	254,953	169,969	84,984						
IRO		Indikator RO: 2. Jumlah Luas Daerah Irigasi yang Direhabilitasi/Ditingkatkan	Ha			ISK 03	146,310	265,163	265,163	176,775	88,388						
RO	006	Rehabilitasi/peningkatan jaringan irigasi waduk	Km			SK 01	65					515,044,974					
IRO						ISK 01											
						ISK 02											
IRO						ISK 03											
RO	008	Rehabilitasi/peningkatan prasarana irigasi Untuk Mendukung Ketahanan Pangan	Km			SK 01	406					747,667,567					
IRO						ISK 03											
RO	010	Jaringan Irigasi di Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Sumatera Selatan	Km			SK 01											
IRO		Indikator RO: 1. Jumlah Luas Daerah Irigasi yang Dibangun	Ha			ISK 02											
IRO		Indikator RO: 2. Jumlah Luas Daerah Irigasi yang Direhabilitasi/Ditingkatkan	Ha			ISK 03											
RO	011	Jaringan Irigasi di Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Kalimantan Tengah	Km			SK 01											
IRO		Indikator RO: 1. Jumlah Luas Daerah Irigasi yang Dibangun	Ha			ISK 02											
IRO		Indikator RO: 2. Jumlah Luas Daerah Irigasi yang Direhabilitasi/Ditingkatkan	Ha			ISK 03											
RO	012	Jaringan Irigasi di Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Nusa Tenggara Timur	Km			SK 01											
IRO		Indikator RO: 1. Jumlah Luas Daerah Irigasi yang Dibangun	Ha			ISK 02											
IRO		Indikator RO: 2. Jumlah Luas Daerah Irigasi yang Direhabilitasi/Ditingkatkan	Ha			ISK 03											
RO	013	Jaringan Irigasi di Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Papua	Km			SK 01											
IRO		Indikator RO: 1. Jumlah Luas Daerah Irigasi yang Dibangun	Ha			ISK 02											
IRO		Indikator RO: 2. Jumlah Luas Daerah Irigasi yang Direhabilitasi/Ditingkatkan	Ha			ISK 03											
RO	014	Jaringan Irigasi di Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Papua Selatan	Km			SK 01											
IRO		Indikator RO: 1. Jumlah Luas Daerah Irigasi yang Dibangun	Ha			ISK 02											
IRO		Indikator RO: 2. Jumlah Luas Daerah Irigasi yang Direhabilitasi/Ditingkatkan	Ha			ISK 03											
RO	501	Jaringan Irigasi DI Rentang (RIMP)	Km			SK 01	187.18	551.12	390.29	85.93	96.67	514,574,420	261,604,500	784,813,500	1,046,418,000	523,209,000	
IRO		Indikator RO: 2. Jumlah Luas Daerah Irigasi yang Direhabilitasi/Ditingkatkan	Ha			ISK 02	1,737.72	19,550.10	16,074.84	10,298.77	0.00						
RO	502	Jaringan Irigasi DI Komering (KIP)	Km			SK 01	76.54	130.00	130.00	0.00	0.00	360,648,510	387,953,154				
IRO		Indikator RO: 1. Jumlah Luas Layanan Irigasi yang Dijamin Waduk	Ha			ISK 01	0.00	3,753.00	3,753.00	0.00	0.00						
IRO		Indikator RO: 2. Jumlah Luas Daerah Irigasi yang Dibangun	Ha			ISK 02	0.00	3,753.00	3,753.00	0.00	0.00						
RO	503	Jaringan Irigasi Wilayah Barat Indonesia (URSIP)	Km			SK 01	15.00	28.38	0.00	0.00	0.00	146,965,584	300,000,000	303,149,581			
IRO		Indikator RO: Jumlah Luas Daerah Irigasi yang Direhabilitasi/Ditingkatkan	Ha			ISK 03	644.00	1,572.53	0.00	0.00	0.00						
RO	504	Jaringan Irigasi Wilayah Sulawesi Tengah (IRSL)	Km			SK 01	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	6,083,678					

KODE		UNIT/SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KRO/RO/INDIKATOR RO	SATUAN	Baseline	Lokasi	LINK CASCADING	Target					Alokasi (Rp Ribu)					
							2025	2026	2027	2028	2029	2,025	2,026	2,027	2,028	2,029	2025-2029
IRO		Indikator RO: Jumlah Luas Daerah Irigasi yang Direhabilitasi/Ditingkatkan	Ha			ISK 03	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00						
RO	505	Jaringan Irigasi Strategis (SIMURP)	Km			SK 01	0.0001					46,933,744					
IRO		Indikator RO: Jumlah Luas Daerah Irigasi yang Direhabilitasi/Ditingkatkan	Ha			ISK 03	0.03										
RO	506	Jaringan Irigasi Strategis yang Diairi oleh Waduk (FISP)	Km			SK 01		41.8	125.4	167.2	83.6		323,985,165	971,955,494	2,197,857,753	4,255,638,707	
IRO		Indikator RO: 1. Jumlah Luas Layanan Irigasi yang Dijamin Waduk	Ha			ISK 01		452.8	1,358.40	3,077.20	5,969.60						
IRO		Indikator RO: 2. Jumlah Luas Daerah Irigasi yang Dibangun	Ha			ISK 02				6,037.40	24,149.60						
IRO		Indikator RO: 3. Jumlah Luas Daerah Irigasi yang Direhabilitasi/Ditingkatkan	Ha			ISK 03		24,149.60	18,594.90	24,793.20	12,396.60						
RO	507	Jaringan Irigasi Strategis (DRIP)	Km			SK 01		103.98	311.93	423.42	238.01		550,297,740	1,650,893,221	2,302,260,480	1,482,548,080	
IRO		Indikator RO: 1. Jumlah Luas Layanan Irigasi yang Dijamin Waduk	Ha			ISK 01				500	2000						
IRO		Indikator RO: 2. Jumlah Luas Daerah Irigasi yang Dibangun	Ha			ISK 02				500	2000						
IRO		Indikator RO: 3. Jumlah Luas Daerah Irigasi yang Direhabilitasi/Ditingkatkan	Ha			ISK 03		13,647.20	40,941.60	54,588.80	27,294.40						
RO	508	Jaringan Irigasi Rawa yang dioptimalisasi (OLIFS)	Km			SK 01		109.79	329.38	425.99	215.19		300,951,262	897,848,787	1,196,297,549	601,902,525	
IRO		Indikator RO: 1. Jumlah Luas Layanan Irigasi yang Dijamin Waduk	Ha			ISK 01											
IRO		Indikator RO: 2. Jumlah Luas Daerah Irigasi yang Direhabilitasi/Ditingkatkan	Ha			ISK 03		10,923.00	32,769.00	32,769.00	21,846.00						
RO	701	Rehabilitasi Daerah irigasi Cisadane	Km			SK 01	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,050,000					
IRO		Indikator RO: Jumlah Luas Daerah Irigasi yang Direhabilitasi/Ditingkatkan	Ha			ISK 03	999.00										
RO	704	Rehabilitasi Daerah irigasi Baro Raya	Km			SK 01	15.32					46,787,680					
IRO		Indikator RO: Jumlah Luas Daerah Irigasi yang Direhabilitasi/Ditingkatkan	Ha			ISK 03	820.00										
RO	706	Pembangunan Daerah irigasi Batang Sinamar	Km			SK 01	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000					
IRO		Indikator RO: Jumlah Luas Daerah Irigasi yang Dibangun	Ha			ISK 02	439.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
RO	708	Pembangunan Daerah irigasi Batang Asai (Tahap II)	Km			SK 01	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000					
IRO		Indikator RO: Jumlah Luas Daerah Irigasi yang Dibangun	Ha			ISK 02	1.00										
RO	709	Daerah irigasi Air Seluma yang direhabilitasi	Km			SK 01	3.12					30,875,000					
IRO		Indikator RO: Jumlah Luas Daerah Irigasi yang Direhabilitasi/Ditingkatkan	Ha			ISK 03	293.00										
RO	710	Rehabilitasi Daerah irigasi Way Sekampung	Km			SK 01	22.00					121,435,498					
IRO		Indikator RO: Jumlah Luas Daerah Irigasi yang Direhabilitasi/Ditingkatkan	Ha			ISK 03	2,580.00										
RO	712	Rehabilitasi Daerah irigasi Jragung (Tahap II)	Km			SK 01	9.74					54,527,002					
IRO		Indikator RO: 1. Jumlah Luas Layanan Irigasi yang Dijamin Waduk	Ha			ISK 01	466.00										
IRO		Indikator RO: 2. Jumlah Luas Daerah Irigasi yang Direhabilitasi/Ditingkatkan	Ha			ISK 03	466.00										
RO	714	Rehabilitasi Daerah irigasi Glapan (Tahap II)	Km			SK 01	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000					
IRO		Indikator RO: Jumlah Luas Daerah Irigasi yang Direhabilitasi/Ditingkatkan	Ha			ISK 03	4,702.00										
RO	716	Rehabilitasi Daerah irigasi Pacal	Km			SK 01	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,300,000					
IRO		Indikator RO: Jumlah Luas Daerah Irigasi yang Direhabilitasi/Ditingkatkan	Ha			ISK 03	6,000.00										
KRO	EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Dokumen														
RO	952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen			SK 04		1	1	1	1		2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	
IRO		Indikator RO: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Unit Kerja	Nilai			ISK 01		85.08	85.58	86.08	86.58						
RO	953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen			SK 02		1	1	1	1		18,075,064	18,546,606	19,041,725	19,561,600	
IRO		Indikator RO: Tingkat Kinerja Layanan Pembinaan Irigasi dan Rawa	%			ISK 01		1.00	1.00	1.00	1.00						
RO	975	Layanan Manajemen Kinerja	Dokumen			SK 03		1	1	1	1						
IRO		Indikator RO: Tingkat Pelaksanaan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko Unit	%			ISK 01		0.76	0.78	0.80	0.82						
RO	961	Layanan Reformasi Kinerja	Dokumen			SK 03		1	1	1	1						
IRO		Indikator RO: Nilai SAKIP Unit Kerja	Nilai			ISK 01		65.19	65.21	65.23	65.25						
KEGIATAN	7692	Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman										5,248,928,771	11,431,746,226	13,781,435,301	15,111,135,833	14,732,967,450	
SK	01	Meningkatnya ketahanan metropolitan dan wilayah sungai terhadap potensi risiko				SP 01											
ISK	01	Luas kawasan yang terlindungi dari risiko daya rusak air	Ha (Kumulatif)			ISP 06	3,600	8,300	15,900	22,000	27,000	3,856,402,079	10,628,515,931	9,027,909,528	7,231,518,183	6,210,399,684	
ISK	02	Kapasitas prasarana pengendali lahar dan sedimen	Juta m3 (Kumulatif)			ISP 06	0.35	1.20	2.10	3.20	4.30	471,995,569	1,431,778,210	1,306,598,288	948,476,750	554,010,625	
ISK	03	Jumlah kawasan yang menerapkan pendekatan terpadu struktural dan non-struktural	Kawasan (Kumulatif)			ISP 06	-	-	5	5	5						
ISK	04	Jumlah dukungan teknis bidang sungai dan pantai	Dokumen			ISP 06	88	39	163	120	113	203,312,069	138,657,301	100,394,296	53,444,000	50,861,000	
SK	02	Meningkatnya ketahanan terhadap risiko daya rusak air di Pesisir Utara Jawa				SP 01											
ISK	01	Luas kawasan yang terlindungi dari risiko daya rusak air di Pesisir Utara Jawa	Ha (Kumulatif)			ISP 06	200	2,000	3,700	4,500	5,000	686,101,766	2,411,316,809	1,887,114,184	6,326,200,398	6,630,206,293	
ISK	02	Jumlah kawasan yang menerapkan pendekatan terpadu struktural dan non-struktural	Kawasan (Kumulatif)			ISP 06	-	5	8	11	11						
SK	03	Meningkatnya pembinaan pengelolaan risiko daya rusak air dalam rangka				SP 01											
ISK	01	Tingkat kinerja layanan pembinaan sungai dan pantai	%			ISP 06	100%	100%	100%	100%	100%	31,082,288	65,999,367	17,738,234	17,795,297	8,012,651	
SK	04	Meningkatnya pelaksanaan kepatuhan intern				SP 02											
ISK	01	Tingkat pelaksanaan kepatuhan intern dan manajemen risiko Unit Kerja	%			ISP 03	76.00%	76.40%	77.80%	80.20%	81.60%	35,000	72,782	80,060	88,066	96,874	
SK	05	Meningkatnya nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran				SP 02											
ISK	01	Tingkat indikator kinerja pelaksanaan anggaran Unit Kerja	Nilai			ISP 04	85.05	85.55	86.05	86.55	87.05						
SK	06	Meningkatnya nilai SAKIP				SP 02											
ISK	01	Tingkat implementasi penyelenggaraan SAKIP Unit Kerja	Nilai			ISP 05	70.02	70.04	70.06	70.08	70.10						
KRO	ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	Rekomendasi Kebijakan														
RO	001	Layanan teknis dan pembinaan bidang sungai dan pantai	Rekomendasi Kebijakan			SK 03	1					7,700,000					
IRO						ISK 01											
RO	002	Pelaksanaan kepatuhan intern dan manajemen risiko serta pembangunan zona	Rekomendasi kebijakan			SK 04	2					35,000					
IRO						ISK 01											
RO	003	Flood Management in North Java Project	Kajian			SK 03	1					3,000,000					
IRO						ISK 01											
RO	004	Urban Flood Control System Improvement in Selected Cities Phase II	Kajian			SK 03	1					14,882,288					
IRO						ISK 01											
RO	005	National Urban Flood Resilience Project (NUFReP)	Kajian			SK 03	1					5,500,000					
IRO						ISK 01											
KRO	CBH	Prasarana Bidang Penanggulangan Bencana	Unit														
RO	001	Prasarana Pengendali Lahar/Sedimen	Unit			SK 01	5	20	37	34	29	131,995,569	499,269,625	768,707,000	682,669,392	536,200,000	
IRO		Indikator RO: Jumlah Kapasitas Prasarana Pengendali Lahar/Sedimen	Juta m3			ISK 02	0.2	1.25	0.69	0.71	0.52						
RO	002	Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan,	Unit			SK 01	6	5.00	14.00	6.00	6.00	75,000,000	221,572,316	403,900,000	164,000,000	141,533,333	
IRO		Indikator RO: Luas Kawasan yang Terlindungi dari Risiko Daya Rusak Air	Ha			ISK 01	7.23	245.56	63.16	28.80	29.17						
RO	211	Bangunan Pendukung Pengendali Banjir IKN	Unit			SK 01	2					51,559,307					
IRO		Indikator RO: Luas Kawasan yang Terlindungi dari Risiko Daya Rusak Air	Ha			ISK 01	45.42										
KRO	CBR	Dukungan Teknis	Dokumen														
RO	001	Dokumen Teknis Bidang Sungai dan Pantai	Dokumen			SK 01	91	39	163	120	113	120,144,659	75,700,000	106,550,000	56,000,000	50,000,000	
IRO		Indikator RO: Jumlah Dokumen Teknis yang Disusun	Dokumen			ISK 04	88	39	163	120	113						
RO	002	Fasilitasi Unit Manajemen atau Pelaksanaan Proyek (PMU/PIU)	Dokumen			SK 01		5	3	2	1		448,671,561	493,791,255	448,845,657	436,427,122	
IRO		Indikator RO: Jumlah Dokumen Dukungan Proyek yang Disusun	Dokumen			ISK 04		5	3	2	1						
RO	003	Unit Desain	Dokumen			SK 01		10	10	10	10						

KODE		UNIT/SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KRO/RO/INDIKATOR RO	SATUAN	Baseline	Lokasi	LINK CASCADING	Target					Alokasi (Rp Ribu)					
							2025	2026	2027	2028	2029	2,025	2,026	2,027	2,028	2,029	2025-2029
IRO		Indikator RO: Jumlah Dokumen Teknis yang Disusun	Dokumen			ISK 04		10	10	10	10						
KRO	CBS	Prasarana Jaringan Sumber Daya Air	Km														
RO	001	Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan,	Km			SK 01	25.00	84.56	113.88	104.33	87.26	928,379,000	2,525,014,830	4,562,990,615	3,457,122,507	3,155,060,152	
IRO		Indikator RO: Luas Kawasan yang Terlindungi dari Risiko Daya Rusak Air	Ha			ISK 01	939.38	2,083.41	5,358.06	4,901.72	4,145.55						
RO	003	Prasarana Perlindungan Abrasi Kawasan Pesisir Perkotaan, Strategis Ekonomi, dan	km			SK 01	1	22.77	13.57	13.93	13.55	360,500,000	1,165,750,000	830,468,228	640,206,349	532,619,639	
IRO		Indikator RO: Luas Kawasan yang Terlindungi dari Risiko Daya Rusak Air	Ha			ISK 01	151.95	315.35	173.3	137.04	130.48						
RO	004	Prasarana Perlindungan Pantai Kawasan 3T	Km			SK 01	0	6.30	1.39	1.38	1.25	91,533,000	510,475,000	250,810,468	172,000,000	170,679,458	
IRO		Indikator RO: Luas Kawasan yang Terlindungi dari Risiko Daya Rusak Air	Ha			ISK 01	58.91	101.65	22.89	13.68	10.54						
RO	005	Normalisasi sungai	Km			SK 01	0.15					25,000,000					
IRO		01-Luas Kawasan yang Terlindungi dari Risiko Daya Rusak Air	Ha			ISK 01											
KRO	RBH	Prasarana Bidang Penanggulangan Bencana (Prioritas)	Unit														
RO	001	Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Metropolitan Strategis	Unit			SK 01		1	12	10	7		22,500,000	243,219,000	170,000,000	107,500,000	
IRO		Indikator RO: 1. Luas Kawasan yang Terlindungi dari Risiko Daya Rusak Air	Ha			ISK 01	0	50	54.1	39.59	25.5						
IRO		Indikator RO: 2. Jumlah Kawasan yang Menerapkan Pendekatan Terpadu Struktural	Kawasan			ISK 03											
RO	002	Bangunan Pendukung Pengendali Banjir IKN	Unit			SK 01	0	1	2	1	0	50,000,000	186,000,000	272,000,000	90,000,000		
IRO		Indikator RO: Luas Kawasan yang Terlindungi dari Risiko Daya Rusak Air	Ha			ISK 01	12.46	136.5	10.25	0	0						
RO	003	Prasarana Pengendali Risiko Daya Rusak Air di Perkotaan Pesisir Utara Jawa	Unit			SK 01			2	6	7			144,550,000	134,300,000	122,000,000	
IRO		Indikator RO: Luas Kawasan yang Terlindungi dari Risiko Daya Rusak Air di Pesisir	Juta m3			ISK 02			12.51	29.35	29.05						
RO	004	Prasarana Pengendalian Lahar/Sedimen di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan	Unit			SK 01		1	2	1	1		35,000,000	25,000,000	20,000,000	18,000,000	
IRO		Indikator RO: Jumlah Kapasitas Prasarana Pengendali Lahar/Sedimen	Ha			ISK 01		0.02	0.05	0.02	0.02						
RO	501	Prasarana Pengendali Lahar/Sedimen (Volcanic DRR)	Unit			SK 01		3	7	6	1		281,210,796	844,751,788	410,000,000	19,700,000	
IRO		Indikator RO: Jumlah Kapasitas Prasarana Pengendali Lahar/Sedimen	Juta m3			ISK 02		0.11	0.35	0.3	0.05				#VALUE!	#VALUE!	
RO	502	Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Metropolitan Strategis (NUFREP)	Unit			SK 01	0	5	1	0	0	102,211,368	403,288,075	63,796,500			
IRO		Indikator RO: Luas Kawasan yang Terlindungi dari Risiko Daya Rusak Air	Ha			ISK 01	639.23	633.32	35.31	0	0						
RO	503	Prasarana Pengendali Daya rusak Air pada Kawasan JABODETABEK (IUFMJ)	Unit			SK 01				1	1		80,000,000	289,316,667	289,316,667	289,316,667	
IRO		Indikator RO: Luas Kawasan yang Terlindungi dari Risiko Daya Rusak Air di Pesisir	Ha			ISK 01				5	5						
RO	504	Prasarana Pengendali Daya Rusak Air pada Kawasan Terpilih (FMSR)	Unit			SK 01			1	2	2			20,000,000	30,000,000	30,000,000	
IRO		Indikator RO: Jumlah Kapasitas Prasarana Pengendali Lahar/Sedimen	Juta m3			ISK 02			0.01	0.02	0.02						
RO	505	Prasarana Pengendali Lahar/Sedimen (Volcanic DRR Phase II)	Unit			SK 01				5	10				265,000,000	845,000,000	
IRO		Indikator RO: Jumlah Kapasitas Prasarana Pengendali Lahar/Sedimen	Juta m3			ISK 02				0.1	0.2						
RO	701	Pembangunan Groundsill Sungai Cipamingkis (Tahap III)	Unit			SK 01	2					160,000,000					
IRO		Indikator RO: Jumlah Kapasitas Prasarana Pengendali Lahar/Sedimen	Juta m3			ISK 02	0.42	0.1									
RO	702	Groundsill Sungai Srandakan	Unit			SK 01	1	1				100,000,000	134,700,000				
IRO		Indikator RO: Jumlah Kapasitas Prasarana Pengendali Lahar/Sedimen	Juta m3			ISK 02	0	0.1									
RO	704	Pembangunan Pengendalian Banjir di Kabupaten Seram Bagian Barat (Tahap II)	Unit			SK 01	2					35,000,000					
IRO		Indikator RO: Jumlah Kapasitas Prasarana Pengendali Lahar/Sedimen	Juta m3			ISK 02	0.05										
KRO	RBR	Dukungan Teknis (Prioritas)	Dokumen														
RO	501	Engineering Service Project for Multipurpose Dams, Rivers and Coastal	Dokumen			SK 01	1					6,617,830					
IRO						ISK 04											
RO	502	Flood Management in North Java Project	Dokumen			SK 01	7					14,878,000					
IRO						ISK 04											
RO	503	National Urban Flood Resilience Project (NUFReP)	Dokumen			SK 01	15					61,671,580					
IRO						ISK 04											
KRO	RBS	Prasarana Jaringan Sumber Daya Air (Prioritas)	Km														
RO	001	Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Metropolitan Strategis	Km			SK 01		3.42	2.67	1.75	1.33		293,000,000	251,795,659	203,000,000	120,271,833	
IRO		Indikator RO: 1. Luas Kawasan yang Terlindungi dari Risiko Daya Rusak Air	Ha			ISK 01	8.23	90.09	151.77	96.48	56.55						
IRO		Indikator RO: 2. Jumlah Kawasan yang Menerapkan Pendekatan Terpadu Struktural	Kawasan			ISK 03											
RO	002	Prasarana Jaringan Pengendali Risiko Daya Rusak Air di Perkotaan Pesisir Utara	Km			SK 02	0.1	20.35	6.66	8.73	9.9	56,041,931	874,914,673	872,674,272	5,638,250,705	6,003,420,535	
IRO		Indikator RO: 1. Luas Kawasan yang Terlindungi dari Risiko Daya Rusak Air di	Ha			ISK 01	70.98	414.77	205.41	231.01	252.41						
IRO		Indikator RO: 2. Jumlah Kawasan yang Menerapkan Pendekatan Terpadu Struktural	Kawasan			ISK 03											
RO	003	Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan,	Km			SK 01		8.78	11.42	9.48	7.6		233,000,000	299,400,000	216,206,349	155,000,000	
IRO		Indikator RO: Luas Kawasan yang Terlindungi dari Risiko Daya Rusak Air	Ha			ISK 01		76.29	564.01	390.4	283.05						
RO	004	Prasarana Perlindungan Abrasi Kawasan Pesisir Perkotaan, Strategis Ekonomi, 3T,	Km			SK 02		133.84	56.92	7.72			467,000,000	128,000,000	48,001,000		
IRO		Indikator RO: 1. Luas Kawasan yang Terlindungi dari Risiko Daya Rusak Air	Ha			ISK 01		4.24	2.03	0.77							
IRO		Indikator RO: 2. Jumlah Kawasan yang Menerapkan Pendekatan Terpadu Struktural	Kawasan			ISK 03											
RO	036	Prasarana Pengendali Banjir Kali Bekasi	Km			SK 01	4.67	2	0	0	0	405,674,532	100,000,000				
IRO		Indikator RO: Luas Kawasan yang Terlindungi dari Risiko Daya Rusak Air	Ha			ISK 01	8.57	4	0	0	0						
RO	501	Prasarana Pengaman Pantai Bali (BBCP)	Km			SK 01	1.56	8.05	0.5	0	0	178,710,146	500,371,221	67,510,322			
IRO		Indikator RO: Luas Kawasan yang Terlindungi dari Risiko Daya Rusak Air	Ha			ISK 01	14.03	40.25	5	0	0						
RO	502	Prasarana Perlindungan Daya Rusak Air di Sulawesi Tengah (IRSL)	Km			SK 01	0.1	0	0	0	0	45,021,663					
IRO		Indikator RO: Luas Kawasan yang Terlindungi dari Risiko Daya Rusak Air	Ha			ISK 01	76.83	0	0	0	0						
RO	503	Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Metropolitan Strategis (UFCS)	Km			SK 01	21.4	16.54	0	0	0	213,229,021	105,382,277				
IRO		Indikator RO: Luas Kawasan yang Terlindungi dari Risiko Daya Rusak Air	Ha			ISK 01	405.25	185.8	0	0	0						
RO	504	Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Metropolitan Strategis (NUFReP)	Km			SK 01	5	19.18	11.58		-	480,936,372	1,268,570,966	1,043,080,492			
IRO		Indikator RO: 1. Luas Kawasan yang Terlindungi dari Risiko Daya Rusak Air	Ha			ISK 01	175.67	765.03	610.77	0	0						
IRO		Indikator RO: 2.Jumlah Kawasan yang Menerapkan Pendekatan Terpadu Struktural	Kawasan			ISK 03			5								
RO	505	Prasarana Perlindungan Kawasan Pesisir Utara Jawa dari Daya Rusak Air (FMNJP)	Km			SK 02	12.9	21.55	32.48	20.54	-	473,207,505	994,611,675	725,931,812	354,805,612		
IRO		Indikator RO: 1. Luas Kawasan yang Terlindungi dari Risiko Daya Rusak Air Di	Ha			ISK 01	195	1,493.08	1,461.60	924.3	0						
IRO		Indikator RO: 2. Jumlah Kawasan yang Menerapkan Pendekatan Terpadu Struktural	Kawasan			ISK 03			5.00	3.00	3.00						
RO	506	Prasarana Pengendali Daya rusak Air pada Kawasan JABODETABEK (IUFMJ)	Km			SK 01		0	0.03	0.03	1.23			97,388,889	360,548,889	644,314,308	
IRO		Indikator RO: 1. Luas Kawasan yang Terlindungi dari Risiko Daya Rusak Air Di	Ha			ISK 01			3.41	2.75	209.75						
IRO		Indikator RO: 2. Jumlah Kawasan yang Menerapkan Pendekatan Terpadu Struktural	Kawasan			ISK 02											
RO	507	Prasarana Pengendali Daya Rusak Air pada Kawasan Terpilih (FMSR)	Km			SK 01		0	13.4	15.41	17.13			580,000,000	690,000,000	875,000,000	
IRO		Indikator RO: 1. Luas Kawasan yang Terlindungi dari Risiko Daya Rusak Air	Ha			ISK 01			425.43	532.85	384.52						
IRO		Indikator RO: 2. Jumlah Kawasan yang Menerapkan Pendekatan Terpadu Struktural	Kawasan			ISK 03											
RO	508	Prasarana Pengaman Pesisir Terintegrasi (ICP)	Km			SK 01		0.00	3.01	5.64	4.29			390,000,000	565,000,000	475,000,000	
IRO		Indikator RO: 1. Luas Kawasan yang Terlindungi dari Risiko Daya Rusak Air	Ha			ISK 01			30.05	56.35	42.65						
IRO		Indikator RO: 2. Jumlah Kawasan yang Menerapkan Pendekatan Terpadu Struktural	Kawasan			ISK 03											
RO	701	Pembangunan Pengaman Pantai Pulau Terluar di Provinsi Kepulauan Riau (Tahap	Km			SK 01	0.30					107,000,000					
IRO		Indikator RO: Luas Kawasan yang Terlindungi dari Risiko Daya Rusak Air	Ha			SK 01	6.53										
RO	702	Pembangunan Pengendalian Banjir Air Bengkulu	Km			SK 01	0.50					100,000,000					
IRO		Indikator RO: Luas Kawasan yang Terlindungi dari Risiko Daya Rusak Air	Ha			SK 01	7.23										
RO	704	Pembangunan Pengaman Pantai Congot Kabupaten Kulonprogo	Km			SK 01	0.10					100,000,000					

KODE		UNIT/SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KRO/RO/INDIKATOR RO	SATUAN	Baseline	Lokasi	LINK CASCADING	Target					Alokasi (Rp Ribu)					
							2025	2026	2027	2028	2029	2,025	2,026	2,027	2,028	2,029	2025-2029
IRO		Indikator RO: Luas Kawasan yang Terlindungi dari Risiko Daya Rusak Air	Ha			SK 01	547.23										
RO	705	Pembangunan Pengaman Pantai di 3 (Tiga) Gili Kabupaten Lombok Utara	Km			SK 01	0.90					80,000,000					
IRO		Indikator RO: Luas Kawasan yang Terlindungi dari Risiko Daya Rusak Air	Ha			SK 01	30.19										
RO	708	Pembangunan Pengendalian Banjir Batang Suliti (Tahap II)	Km			SK 01	0.80					43,000,000					
IRO		Indikator RO: Luas Kawasan yang Terlindungi dari Risiko Daya Rusak Air	Ha			SK 01	21.3										
RO	709	Pembangunan Pengendalian Banjir Batang Agam di Kota Payakumbuh (Tahap II)	Km			SK 01	1.20					55,000,000					
IRO		Indikator RO: Luas Kawasan yang Terlindungi dari Risiko Daya Rusak Air	Ha			SK 01	12.23										
RO	710	Pembangunan Pengendalian Banjir Batang Lembang (Tahap II)	Km			SK 01	1.00					60,000,000					
IRO		Indikator RO: Luas Kawasan yang Terlindungi dari Risiko Daya Rusak Air	Ha			SK 01	11.23										
RO	711	Pembangunan Pengendalian Banjir Kabupaten Dharmasraya (Tahap II)	Km			SK 01	1.10					65,000,000					
IRO		Indikator RO: Luas Kawasan yang Terlindungi dari Risiko Daya Rusak Air	Ha			SK 01	31.23										
RO	714	Pembangunan Pengaman Pantai di Kabupaten Kaur (Tahap II)	Km			SK 01	0.80					45,000,000					
IRO		Indikator RO: Luas Kawasan yang Terlindungi dari Risiko Daya Rusak Air	Ha			SK 01	14.63										
RO	721	Pembangunan Pengamanan Pantai Bojongsalawe (Tahap IV)	Km			SK 01	1.00					92,500,000					
IRO		Indikator RO: Luas Kawasan yang Terlindungi dari Risiko Daya Rusak Air	Ha			SK 01	106.23										
RO	728	Pembangunan Pengaman Pantai AURI Kota Balikpapan	Km			SK 01	0.80					50,000,000					
IRO		Indikator RO: Luas Kawasan yang Terlindungi dari Risiko Daya Rusak Air	Ha			SK 01	21.23										
RO	730	Pembangunan Pengaman Pantai Amurang Kabupaten Minahasa (Tahap II)	Km			SK 01	1.00					88,000,000					
IRO		Indikator RO: Luas Kawasan yang Terlindungi dari Risiko Daya Rusak Air	Ha			SK 01	16.93										
RO	731	Pembangunan Pengaman Pantai Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	Km			SK 01	0.64					30,000,000					
IRO		Indikator RO: Luas Kawasan yang Terlindungi dari Risiko Daya Rusak Air	Ha			SK 01	12.63										
RO	732	Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Bolango (Tahap II)	Km			SK 01	1.14					40,000,000					
IRO		Indikator RO: Luas Kawasan yang Terlindungi dari Risiko Daya Rusak Air	Ha			SK 01	19.37										
RO	734	Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Lumu di Kabupaten Mamuju Tengah	Km			SK 01	2.00					38,000,000					
IRO		Indikator RO: Luas Kawasan yang Terlindungi dari Risiko Daya Rusak Air	Ha			SK 01	54.52										
RO	736	Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Kalukku Kabupaten Mamuju	Km			SK 01	3.30					57,000,000					
IRO		Indikator RO: Luas Kawasan yang Terlindungi dari Risiko Daya Rusak Air	Ha			SK 01	72.23										
KRO	EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Dokumen														
RO	952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen			SK 05		1	1	1	1		3,070,502	3,096,426	3,122,609	3,149,053	
IRO		Indikator RO: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Unit Kerja	Dokumen			ISK 01		85.55	86.05	86.55	87.05						
RO	953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen			SK 03		1	1	1	1		2,589,926	2,615,849	2,642,031	2,668,476	
IRO		Indikator RO: Tingkat Kinerja Layanan Pembinaan Sungai dan Pantai	%			ISK 01		100%	100%	100%	100%						
RO	975	Layanan Manajemen Kinerja	Dokumen			SK 04		1	1	1	1		10,000	10,000	10,000	10,000	
IRO		Indikator RO: Tingkat Pelaksanaan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko Unit	%			ISK 01		76.40%	77.80%	80.20%	81.60%						
RO	961	Layanan Reformasi Kinerja	Dokumen			SK 06		1	1	1	1		72,782	80,060	88,066	96,874	
IRO		Indikator RO: Nilai SAKIP Unit Kerja	Nilai			ISK 01		70.04	70.06	70.08	70.10						
KEGIATAN	7693	Pengembangan Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya										11,547,034,182	6,513,733,277	7,466,202,315	6,838,614,706	7,242,745,942	
SK	01	Meningkatnya kapasitas tampungan air yang dapat dimanfaatkan				SP 01											
ISK	01	Jumlah bendungan yang selesai dibangun	Unit (Kumulatif)			ISP 01	1	4	6	10	16						
ISK	02	Jumlah bendungan yang direhabilitasi	Unit (Kumulatif)			ISP 01	10	12	17	21	25						
ISK	03	Jumlah tampungan air alami yang direvitalisasi	Unit (Kumulatif)			ISP 01	20	27	36	46	50						
ISK	04	Rasio potensi reduksi banjir oleh bendungan	%			ISP 01	38.00%	39.81%	41.33%	43.20%	47.34%						
ISK	05	Jumlah dukungan teknis bidang bendungan dan danau	Dokumen			ISP 01	18	54	65	72	81						
SK	02	Meningkatnya pembinaan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur tampungan				SP 01											
ISK	01	Tingkat kinerja layanan pembinaan bendungan dan danau	%			ISP 01	100%	100%	100%	100%	100%						
SK	03	Meningkatnya layanan teknis pembangunan dan pengelolaan infrastruktur tampungan				SP 01											
ISK	01	Tingkat layanan teknis Balai Teknik Bendungan	%			ISP 01	100%	100%	100%	100%	100%						
ISK	02	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap layanan Balai Teknik Bendungan	Indeks			ISP 01	80.00	82.00	84.00	86.00	88.00						
SK	04	Meningkatnya pelaksanaan kepatuhan intern				SP 02											
ISK	01	Tingkat pelaksanaan kepatuhan intern dan manajemen risiko Unit Kerja	%			ISP 03	76.00%	76.40%	77.80%	80.20%	81.60%						
SK	05	Meningkatnya nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran				SP 02											
ISK	01	Tingkat indikator kinerja pelaksanaan anggaran Unit Kerja	Nilai			ISP 04	92.65	93.15	93.65	94.15	94.65						
SK	06	Meningkatnya nilai SAKIP				SP 02											
ISK	01	Tingkat implementasi penyelenggaraan SAKIP Unit Kerja	Nilai			ISP 05	76.72	76.74	76.76	76.78	76.80						
KRO	ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	Rekomendasi Kebijakan														
RO	001	Layanan teknis dan pembinaan bidang bendungan dan danau	Rekomendasi Kebijakan			SK 02	17					9,490,000					
IRO						ISK 01											
RO	002	Kepatuhan intern dan manajemen risiko serta pembangunan zona integritas	Rekomendasi Kebijakan			SK 04	2					35,000					
IRO						ISK 01											
KRO	CBG	Prasarana Bidang SDA dan Irigasi	Unit														
RO	001	Bendungan untuk Swasembada Air, Pangan, dan Energi	Unit			SK 01	13	3	6	4	4	32,523,523	156,688,924	255,000,000	271,000,000	200,000,000	
IRO		Indikator RO: Jumlah Bendungan yang Direhabilitasi	Unit			ISK 02		2	5	4	4						
RO	002	Rehabilitasi/peningkatan bendungan	Unit			SK 01	7					217,950,000					
IRO						ISK 02											
RO	005	Danau, Situ, dan Tampungan Air Alami	Unit			SK 01	24	7	9	10	4	644,360,000	254,000,000	321,000,000	418,000,000	148,000,000	
IRO		Indikator RO: Jumlah Tampungan Air Alami yang Direvitalisasi	Unit			ISK 03		7	9	10	4						
RO	006	Prasarana pendukung bendungan	Unit			SK 01	13					414,592,971					
IRO						ISK 02											
RO	219	Bendungan Riam Kiwa	Unit			SK 01	1	1	1	1	1	18,280,213	280,388,703	361,496,610	529,996,713	661,609,520	
IRO		Indikator RO: 1. Jumlah Bendungan yang Selesai Dibangun	Unit			ISK 01					1						
IRO		Indikator RO: 2. Persentase Reduksi Banjir oleh Bendungan	%			ISK 04					75.23						
IRO		Indikator RO: 3. Kapasitas Tampung	Juta m3			ISP 1					90.51						
KRO	CBR	Dukungan Teknis	Dokumen														
RO	001	Dokumen Teknis Bidang Bendungan dan Danau	Dokumen			SK 01	84	12	18	5	6	323,344,646	116,291,170	75,350,000	63,600,000	100,600,000	
IRO		Indikator RO: Jumlah Dokumen Teknis yang Disusun	Dokumen			ISK 05		12	18	5	6						
RO	002	Kajian inovasi potensi tampungan air	Dokumen			SK 01	5					16,000,000					
IRO						ISK 05											
RO	003	Layanan teknis bidang bendungan	Dokumen			SK 03	3					24,832,000					
IRO						ISK 01											
RO	004	Fasilitasi Unit Manajemen atau Pelaksanaan Proyek (PMU/PIU)	Dokumen			SK 01											
IRO		Indikator RO: Jumlah Dokumen Dukungan Proyek yang Disusun	Dokumen			ISK 05											
RO	005	Unit Desain	Dokumen			SK 01		10	10	5	5						
IRO		Indikator RO: Jumlah Dokumen Teknis yang Disusun	Dokumen			ISK 05											

KODE		UNIT/SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KRO/RO/INDIKATOR RO	SATUAN	Baseline	Lokasi	LINK CASCADING	Target					Alokasi (Rp Ribu)					
							2025	2026	2027	2028	2029	2,025	2,026	2,027	2,028	2,029	2025-2029
KRO	RBG	Prasarana Bidang SDA dan Irigasi (Prioritas)	Unit														
RO	004	Bendungan Cibeet	Unit			SK 01	1	1	1	1	1	742,260,320	221,144,600	828,644,840	1,470,620,881	1,813,268,791	
IRO		Indikator RO: 1. Jumlah Bendungan yang Selesai Dibangun	Unit			ISK 01					1						
IRO		Indikator RO: 2. Persentase Reduksi Banjir oleh Bendungan	%			ISK 04					23.16						
IRO		Indikator RO: 3. Kapasitas Tampung Air	Juta m3			ISP 01					97.53						
RO	005	Bendungan Cijurey	Unit			SK 01	1	1	1	1	1	571,506,200	310,000,000	560,371,900	633,249,411	779,892,516	
IRO		Indikator RO: 1. Jumlah Bendungan yang Selesai Dibangun	Unit			ISK 01					1						
IRO		Indikator RO: 2. Persentase Reduksi Banjir oleh Bendungan	%			ISK 04					26.82						
IRO		Indikator RO: 3. Kapasitas Tampung Air	Juta m3			ISP 01					17.07						
RO	006	Bendungan Kedunglanggar	Unit			SK 01	1				1	136,721,364					
IRO		Indikator RO: 1. Jumlah Bendungan yang Selesai Dibangun	Unit			ISK 01											
IRO		Indikator RO: 2. Persentase Reduksi Banjir oleh Bendungan	%			ISK 04											
IRO		Indikator RO: 3. Kapasitas Tampung Air	Juta m3			ISP 01											
RO	007	Bendungan Mbay	Unit			SK 01	1	1				372,889,879	130,475,303				
IRO		Indikator RO: 1. Jumlah Bendungan yang Selesai Dibangun	Unit			ISK 01		1									
IRO		Indikator RO: 2. Persentase Reduksi Banjir oleh Bendungan	%			ISK 04		70.63									
IRO		Indikator RO: 3. Kapasitas Tampung Air	Juta m3			ISP 01		52.89									
RO	009	Bendungan Jenelata	Unit			SK 01	1	1	1	1		727,663,670	1,070,193,465	970,059,088	221,206,837		
IRO		Indikator RO: 1. Jumlah Bendungan yang Selesai Dibangun	Unit			ISK 01				1							
IRO		Indikator RO: 2. Persentase Reduksi Banjir oleh Bendungan	%			ISK 04				67.88							
IRO		Indikator RO: 3. Kapasitas Tampung Air	Juta m3			ISP 01				285							
RO	013	Bangunan Pengarah Bendungan Rukoh	Unit			SK 01	1	1	1			216,455,423	155,194,810	262,994,879			
IRO		Indikator RO: 1. Jumlah Bendungan yang Selesai Dibangun	Unit			ISK 01											
IRO		Indikator RO: 2. Persentase Reduksi Banjir oleh Bendungan	%			ISK 04											
IRO		Indikator RO: 3. Kapasitas Tampung Air	Juta m3			ISP 01											
RO	015	Bendungan Tiga Dihaji	Unit			SK 01	1	1	1	1	1	1,969,354,773	459,598,000	594,650,424	419,991,401	673,400,181	
IRO		Indikator RO: 1. Jumlah Bendungan yang Selesai Dibangun	Unit			ISK 01					1						
IRO		Indikator RO: 2. Persentase Reduksi Banjir oleh Bendungan	%			ISK 04					43.86						
IRO		Indikator RO: 3. Kapasitas Tampung Air	Juta m3			ISP 01					104.84						
RO	028	Bendungan Jragung	Unit			SK 01	1					399,286,766					
IRO		Indikator RO: 1. Jumlah Bendungan yang Selesai Dibangun	Unit			ISK 01	1										
IRO		Indikator RO: 2. Persentase Reduksi Banjir oleh Bendungan	%			ISK 04	58.69										
IRO		Indikator RO: 3. Kapasitas Tampung Air	Juta m3			ISP 01	90										
RO	029	Bendungan Bener	Unit			SK 01	1	1	1	1	1	1,281,486,176	560,223,831	618,595,451	633,189,359	308,993,242	
IRO		Indikator RO: 1. Jumlah Bendungan yang Selesai Dibangun	Unit			ISK 01					1.00						
IRO		Indikator RO: 2. Persentase Reduksi Banjir oleh Bendungan	%			ISK 04					69.52						
IRO		Indikator RO: 3. Kapasitas Tampung Air	Juta m3			ISP 01					90.39						
RO	035	Bendungan Bagong	Unit			SK 01	1	1	1	1		679,617,709	104,991,424	180,490,375	157,826,290		
IRO		Indikator RO: 1. Jumlah Bendungan yang Selesai Dibangun	Unit			ISK 01				1.00							
IRO		Indikator RO: 2. Persentase Reduksi Banjir oleh Bendungan	%			ISK 04				15.02							
IRO		Indikator RO: 3. Kapasitas Tampung Air	Juta m3			ISP 01				17.40							
RO	045	Bendungan Manikin	Unit			SK 01	1	1	1	1		915,330,129	102,658,894	148,687,845	137,050,355		
IRO		Indikator RO: 1. Jumlah Bendungan yang Selesai Dibangun	Unit			ISK 01				1.00							
IRO		Indikator RO: 2. Persentase Reduksi Banjir oleh Bendungan	%			ISK 04				41.76							
IRO		Indikator RO: 3. Kapasitas Tampung Air	Juta m3			ISP 01				28.20							
RO	050	Bendungan Bulango Ulu	Unit			SK 01	1	1				119,700,000	410,215,586				
IRO		Indikator RO: 1. Jumlah Bendungan yang Selesai Dibangun	Unit			ISK 01		1									
IRO		Indikator RO: 2. Persentase Reduksi Banjir oleh Bendungan	%			ISK 04		43.29									
IRO		Indikator RO: 3. Kapasitas Tampung Air	Juta m3			ISP 01		84.10									
RO	051	Bendungan Budong-Budong	Unit			SK 01	1	1	1			447,633,929	100,951,980	94,215,739			
IRO		Indikator RO: 1. Jumlah Bendungan yang Selesai Dibangun	Unit			ISK 01			1.00								
IRO		Indikator RO: 2. Persentase Reduksi Banjir oleh Bendungan	%			ISK 04			90.49								
IRO		Indikator RO: 3. Kapasitas Tampung Air	Juta m3			ISP 01			65.18								
RO	056	Bendungan Way Apu	Unit			SK 01	1	1				532,682,689	458,428,252				
IRO		Indikator RO: 1. Jumlah Bendungan yang Selesai Dibangun	Unit			ISK 01		1.00									
IRO		Indikator RO: 2. Persentase Reduksi Banjir oleh Bendungan	%			ISK 04		62.37									
IRO		Indikator RO: 3. Kapasitas Tampung Air	Juta m3			ISP 01		50.05									
RO	068	Bendungan Cabean	Unit			SK 01	1	1.00	1.00			199,017,288	118,209,015	177,029,354			
IRO		Indikator RO: 1. Jumlah Bendungan yang Selesai Dibangun	Unit			ISK 01			1.00								
IRO		Indikator RO: 2. Persentase Reduksi Banjir oleh Bendungan	%			ISK 04			16.27								
IRO		Indikator RO: 3. Kapasitas Tampung Air	Juta m3			ISP 01			3.02								
RO	077	Bendungan Karangnongko	Unit			SK 01	0	1	1	1		492,503,300	112,000,000	287,229,052	137,496,700		
IRO		Indikator RO: 1. Jumlah Bendungan yang Selesai Dibangun	Unit			ISK 01				1							
IRO		Indikator RO: 2. Persentase Reduksi Banjir oleh Bendungan	%			ISK 04				6.3							
IRO		Indikator RO: 3. Kapasitas Tampung Air	Juta m3			ISP 01				65.3							
RO	501	Bendungan Karian	Unit			SK 01	0					11,416,214					
IRO		Indikator RO: 1. Jumlah Bendungan yang Selesai Dibangun	Unit			ISK 01											
IRO		Indikator RO: 2. Persentase Reduksi Banjir oleh Bendungan	%			ISK 04											
IRO		Indikator RO: 3. Kapasitas Tampung Air	Juta m3			ISP 01											
RO	502	Bendungan Pelosika	Unit			SK 01	1	1	1	1	1	100,000	1,371,422,320	1,812,729,760	1,812,729,760	2,653,324,692	
IRO		Indikator RO: 1. Jumlah Bendungan yang Selesai Dibangun	Unit			ISK 01					1						
IRO		Indikator RO: 2. Persentase Reduksi Banjir oleh Bendungan	%			ISK 04					49.37						
IRO		Indikator RO: 3. Kapasitas Tampung Air	Juta m3			ISP 01					823						
RO	701	Revitalisasi Situ Konservasi di Bayangkara Park Polda Bangka Belitung	Unit			SK 01	1					30,000,000					
IRO		Indikator RO: Jumlah Tampungan Air Alami yang Direvitalisasi	Unit			ISK 03											
KRO	BAH	Pelayanan Publik Lainnya	Layanan														
RO	001	Layanan Teknis Bidang Bendungan	Layanan			SK 03		1	1	1	1		13,132,000	13,132,000	13,132,000	13,132,000	
IRO		Indikator RO: 1. Tingkat Layanan Teknis Balai Teknik Bendungan	%			ISK 01		100	100	100	100						
IRO		Indikator RO: 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Balai Teknik	Indeks			ISK 01		83.5	84	84.5	85						
KRO	EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Dokumen														
RO	952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen			SK 05		1	1	1	1		10,000	10,000	10,000	10,000	
IRO		Indikator RO: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Unit Kerja	Nilai			ISK 01		93.15	93.65	94.15	94.65						
RO	953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen			SK 02		1	1	1	1		7,470,000	7,470,000	7,470,000	7,470,000	

KODE		UNIT/SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KRO/RO/INDIKATOR RO	SATUAN	Baseline	Lokasi	LINK CASCADING	Target					Alokasi (Rp Ribu)					
							2025	2026	2027	2028	2029	2,025	2,026	2,027	2,028	2,029	2025-2029
IRO		Indikator RO: Tingkat Kinerja Layanan Pembinaan Bendungan dan Danau	%			ISK 01		100%	100%	100%	100%						
RO	975	Layanan Manajemen Kinerja	Dokumen			SK 04		1	1	1	1		10,000	10,000	10,000	10,000	
IRO		Indikator RO: Tingkat Pelaksanaan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko Unit	%			ISK 01		76.40%	77.80%	80.20%	81.60%						
RO	961	Layanan Reformasi Kinerja	Dokumen			SK 06		1	1	1	1		35,000	35,000	35,000	35,000	
IRO		Indikator RO: Nilai SAKIP Unit Kerja	Nilai			ISK 01		76.74	76.76	76.78	76.80						
KEGIATAN	7694	Pengembangan Jaringan Air Tanah dan Air Baku										1,491,703,092	9,509,906,538	9,081,128,393	7,176,120,149	5,368,595,207	
SK	01	Meningkatnya pasokan air baku berkelanjutan dan produktivitas penggunaan air baku				SP 01											
ISK	01	Jumlah embung dan tampungan air lainnya yang dibangun	Unit (Kumulatif)			ISP 01	13	62	124	181	226						
ISK	02	Jumlah embung dan tampungan air lainnya yang direhabilitasi	Unit (Kumulatif)			ISP 01	6	33	57	84	107						
ISK	03	Kapasitas prasarana air baku yang dibangun	m3/detik (Kumulatif)			ISP 02	0.37	3.06	7.68	16.20	19.12						
ISK	04	Kapasitas prasarana air baku yang direhabilitasi	m3/detik (Kumulatif)			ISP 02	0.84	3.11	4.26	4.94	5.53						
ISK	05	Rasio kapasitas air baku bersumber dari bendungan terhadap potensinya	%			ISP 02	35%	36%	39%	44%	45%						
ISK	06	Jumlah debit air tanah yang dimanfaatkan untuk lahan multikomoditas yang dibangun	m3/detik (Kumulatif)			ISP 08	0.10	3.42	6.74	10.06	13.38						
ISK	07	Jumlah debit air tanah yang dimanfaatkan untuk lahan multikomoditas yang	m3/detik (Kumulatif)			ISP 08	0.04	6.64	13.24	19.84	26.44						
ISK	08	Jumlah dukungan teknis bidang air tanah dan air baku	Dokumen			ISP 02	39	85	79	69	41						
SK	02	Meningkatnya penyediaan pasokan air di Pesisir Utara Jawa dalam rangka				SP 01											
ISK	01	Kapasitas prasarana air baku yang dibangun di Pesisir Utara Jawa	m3/detik (Kumulatif)			ISP 02	0.70	1.38	8.08	8.71	8.82						
SK	03	Meningkatnya pembinaan layanan air baku dan air tanah dalam rangka peningkatan				SP 01											
ISK	01	Tingkat kinerja layanan pembinaan air tanah dan air baku	%			ISP 02	100%	100%	100%	100%	100%						
SK	04	Meningkatnya pelaksanaan kepatuhan intern				SP 02											
ISK	01	Tingkat pelaksanaan kepatuhan intern dan manajemen risiko Unit Kerja	%			ISP 03	76.00%	76.40%	77.80%	80.20%	81.60%						
SK	05	Meningkatnya nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran				SP 02											
ISK	01	Tingkat indikator kinerja pelaksanaan anggaran Unit Kerja	Nilai			ISP 04	83.35	83.85	84.35	84.85	85.35						
SK	06	Meningkatnya nilai SAKIP				SP 02											
ISK	01	Tingkat implementasi penyelenggaraan SAKIP Unit Kerja	Nilai			ISP 05	70.22	70.24	70.26	70.28	70.30						
KRO	ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	Rekomendasi Kebijakan														
RO	001	Layanan teknis dan pembinaan bidang air tanah dan air baku	Rekomendasi Kebijakan			SK 03	2					7,700,000					
IRO						ISK 01											
RO	002	Pelaksanaan kepatuhan intern dan manajemen risiko serta pembangunan zona	Rekomendasi Kebijakan			SK 04	1					35,000					
IRO						ISK 01											
KRO	CBG	Prasarana Bidang SDA dan Irigasi	Unit														
RO	001	Embung dan Tampungan Air Lainnya pada Kawasan Metropolitan, Kawasan	Unit			SK 01	15	51	57	57	45	147,100,000	975,385,726,000	979,726,927,000	1,010,709,195,000	1,115,897,330,000	
IRO		Indikator RO: 1. Jumlah Embung dan Tampungan Air Lainnya yang Dibangun	Unit			ISK 01		34	42	39	35						
IRO		Indikator RO: 2. Jumlah Embung dan Tampungan Air Lainnya yang Direhabilitasi	Unit			ISK 02		17	15	18	10						
RO	002	Embung dan Tampungan Air Lainnya pada Kawasan Sulit Air, Bencana Kekeringan,	Unit			SK 01	11	3	6	5	4	133,400,000	51,000,000,000	156,000,000,000	120,000,000,000	48,500,000,000	
IRO		Indikator RO: 1. Jumlah Embung dan Tampungan Air Lainnya yang Dibangun	Unit			ISK 01		3	6	5	1						
IRO		Indikator RO: 2. Jumlah Embung dan Tampungan Air Lainnya yang Direhabilitasi	Unit			ISK 02		0	0	0	3						
RO	003	Rehabilitasi/peningkatan embung dan tampungan air lainnya pada kawasan	Unit			SK 01	3					31,000,000					
IRO						ISK 02											
RO	004	Rehabilitasi/peningkatan embung dan tampungan air lainnya pada kawasan sulit air,	Unit			SK 01	2					6,200,000					
IRO						ISK 02											
RO	005	Sumur Air Tanah pada Kawasan Metropolitan, Kawasan Perkotaan, dan Kawasan	Unit			SK 01	55	343	320	258	241	85,500,000	382,667,023,000	309,559,180,000	256,416,000,000	251,151,000,000	
IRO		Indikator RO: 1. Jumlah Kapasitas Prasarana Air Baku yang Dibangun	m3/detik			ISK 03		0.27	0.26	0.19	0.33						
IRO		Indikator RO: 2. Jumlah Kapasitas Prasarana Air Baku yang Direhabilitasi	m3/detik			ISK 04		0.33	0.31	0.3	0.24						
RO	006	Sumur Air Tanah pada Kawasan Sulit Air, Bencana Kekeringan, dan Terpencil (3T)	Unit			SK 01	23	126	138	123	116	36,750,000	108,780,000,000	112,910,000,000	114,290,000,000	97,370,000,000	533,050,000,000
IRO		Indikator RO: 1. Jumlah Kapasitas Prasarana Air Baku yang Dibangun	m3/detik			ISK 03		0.13	0.15	0.12	0.13						
IRO		Indikator RO: 2. Jumlah Kapasitas Prasarana Air Baku yang Direhabilitasi	m3/detik			ISK 04		0.01	0	0	0						
RO	007	Rehabilitasi/peningkatan sumur air tanah pada kawasan metropolitan kawasan	Unit			SK 01	6					4,750,000					
IRO						ISK 04											
RO	008	Rehabilitasi/peningkatan sumur air tanah pada kawasan sulit air, bencana kekeringan	Unit			SK 01	22					10,250,000					
IRO						ISK 04											
KRO	CBR	Dukungan Teknis	Dokumen														
RO	001	Dukungan Teknis Bidang Air Tanah dan Air Baku	Dokumen			SK 01	74	85	79	69	41	48,125,392	139,390,000,000	169,775,000,000	147,315,000,000	93,190,000,000	
IRO		Indikator RO: Jumlah Dokumen Dukungan Proyek yang Disusun	Dokumen			ISK 08		85	79	69	41						
RO	002	Kajian potensi infrastruktur penyediaan air baku di wilayah sungai	Dokumen				6					8,450,000					
IRO																	
RO	003	Fasilitasi Unit Manajemen atau Pelaksanaan Proyek (PMU/PIU)	Dokumen			SK 01		5	5	5	5						
IRO		Indikator RO: Jumlah Dokumen Dukungan Proyek yang Disusun	Dokumen			ISK 08		5	5	5	5						
RO	004	Unit Desain	Dokumen			SK 01		10	10	10	10						
IRO		Indikator RO: Jumlah Dokumen Teknis yang Disusun	Dokumen			ISK 08		10	10	10	10						
KRO	CBS	Prasarana Jaringan Sumber Daya Air	km														
RO	001	Prasarana Air Baku Kawasan Metropolitan, Kawasan Perkotaan, dan Kawasan	km			SK 01	42	198.33	311.87	240.3	99.14	170,406,189	1,494,797,436,000	2,661,457,588,000	1,527,924,063,000	1,128,800,000,000	7,156,600,668,000
IRO		Indikator RO: 1. Jumlah Kapasitas Prasarana Air Baku yang Dibangun	m3/detik			ISK 03		1.48	0.77	1.93	0.8						
IRO		Indikator RO: 2. Jumlah Kapasitas Prasarana Air Baku yang Direhabilitasi	m3/detik			ISK 04		1.87	0.76	0.36	0.26						
RO	002	Prasarana Air Baku Kawasan Sulit Air, Bencana Kekeringan, dan Kawasan Terpencil	km			SK 01	2	56.46	27	1	7	39,000,000					
IRO		Indikator RO: 1. Jumlah Kapasitas Prasarana Air Baku yang Dibangun	m3/detik			ISK 03		0.03	0.26	0	0.1						
IRO		Indikator RO: 2. Jumlah Kapasitas Prasarana Air Baku yang Direhabilitasi	m3/detik			ISK 04		0.05	0.05	0	0.07						
RO	003	Rehabilitasi/peningkatan prasarana air baku kawasan metropolitan, kawasan	Km			SK 01	13					138,500,000					
IRO						ISK 04											
RO	004	Rehabilitasi/peningkatan prasarana air baku kawasan sulit air, bencana kekeringan	Km			SK 01	3					35,750,000					
IRO						ISK 04											
RO	005	JIAT untuk Mendukung Swasembada Pangan	Km			SK 01	1	785.72	612.21	612.21	612.21	1,500,000	1,233,860,600,000	918,553,300,000	918,553,300,000	918,553,300,000	3,998,520,500,000
IRO		Indikator RO: 1. Jumlah Kapasitas Prasarana Air Baku yang Dibangun	m3/detik			ISK 06	0.05	3.16	2.23	2.23	2.23						
IRO		Indikator RO: 2. Jumlah Kapasitas Prasarana Air Baku yang Direhabilitasi	m3/detik			ISK 07	0.02	6.2	4.57	4.57	4.57						
RO	006	JIAT untuk Mendukung Kawasan Sentra Produksi Pangan	Km			SK 01		63.84					97,158,000,000				
IRO		Indikator RO: 1. Jumlah Kapasitas Prasarana Air Baku yang Dibangun	m3/detik			ISK 06		0.16	0	0	0						
IRO		Indikator RO: 2. Jumlah Kapasitas Prasarana Air Baku yang Direhabilitasi	m3/detik			ISK 07		0.4	0	0	0						
RO	007	Rehabilitasi/peningkatan JIAT Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Lokal	Km			SK 01	6					10,250,000					
IRO						ISK 07											
KRO	RBG	Prasarana Bidang SDA dan Irigasi (Prioritas)	Unit														
RO	001	Embung dan Tampungan Air Lainnya pada Kawasan IKN	Unit			SK 01	8	1	3	3	0	55,000,000	144,000,000,000	150,000,000,000	100,000,000,000		
IRO		Indikator RO: 1. Jumlah Embung dan Tampungan Air Lainnya yang Dibangun	Unit			ISK 01		1	3	3							
IRO		Indikator RO: 2. Jumlah Embung dan Tampungan Air Lainnya yang Direhabilitasi	Unit			ISK 02		0	0	0	0						

KODE		UNIT/SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KRO/RO/INDIKATOR RO	SATUAN	Baseline	Lokasi	LINK CASCADING	Target					Alokasi (Rp Ribu)					
							2025	2026	2027	2028	2029	2,025	2,026	2,027	2,028	2,029	2025-2029
RO	501	Prasarana Penyediaan Air Baku Kawasan Pedesaan dan Pulau-Pulau Kecil	Unit					74	80	78	89		240,850,000,000	530,041,764,900	375,374,957,900	507,633,277,200	
IRO		Indikator RO: 1. Jumlah Embung dan Tampungan Air Lainnya yang Dibangun	Unit			ISK 01		11	11	10	9						
IRO		Indikator RO: 2. Jumlah Embung dan Tampungan Air Lainnya yang Direhabilitasi	Unit			ISK 02		10	9	9	10						
IRO		Indikator RO: 1. Jumlah Kapasitas Prasarana Air Baku yang Dibangun	m3/detik			ISK 03		0.07	0.06	0.05	0.04						
IRO		Indikator RO: 2. Jumlah Kapasitas Prasarana Air Baku yang Direhabilitasi	m3/detik			ISK 04		0.02	0.02	0.02	0.02						
KRO	RBS	Prasarana Jaringan Sumber Daya Air (Prioritas)	Km														
RO	001	Prasarana Penyediaan Air Baku Bersumber dari Bendungan	Km			SK 01		66.39	73.4	60.43	60.6		368,506,800,000	918,119,000,000	940,700,000,000	506,300,000,000	
IRO		Indikator RO: 1. Jumlah Kapasitas Prasarana Air Baku yang Dibangun	m3/detik			ISK 03		0.49	1.36	2.02	1.52						
IRO		Indikator RO: 2. Jumlah Kapasitas Prasarana Air Baku Waduk yang Dibangun	m3/detik			ISK 05	35%	36%	39%	44%	45%						
RO	002	Prasarana Air Baku IKN	Km			SK 01		2	2	6.5	0		30,000,000,000	100,000,000,000	100,000,000,000		
IRO		Indikator RO: 1. Jumlah Kapasitas Prasarana Air Baku yang Dibangun	m3/detik			ISK 03		0	0	0.2	0						
IRO		Indikator RO: 2. Jumlah Kapasitas Prasarana Air Baku yang Direhabilitasi	m3/detik			ISK 04											
RO	003	Prasarana Air Baku di Kawasan Sentra Produksi Pangan	Km			SK 01		22	10	0	0		25,000,000,000	15,000,000,000			
IRO		Indikator RO: 1. Jumlah Kapasitas Prasarana Air Baku yang Dibangun	m3/detik			ISK 06		0.04	0.02	0	0						
IRO		Indikator RO: 2. Jumlah Kapasitas Prasarana Air Baku yang Direhabilitasi	m3/detik			ISK 07		0	0	0	0						
RO	004	Prasarana Penyediaan Air Baku di Perkotaan Pesisir Utara Jawa	Km			SK 02		6.19	6.36	4	3		229,500,000,000	191,000,000,000	140,703,000,000	44,000,000,000	
IRO		Indikator RO: Jumlah Kapasitas Prasarana Air Baku yang Dibangun di Pesisir Utara	m3/detik			ISK 01		0.68	0.15	0.61	0.11						
RO	005	Prasarana Air Baku Kawasan Metropolitan, Kawasan Perkotaan, dan Kawasan	Km			SK 01		16.5					42,600,000,000				
IRO		Indikator RO: 1. Jumlah Kapasitas Prasarana Air Baku yang Dibangun	m3/detik			ISK 03		0.05									
IRO		Indikator RO: 2. Jumlah Kapasitas Prasarana Air Baku yang Direhabilitasi	m3/detik			ISK 04											
RO	501	Prasarana Air Baku Karian Serpong (KSCS)	Km			SK 02	5	33.35	22			366,286,511	2,266,607,471,333	695,833,333,333	453,333,333,333		
IRO		Indikator RO: Jumlah Kapasitas Prasarana Air Baku yang Dibangun di Pesisir Utara	m3/detik			ISK 01		0	6.55	0	0						
RO	502	Prasarana Air Tanah untuk Keberlanjutan dan Ketahanan Pangan (GRASS)	Km			SK 01			237.35	237.35	237.35			412,465,300,000	412,465,300,000	412,465,300,000	
IRO		Indikator RO: 1. Jumlah Kapasitas Prasarana Air Baku yang Dibangun	m3/detik			ISK 03			1.09	1.09	1.09						
IRO		Indikator RO: 2. Jumlah Kapasitas Prasarana Air Baku yang Direhabilitasi	m3/detik			ISK 04			2.03	2.03	2.03						
RO	503	Prasarana Penyediaan Air Baku mendukung SPAM	Km			SK 01		13.23	10.4	10.96	1.4		430,780,000,000	584,952,000,000	537,161,000,000	170,000,000,000	
IRO		Indikator RO: Jumlah Kapasitas Prasarana Air Baku yang Dibangun	m3/detik			ISK 03		0	1.75	4	0						
RO	504	Prasarana Penyediaan Air Baku Kawasan Pedesaan dan Pulau-Pulau Kecil	Km			SK 01		0	0	0	0		100,000,000,000				
IRO		Indikator RO: 1. Jumlah Kapasitas Prasarana Air Baku yang Dibangun	m3/detik			ISK 03		0.13	0	0	0						
IRO		Indikator RO: 2. Jumlah Kapasitas Prasarana Air Baku yang Direhabilitasi	m3/detik			ISK 04											
RO	701	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku Karian Serpong	Km			SK 02	1	0	0	0	0	54,250,000					
IRO		Indikator RO: Jumlah Kapasitas Prasarana Air Baku yang Dibangun di Pesisir Utara	m3/detik			ISK 01	0	0	0	0	0						
RO	703	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku Lobener Kabupaten Indramayu	Km			SK 02	7					56,000,000					
IRO		Indikator RO: Jumlah Kapasitas Prasarana Air Baku yang Dibangun di Pesisir Utara	m3/detik			ISK 01	0.2										
RO	705	Pembangunan prasarana air baku Kotawaringin Barat	Km			SK 01	16.5	0	0	0	0	45,500,000					
IRO		Indikator RO: Jumlah Kapasitas Prasarana Air Baku yang Dibangun	m3/detik			ISK 03	0.05	0	0	0	0						
KRO	EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Dokumen														
RO	952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen			SK 05		1	1	1	1						
IRO		Indikator RO: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Unit Kerja	Nilai			ISK 01		83.85	84.35	84.85	85.35						
RO	953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen			SK 03		1	1	1	1						
IRO		Indikator RO: Tingkat Kinerja Layanan Pembinaan Air Tanah dan Air Baku	%			ISK 01		100%	100%	100%	100%						
RO	975	Layanan Manajemen Kinerja	Dokumen			SK 04		1	1	1	1						
IRO		Indikator RO: Tingkat Pelaksanaan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko Unit	%			ISK 01		76.40%	77.80%	80.20%	81.60%						
RO	961	Layanan Reformasi Kinerja	Dokumen			SK 06		1	1	1	1						
IRO		Indikator RO: Nilai SAKIP Unit Kerja	Nilai			ISK 01		70.24	70.26	70.28	70.30						
KEGIATAN	7695	Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat										7,925,045,389	12,517,822,321	13,257,450,146	13,919,137,672	14,659,819,156	
SK	01	Terjaganya layanan infrastruktur sda dalam rangka meningkatkan dan menjaga				SP 01											
ISK	01	Jumlah kumulatif tampungan air yang dikelola	Unit (Kumulatif)			ISP 07	1,563	3,814	3,886	4,022	4,218						
ISK	02	Jumlah unit pengelola yang dibentuk/dioperasikan	Unit (Kumulatif)			ISP 07	109	109	109	109	109						
ISK	03	Jumlah sempadan yang ditetapkan	Unit			ISP 07	86	75	-	-	-						
ISK	04	Jumlah kapasitas prasarana air baku yang dikelola	m3/detik (Kumulatif)			ISP 07	78.78	82.53	86.29	90.04	93.79						
ISK	05	Luas layanan irigasi yang dikelola	Ha (Kumulatif)			ISP 07	3,142,532	3,152,532	3,171,532	3,199,532	3,229,532						
ISK	06	Jumlah tenaga kerja yang berpartisipasi dalam padat karya	Orang Kerja			ISP 07	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000						
ISK	07	Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi	Miliar m3			ISP 05	55.40	52.64	50.01	47.50	45.13						
ISK	08	Jumlah infrastruktur pengendali daya rusak air yang dikelola	Unit (Kumulatif)			ISP 07	549	553	593	645	697						
ISK	09	Panjang jaringan infrastruktur pengendali daya rusak air yang dioperasi dan	Km (Kumulatif)			ISP 07	1,783.88	1,826.91	1,935.27	2,075.35	2,192.31						
ISK	10	Jumlah sungai yang dipelihara	Sungai			ISP 07	925	925	925	925	925						
ISK	11	Jumlah layanan penanganan darurat akibat bencana	Jumlah Layanan			ISP 07	38	38	38	38	38						
SK	02	Meningkatnya pembinaan, layanan perizinan, dan tata kelola operasi dan				SP 02											
ISK	01	Tingkat kinerja layanan pembinaan operasi dan pemeliharaan	%			ISP 01	100%	100%	100%	100%	100%						
ISK	02	Tingkat kinerja layanan pembinaan tata kelola operasi dan pemeliharaan	%			ISP 01	56.95%	61.07%	67.83%	75.64%	82.45%						
ISK	03	Jumlah usulan perizinan yang diproses	Dokumen			ISP 01	100	100	100	100	100						
ISK	04	Jumlah fasilitasi penanganan tanggap darurat bencana	Kegiatan			ISP 01	1	1	1	1	1						
SK	03	Meningkatnya tata kelola operasi dan pemeliharaan				SP 02											
ISK	01	Jumlah rekomendasi teknis yang disusun	Rekomendasi			ISP 01	38	38	38	38	38						
ISK	02	Jumlah dokumen perhitungan indeks *river basin organization performance*	Dokumen			ISP 01	38	38	38	38	38						
ISK	03	Jumlah kelompok masyarakat dengan penguatan kelembagaan yang difasilitasi	Kelompok Masyarakat			ISP 01	1,107	1,156	1,205	1,254	1,303						
ISK	04	Jumlah wadah koordinasi pengelolaan sda wilayah sungai kewenangan pusat yang	Wadah koordinasi			ISP 01	64	64	64	64	64						
ISK	05	Jumlah dokumen alokasi air yang disusun	Dokumen			ISP 01	64	64	64	64	64						
SK	04	Meningkatnya pelaksanaan kepatuhan intern				SP 02											
ISK	01	Tingkat pelaksanaan kepatuhan intern dan manajemen risiko Unit Kerja	%			ISP 03	76.00%	76.40%	77.80%	80.20%	81.60%						
SK	05	Meningkatnya nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran				SP 02											
ISK	01	Tingkat indikator kinerja pelaksanaan anggaran Unit Kerja	Nilai			ISP 04	84.41	84.91	85.41	85.91	86.41						
SK	06	Meningkatnya nilai SAKIP				SP 02											
ISK	01	Tingkat implementasi penyelenggaraan SAKIP Unit Kerja	Nilai			ISP 05	76.32	76.34	76.36	76.38	76.40						
KRO	ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	Rekomendasi Kebijakan														
RO	001	Layanan teknis dan pembinaan bidang operasi dan pemeliharaan	Rekomendasi Kebijakan			SK 02	20					100,324,111					
IRO						ISK 01											
RO	002	Kelembagaan bidang irigasi	Rekomendasi Kebijakan			SK 03	25					12,213,498					
IRO						ISK 04											
RO	003	Program padat karya irigasi	Rekomendasi Kebijakan			SK 01	13					9,883,855					
IRO						ISK 06											
RO	004	Jumlah usulan perizinan yang diproses	Rekomendasi Kebijakan			SK 02	10					3,702,242					

KODE		UNIT/SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KRO/RO/INDIKATOR RO	SATUAN	Baseline	Lokasi	LINK CASCADING	Target					Alokasi (Rp Ribu)					
							2025	2026	2027	2028	2029	2,025	2,026	2,027	2,028	2,029	2025-2029
IRO						ISK 03											
RO	005	Kepatuhan intern dan manajemen risiko serta pembangunan zona integritas	Rekomendasi Kebijakan			SK 04	4					213,265					
IRO						ISK 01											
RO	006	Flood Management in North Java Project	Kajian			SK 02	1					561,000					
IRO						ISK 01											
RO	007	National Urban Flood Resilience Project (NUFReP)	Kajian			SK 02	1					24,890,223					
IRO						ISK 01											
KRO	AEA	Koordinasi															
RO	001	Koordinasi TKPSDA WS Kewenangan Pusat dan Lembaga Lainnya	Kegiatan			SK 03	106	64.00	64.00	64.00	64.00	113,093,765	123610360	132386695.6	139006030.3	147244181.8	
IRO		Indikator RO: Jumlah Wadah Koordinasi Pengelolaan SDA Wilayah Sungai	Wadah Koordinasi			ISK 04		64.00	64.00	64.00	64.00						
RO	002	Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA)	Kegiatan			-	25					7,117,536					
IRO																	
KRO	BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat															
RO	001	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat Peduli Sungai	Kelompok Masyarakat			SK 03	310	1038	1121	1159	1197	22,483,323	23239187.27	24889169.57	26133628.05	27682429.83	
IRO		Indikator RO: Jumlah Kelompok Masyarakat dengan Penguatan Kelembagaan	Kelompok Masyarakat			ISK 03		1038	1121	1159	1197						
RO	002	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat Peduli Tampungan Air	Kelompok Masyarakat			SK 03	3	73	84	95	106	438,000	3000000	3213000	3373650	3573588.375	
IRO		Indikator RO: Jumlah Kelompok Masyarakat dengan Penguatan Kelembagaan	Kelompok Masyarakat			ISK 03		73	84	95	106						
RO	003	Fasilitasi Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA)	Kelompok Masyarakat			SK 03	50	38	38	38	38	10,801,839	12000000	12852000	13494600	14294353.5	
IRO		Indikator RO: Jumlah Kelompok Masyarakat dengan Penguatan Kelembagaan	Kelompok Masyarakat			ISK 03		38	38	38	38						
KRO	BHC	Operasi Bidang Penanggulangan Bencana															
RO	001	Operasi Tanggap Darurat Bencana	Operasi			SK 02	22	1	1	1	1	319,225,509	500000000	535500000	562275000	595598062.5	
IRO		Indikator RO: Jumlah Fasilitasi Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Kegiatan			ISK 04		1	1	1	1						
RO	002	Operasi Monitoring Bencana	Operasi			SK 01	56	77	77	77	77	85,362,631	23740812.1	25426409.76	26697730.25	28279963.38	
IRO		Indikator RO: Jumlah Operasi Monitoring Bencana	Kegiatan			ISK 11		77	77	77	77						
RO	003	Operasi Penyediaan Bahan Persediaan Bencana	Operasi			SK 01	1	1	1	1	1	50,000,000	50000000	53550000	56227500	59559806.25	
IRO		Indikator RO: Jumlah Fasilitasi Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Kegiatan			ISK 11		1	1	1	1						
RO	004	Operasi Modifikasi Cuaca	Operasi			SK 01		1	1	1	1		70000000	74970000	78718500	83383728.75	
IRO		Indikator RO: Jumlah Fasilitasi Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Kegiatan			ISK 11		1	1	1	1						
RO	005	Operasi Tanggap Darurat Bencana UPT	Operasi			SK 01	40	38	38	38	38	47,406,673	198000000	212058000	222660900	235856832.8	
IRO		Indikator RO: Jumlah Layanan Penanggulangan Darurat Akibat Bencana	Kegiatan			ISK 11		38	38	38	38						
KRO	BHD	Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam															
RO	001	Operasi Unit Pengelola Infrastruktur Sumber Daya Air	Operasi			SK 01	65	109	109	109	109	37,187,234	169727852	181778529.5	190867456	202179159.6	
IRO		Indikator RO: Jumlah Unit Pengelola Bendungan (UPB) yang Dibentuk/Dioperasikan	Unit			ISK 02		68	68	68	68						
IRO		Indikator RO: Jumlah Unit Pengelola Irigasi (UPI) yang Dibentuk/Dioperasikan	Unit			ISK 02		41	41	41	41						
RO	002	Unit pengelola irigasi	Operasi			SK 01	40					22,469,124					
IRO						ISK 02											
RO	003	Operasi Pemantauan Reduksi Banjir dari Waduk	Operasi			SK 01	11					5,003,363					
IRO						ISK 02											
KRO	CAP	Sarana Bidang Penanggulangan Bencana	Unit														
RO	001	Alat Berat Operasi dan Pemeliharaan Bidang Sumber Daya Air	Unit			SK 02	25	1	1	1	1	50,000,000	80000000	85680000	89964000	95295690	
IRO		Indikator RO: Jumlah Fasilitasi Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Kegiatan			ISK 4		1	1	1	1						
KRO	CBR	Dukungan Teknis	Dokumen														
RO	001	Dokumen Rekomendasi Teknis Perizinan	Dokumen			SK 03	29	38	38	38	38	19,491,420	10300000	11031300	11582865	12269320.09	
IRO		Indikator RO: Jumlah Rekomendasi Teknis yang Disusun	Unit			ISK 01		38	38	38	38						
RO	002	Dokumen RBO Benchmarking	Dokumen			SK 03	25	38	38	38	38	5,770,382	8350030	8942882.13	9390026.237	9946523.38	
IRO		Indikator RO: Indeks River Basin Organization Performance Benchmarking	Nilai indeks			ISK 02		3.45	3.50	3.55	3.60						
RO	003	Dokumen Alokasi air	Dokumen			SK 03	31	64	64	64	64	24,447,776	65000000	69615000	73095750	77427748.13	
IRO		Indikator RO: Jumlah Dokumen Alokasi Air yang Disusun	Dokumen			ISK 05		64	64	64	64						
RO	004	Dokumen Perhitungan Pasokan Air untuk Irigasi	Dokumen			SK 01	1	38	38	38	38	300,000	9900000	10890000	11880000	13200000	
IRO		Indikator RO: Volume Layanan Air untuk Meningkatkan Produktivitas Irigasi	Milyar m3			ISK 07		52.63	50.00	47.50	45.13						
RO	005	Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Dokumen			-	33					6,880,680					
IRO																	
RO	006	Dokumen Teknis Bidang OP	Dokumen			SK 01		22	22	22	22		69715350.25	68552201.76	250000	223043	
IRO		Indikator RO: Jumlah Dokumen Teknis yang Disusun	Dokumen			ISK 08		22	22	22	22						
KRO	CCM	OP Sarana Bidang Penanggulangan Bencana	Unit														
RO	001	Layanan Operasi dan Pemeliharaan Sarana Alat Berat	Unit			SK 01	843	2,166	2,166	2,166	2,166	213,115,127	225653837	241675259.4	253759022.4	268797976.2	
IRO		Indikator RO: Jumlah Alat Berat yang Dioperasi dan Dipelihara	Unit			ISK 11		2,166	2,166	2,166	2,166						
KRO	CDG	OP Prasarana Bidang SDA dan Irigasi	Unit														
RO	001	Layanan Operasi dan Pemeliharaan Bendungan	Unit			SK 01	186	223	234	242	248	332,349,137	622510978.3	666709257.7	710731954.2	758513579.1	
IRO		Indikator RO: Jumlah Kumulatif Tampungan Air yang Dikelola	Unit			ISK 01		223	234	242	248						
RO	002	Layanan Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Mata Air	Unit			SK 01	1,139	2,986	3,047	3,175	3,365	280,029,732	705389943.7	755472629.7	793246261.2	840257767.6	
IRO		Indikator RO: Jumlah Kumulatif Tampungan Air yang Dikelola	Unit			ISK 01		2,986	3,047	3,175	3,365						
RO	003	Kualitas air di danau dan/atau waduk	Unit			-											
IRO																	
RO	004	Layanan Pemeliharaan Danau	Unit			SK 01	74	225	225	225	225	103,237,566	721717156.2	772959074.3	811607028	859706679.8	
IRO		Indikator RO: Jumlah Kumulatif Tampungan Air yang Dikelola	Unit			ISK 01		225	225	225	225						
RO	005	Layanan Pemeliharaan Situ	Unit			SK 01	246	380	380	380	380	106,353,363	119823763.8	128331251.1	134747813.6	142733603.1	
IRO		Indikator RO: Jumlah Kumulatif Tampungan Air yang Dikelola	Unit			ISK 01		380	380	380	380						
RO	006	Layanan Pemeliharaan Sungai	Unit			SK 01	889	925	925	925	925	528,764,063	1439796220	1542021751	1619122839	1715079678	
IRO		Indikator RO: Jumlah Sungai yang Dikelola	Unit			ISK 10		925	925	925	925						
RO	008	Layanan Penetapan Sempadan	Unit			SK 01	86	13	1	1	1	25,534,626	16041831.29	17180801.31	18230104.96	19310506.77	
IRO		Indikator RO: Jumlah Sempadan Sungai yang Ditetapkan	Sungai			ISK 03	7	2	1	1	1						
IRO		Indikator RO: Jumlah Sempadan Bendungan yang Ditetapkan	Unit			ISK 03		0	0	0	0						
IRO		Indikator RO: Jumlah Sempadan Danau yang Ditetapkan	Unit			ISK 03	9	3	0	0	0						
IRO		Indikator RO: Jumlah Sempadan Situ yang Ditetapkan	Unit			ISK 03	70	70	0	0	0						
IRO		Indikator RO: Jumlah Sempadan Embung yang Ditetapkan	Unit			ISK 03		3	0	0	0						
RO	010	Layanan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Air Baku	Unit			SK 01	514	536	589	678	715	124,739,738	219392882.8	234969777.5	246718266.3	261339951.8	
IRO		Indikator RO: Jumlah Kapasitas Prasarana Air Baku yang Dikelola	m3/detik			ISK 04		76.32	78.85	82.59	86.08						
RO	011	Layanan Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Unit			SK 01	369	165	396	666	769	50,424,545	67357969.13	72140384.94	75747404.19	80236551.82	
IRO		Indikator RO: Jumlah Kapasitas Prasarana Air Baku yang Dikelola	m3/detik			ISK 04		6.21	7.44	7.45	7.71						
RO	014	Sempadan situ	Unit			SK 01	3					12,287,450					
IRO						ISK 03											
RO	015	Layanan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana IKN	Unit			SK 01	4	4	0	0	0	12,193,203	1014759.965				

KODE		UNIT/SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KRO/RO/INDIKATOR RO	SATUAN	Baseline	Lokasi	LINK CASCADING	Target					Alokasi (Rp Ribu)					
							2025	2026	2027	2028	2029	2,025	2,026	2,027	2,028	2,029	2025-2029
IRO		Indikator RO: Jumlah Infrastruktur SDA di IKN yang Dikelola	Unit			ISK 01		4	0	0	0						
RO	016	Layanan Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Unit			SK 01	550	1,241	1,244	1,247	1,253	297,086,830	770949644.3	825687069	866971422.5	918352228.8	
IRO		Indikator RO: Jumlah Bendung Irigasi yang Dikelola	Unit			ISK 05		1,241	1,244	1,247	1,253						
RO	017	Layanan Operasi dan Pemeliharaan Sumur JIAT	Unit			SK 01	2331	755	1266	1567	1898	118,873,449	163352380.7	174950399.8	183697919.8	194584722.9	
IRO		Indikator RO: Jumlah Kapasitas Prasarana Air Baku yang Dikelola	m3/detik			ISK 05		104.72	135.25	163.73	200.05						
RO	018	Citarum Harum	Unit			SK 01		1	1	1	1		158520867.1	169775848.7	178283823	188952063.7	
IRO		Indikator RO: Jumlah Sungai yang Dikelola	Unit			ISK 10		1	1	1	1						
KRO	CDH	OP Prasarana Penanggulangan Bencana	Unit														
RO	001	Layanan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengendali Lahar/Sedimen	Unit			SK 01	526	464	474	504	531	56,434,959	103037363.7	110380615.3	115894887.7	122746086.9	
IRO		Indikator RO: Jumlah Infrastruktur Pengendali Daya Rusak Air yang Dikelola	Unit			ISK 08		464	474	504	531						
RO	002	Layanan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengendali Banjir	Unit			SK 01	186	89	119	141	166	130,298,957	100318597.2	107441217.6	112813278.5	119499124.3	
IRO		Indikator RO: Jumlah Infrastruktur Pengendali Daya Rusak Air yang Dikelola	Unit			ISK 08		89	119	141	166						
KRO	CDR	OP Prasarana Jaringan Sumber Daya Air	Km														
RO	001	Layanan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Jaringan Irigasi	Km			SK 01	41,083	45,965.34	46,137.79	46,488.32	46,882.41	4,129,481,951	1854000353	1985634378	2084916097	2208478036	
IRO		Indikator RO: Jumlah Luas Layanan Irigasi yang Dikelola	Ha			ISK 05		3,152,532.00	3,171,532.00	3,199,532.00	3,229,532.00						
RO	002	Layanan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengendali Banjir	Km			SK 01	866.00	595.36	925.36	1,190.36	1,397.74	186,258,017	326634348.6	349825387.3	367316656.7	389085570.3	
IRO		Indikator RO: Jumlah Panjang Infrastruktur Pengendali Daya Rusak Air yang Dikelola	Km			ISK 09		595.36	925.36	1,190.36	1,397.74						
RO	003	Layanan Pemeliharaan Prasarana Pengaman Pantai	Km			SK 01	330	136.90	182.90	218.90	262.67	89,005,820	174005966.3	186360389.9	195678409.4	207275232.8	
IRO		Indikator RO: Jumlah Panjang Infrastruktur Pengendali Daya Rusak Air yang Dikelola	Km			ISK 09		136.90	182.90	218.90	262.67						
RO	005	Citarum Harum	Km			SK 01	297					131,105,359					
IRO						ISK 05											
RO	006	Layanan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Air Baku	Km			SK 01	31	1,827	1,935	2,075	2,192	11,466,193	18380409.36	19685418.43	20669689.35	21894672.41	
IRO		Indikator RO: Jumlah Kapasitas Prasarana Air Baku yang Dikelola	m3/detik			ISK 04											
RO	007	Layanan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana JIAT	Km			SK 01	54	603.85	817.65	1013.27	1236.89	3,279,515	36275055.11	38850584.02	40793113.22	43210705.08	
IRO		Indikator RO: Jumlah Kapasitas Prasarana Air Baku yang Dikelola	m3/detik			ISK 05											
RO	501	Flood Management in North Java Project	Km			SK 01	1					1,108,340					
IRO						ISK 09											
RO	502	National Urban Flood Resilience Project (NUFReP)	Km			SK 01	2					2,350,000					
IRO						ISK 09											
KRO	RDG	OP Prasarana Bidang SDA dan Irigasi (Prioritas)															
RO	001	Prasarana Irigasi Melalui Padat Karya	Unit			SK 01		8,000	8,000	8,000	8,000		2700000000	2891700000	3036285000	3216229538	
IRO		Indikator RO: Jumlah Tenaga Kerja yang Berpartisipasi dalam Padat Karya	Orang Kerja			ISK 06		120,000	120,000	120,000	120,000						
KRO	BAH	Pelayanan Publik Lainnya	Layanan														
RO	001	Layanan Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air	Layanan			SK 02		1	1	1	1		3000000	3213000	3373650	3573588.375	
IRO		Indikator RO: Jumlah Usulan Perizinan yang Diproses	Dokumen			ISK 03		100	100	100	100						
RO	002	Layanan Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA)	Layanan			SK 03		39	39	39	39		7419367	7946142.057	8343449.16	8837921.22	
IRO		Indikator RO: Jumlah Layanan BJPSDA yang Difasilitasi	Layanan			ISK 04		39	39	39	39						
RO	003	Layanan Pemantauan Sumber Daya Air	Layanan			SK 03		39	39	39	39		20000000	20400000	20400000	20580000	
IRO		Indikator RO: Jumlah Layanan Pemantauan yang Difasilitasi	Layanan			ISK 01		39	39	39	39						
KRO	EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Dokumen														
RO	952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen			SK 05		1	1	1	1		50000	53550	56227.5	59559.806	
IRO		Indikator RO: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Unit Kerja	Nilai			ISK 01		84.91	85.41	85.91	86.41						
RO	953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen			SK 02		8	8	8	8		187026572.8	200305459.4	210320732.4	222785328.7	
IRO		Indikator RO: 1. Tingkat Kinerja Layanan Pembinaan Operasi dan Pemeliharaan	%			ISK 01		100	100	100	100						
IRO		Indikator RO: 2. Tingkat Kinerja Layanan Pembinaan Tata Kelola Operasi dan	%			ISK 02		56.95	61.07	67.83	75.64						
RO	975	Layanan Manajemen Kinerja	Dokumen			SK 04		1	1	1	1		50000	53550	56227.5	59559.806	
IRO		Indikator RO: Tingkat Pelaksanaan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko Unit	%			ISK 01		76.40%	77.80%	80.20%	81.60%						
RO	961	Layanan Reformasi Kinerja	Dokumen			SK 06		1	1	1	1		50000	53550	56227.5	59559.806	
IRO		Indikator RO: Nilai SAKIP Unit Kerja	Nilai			ISK 01		76.34	76.36	76.38	76.40						
PROGRAM	WA	Dukungan Manajemen															
SP	01	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya										2,234,850,560	3,810,411,798	3,953,356,565	4,014,617,204	4,078,104,510	18,091,340,637
ISP	01	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya	%				85.18	86.21	87.25	88.18	89.2						
KEGIATAN	7755	Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air										2,234,850,560	3,810,411,798	3,953,356,565	4,014,617,204	4,078,104,510	18,091,340,637
SK	01	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis				SP 01						2,234,850,560	3,810,411,798	3,953,356,565	4,014,617,204	4,078,104,510	18,091,340,637
ISK	01	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja	%			ISP 01	77.64	78.41	79.20	79.97	80.80						
ISK	02	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Unit Pelaksana	%			ISP 01	88.10	88.80	89.50	90.20	91.00						
KRO	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan									2,182,581,249	3,688,939,962	3,825,811,138	3,880,694,507	3,937,485,680	17,515,512,536
RO	956	Layanan BMN	Layanan			SK 01	99	240	240	240	240	43,688,366	63,688,366	66,872,784	70,216,423	73,727,244	318,193,183
IRO		Indikator RO: 1. Tingkat Pengelolaan BMN	%			ISK 01	90.2	90.6	91	91.4	92						
IRO		Indikator RO: 2. Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN	%			ISK 02	90.2	90.6	91	91.4	92						
RO	957	Layanan Hukum	Layanan			SK 01	1	58	58	58	58	150,000	15,800,000	16,590,000	17,419,500	18,290,475	68,249,975
IRO		Indikator RO: 1. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum	%			ISK 01	96.875	96.875	96.875	96.875	96.875						
RO	958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Layanan			SK 01	32	58	58	58	58	17,122,317	17,122,317	17,978,432	18,877,353	19,821,220	90,921,639
IRO		Indikator RO: 1. Tingkat Layanan Komunikasi Publik	%			ISK 01	78.07	79.76	81.43	82.44	83.78						
RO	959	Layanan Protokoler	Layanan			SK 01	1					164,160					164,160
IRO						ISK 01											
RO	960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan			SK 01	165	240	240	240	240	147,684,817	532,281,279	646,890,345	679,234,862	713,196,605	2,719,287,908
IRO		Indikator RO: 1. Nilai SAKIP	Nilai			ISK 01	65	65.45	66	66.45	67						
IRO		Indikator RO: 2. Tingkat Pelaksanaan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko	Nilai			ISK 01	67	68	69	70	71						
RO	962	Layanan Umum	Layanan			SK 01	41	58	58	58	58	13,921,712	14,085,872	14,790,165	15,529,673	16,306,156	74,633,578
IRO		Indikator RO: 1. Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan	%			ISK 01	80	81	82	83	84						
RO	969	Layanan Bantuan Hukum	layanan			SK 01	1					225,000					225,000
IRO						ISK 01											
RO	994	Layanan Perkantoran	Layanan			SK 01	201	39	39	39	39	1,959,624,877	3,045,962,128	3,062,689,412	3,079,416,696	3,096,143,980	14,243,837,093
IRO		Indikator RO: 1. Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan			ISK 01											
KRO	EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Unit									37,246,859	80,974,740	85,023,477	89,274,650	93,738,381	386,258,107
RO	951	Layanan Sarana Internal	Unit			SK 01	105	58	58	58	58	25,023,020	25,023,020	26,274,171	27,587,879	28,967,272	132,875,362
IRO		Indikator RO: 1. Jumlah Sarana Internal	Unit			ISK 01											
RO	971	Layanan Prasarana Internal	Unit			SK 01	4	1	1	1	1	12,223,839	55,951,720	58,749,306	61,686,771	64,771,109	253,382,745
IRO		Indikator RO: 1. Jumlah Prasarana Internal	Unit			ISK 01											
KRO	EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	Layanan									325,356	15,800,000	16,590,000	17,419,500	18,290,475	68,425,331
RO	954	Layanan Manajemen SDM	Layanan			SK 01	1	58	58	58	58	325,356	15,800,000	16,590,000	17,419,500	18,290,475	68,425,331
IRO		Indikator RO: 1. Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	%			ISK 01	86	87	88	89	90						

KODE		UNIT/SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KRO/RO/INDIKATOR RO	SATUAN	Baseline	Lokasi	LINK CASCADING	Target					Alokasi (Rp Ribu)					
							2025	2026	2027	2028	2029	2,025	2,026	2,027	2,028	2,029	2025-2029
IRO		Indikator RO: 2. Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	%			ISK 02	86	87	88	89	90						
KRO	EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Dokumen									14,697,096	24,697,096	25,931,950	27,228,547	28,589,974	121,144,663
RO	955	Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen			SK 01	169	240	240	240	240	13,890,220	24,697,096	25,931,950	27,228,547	28,589,974	120,337,787
IRO		Indikator RO: 1. Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI	%			ISK 01	80	82	84	86	88						
IRO		Indikator RO: 2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Unit Kerja	Nilai			ISK 01	80	81	82	83	84						
RO	953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen			-	3					341,220					341,220
IRO																	
RO	952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen			-	3					465,656					465,656
IRO																	

Nama Kegiatan	2025		Output		Outcome		2026		Output		Outcome		2027		Output		Outcome		2028		Output		Outcome		2029		Output		Outcome	
Penyediaan Air Baku Kepulauan Talaud							30,000,000,000		10	Km	0.0053	m3/dtk																		
Penyediaan Air Baku Kepulauan Talaud								30,000,000,000	10	Km	0.0053	m3/dtk																		
Pekerjaan Jaringan Air Tanah Untuk Air Baku di Desa Hangke dan Desa Bulo							1,700,000,000			Km	0.0005	m3/dtk																		
Pekerjaan Jaringan Air Tanah Untuk Air Baku di Desa Hangke dan Desa Bulo								1,700,000,000	2	Km	0.0005	m3/dtk																		
Pekerjaan Jaringan Air Tanah Untuk Air Baku di Desa Hangke dan Desa Bulo							10,000,000,000		0.587	Km	0.0001	m3/dtk			1.017	Km	0.000124	m3/dtk												
Pembangunan Embung Pulau Kawaluso Kabupaten Kepulauan Sangihe (Pulau Kecil Terluar) Titik 1								10,000,000,000	0.587	Km	0.0001	m3/dtk																		
Pembangunan Embung Pulau Kawaluso Kabupaten Kepulauan Sangihe (Pulau Kecil Terluar) Titik 2 & 3														10,000,000,000	1.017	Km	0.000124	m3/dtk												
ABSAH di Kab. Kep. SITARO							2,000,000,000		1	Km	0.0001	m3/dtk																		
ABSAH di Kab. Kep. SITARO								2,000,000,000	1	Km	0.0001	m3/dtk																		
ABSAH di Kab. Kep. Talaud							2,500,000,000		1	Km	0.0001	m3/dtk																		
ABSAH di Kab. Kep. Talaud								2,500,000,000	1	Km	0.0001	m3/dtk																		
Pembangunan Embung Nunuka							17,294,000,000		1	Km	0.001	m3/dtk																		
Pembangunan Embung Nunuka								17,294,000,000	1	Km	0.001	m3/dtk																		
Pembangunan Embung Bohabak							20,945,000,000		2	Km	0.001	m3/dtk																		
Pembangunan Embung Bohabak								20,945,000,000	2	Km	0.001	m3/dtk																		
Rehabilitasi Prasarana Air Baku di Kabupaten Minahasa Utara																									2,000,000,000			Km		m3/dtk
Rehabilitasi Prasarana Air Baku di Kabupaten Minahasa Utara																										2,000,000,000		Km		m3/dtk
Rehabilitasi Prasarana Air Baku di Kabupaten Minahasa													2,000,000,000		1	Km	1	m3/dtk												
Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Air Baku di Kabupaten Minahasa														2,000,000,000	1	Km	1	m3/dtk												
Pembangunan Intake 20 L/detk Kab. Kep. Talaud							7,000,000,000			Km		m3/dtk																		
Pembangunan Intake 20 L/detk Kab. Kep. Talaud								7,000,000,000	5	Km	20	m3/dtk																		
Pembangunan Intake 15 L/detk Kab. Kep. Talaud							690,000,000			Km		m3/dtk																		
Pembangunan Intake 15 L/detk Kab. Kep. Talaud								690,000,000	0.5	Km	15	m3/dtk																		
Peningkatan Kapasitas Intake Siau Tagulandang Biaro							1,382,788,000			Km		m3/dtk																		
Peningkatan Kapasitas Intake Siau Tagulandang Biaro								1,382,788,000	1	Km	5	m3/dtk																		
Pembangunan Intake Air Baku Malisade Kab. Kep. Sangihe							1,332,628,000		0.97	Km	0.00121	m3/dtk																		
Pembangunan Intake Air Baku Malisade Kab. Kep. Sangihe								1,332,628,000	0.97	Km	0.00121	m3/dtk																		
Pembangunan Intake Air Baku Kayawu Kap. 30 L/detik dan Supervisi Kota Tomohon							14,806,100,000		8	Km	20	m3/dtk																		
Pembangunan Intake Air Baku Kayawu Kap. 30 L/detik dan Supervisi Kota Tomohon								13,806,100,000	8	Km	20	m3/dtk																		
Supervisi Pembangunan Intake Air Baku Kayawu Kap. 30 L/detik dan Supervisi Kota Tomohon								1,000,000,000	1	Dok	1	Dok																		
Pembangunan SPAB Bendungan Kuwil							69,940,000,000		0.5	Km	0	m3/dtk	89,192,000,000		3.4	Km	0	m3/dtk	177,161,000,000		3.714	Km	1.65	m3/dtk						
Pembangunan SPAB Bendungan Kuwil-Kawangkoan Tahap I								66,940,000,000	0.5	Km	0	m3																		
Supervisi Pembangunan SPAB Bendungan Kuwil-Kawangkoan Tahap I								3,000,000,000	1	dok	1	dok																		
Pembangunan SPAB Bendungan Kuwil-Kawangkoan Tahap I (Lanjutan 1)														86,192,000,000	3.4	Km	0	m3												
Supervisi Pembangunan SPAB Bendungan Kuwil-Kawangkoan Tahap I (Lanjutan 1)														3,000,000,000	1	dok	1	dok												
Pembangunan SPAB Bendungan Kuwil-Kawangkoan Tahap I (Lanjutan 2)																			174,161,000,000		3.714	Km	1.65	m3						
Supervisi Pembangunan SPAB Bendungan Kuwil-Kawangkoan Tahap I (Lanjutan 2)																			3,000,000,000		1	dok	1	dok						
Rehabilitasi D.I Kosinggolan Paket 2							20,883,663,000																							
Rehabilitasi D.I Kosinggolan Paket 2								20,883,663,000		km		ha																		
Rehabilitasi D.I. Dataran Kotamobagu (Lanjutan)							11,500,000,000																							
Rehabilitasi D.I. Dataran Kotamobagu (Lanjutan)								11,500,000,000		km		ha																		
Rehabilitasi D.I Sangkub Kanan (Lanjutan)	10,000,000,000		2	Km	347	Ha	25,834,000,000		29.86	Km	1364.86	Ha																		
Rehabilitasi D.I Sangkub Kanan (Lanjutan)		9,000,000,000	2	Km	347	Ha		25,834,000,000	29.86	Km	1364.86	Ha																		
		1,000,000,000	1	Keg	1	Dok		2,702,000,000	1	Keg	1	Dok																		
Rehabilitasi D.I Sangkub Kiri	10,000,000,000		2	Km	496	Ha	35,129,000,000		39.51	Km	1418.05	Ha																		
Rehabilitasi D.I Sangkub Kiri		9,000,000,000	2	Km	496	Ha		35,129,000,000	39.51	Km	1418.05	Ha																		
Supervisi Rehabilitasi D.I Sangkub Kiri		1,000,000,000	1	Keg	1	Dok		2,702,000,000	1	Keg	1	Dok																		
Pembangunan Jaringan Irigasi DI. Lolak Atas							32,800,000,000			Km		Ha																		
Pembangunan Jaringan Irigasi DI. Lolak Atas								32,800,000,000		Km		Ha																		
Review Desain Bendung Suplesi Kali Putih (Daerah Irigasi Dataran							1,400,000,000		1	Dok	1	Dok																		
Review Desain Bendung Suplesi Kali Putih (Daerah Irigasi Dataran Kotamobagu)								1,400,000,000	1	Dok	1	Dok																		
Review Desain Bendung Suplesi Kali Putih (Daerah Irigasi Dataran							1,000,000,000		1	Dok	1	Dok																		
DED Rehabilitasi Bendung Nuangan								1,000,000,000	1	Dok	1	Dok																		
Penyusunan Dokumen Lingkungan D.I Sangkub							1,500,000,000		1	Dok	1	Dok																		
Penyusunan Dokumen Lingkungan D.I Sangkub								1,500,000,000	1	Dok	1	Dok																		
Kajian Sempadan dan Penetapan Sempadan Irigasi D.I. Dataran							3,000,000,000		1	Dok	1	Dok																		
Kajian Sempadan dan Penetapan Sempadan Irigasi D.I. Dataran Kotamobagu								3,000,000,000	1	Dok	1	Dok																		
Penetapan Sempadan Irigasi D.I. Kosinggolan							1,500,000,000		1	Dok	1	Dok																		
Penetapan Sempadan Irigasi D.I. Kosinggolan								1,500,000,000	1	Dok	1	Dok																		
Penetapan Sempadan Irigasi D.I. Toraut							1,500,000,000		1	Dok	1	Dok																		
Penetapan Sempadan Irigasi D.I. Toraut								1,500,000,000	1	Dok	1	Dok																		
Review Desain D.I Lolak Atas							3,000,000,000		1	Dok	1	Dok																		
Review Desain D.I Lolak Atas								3,000,000,000	1	Dok	1	Dok																		
Review Desain Bendung Suplesi Kali Putih (Daerah Irigasi Dataran Kotamobagu)							2,000,000,000		1	Dok	1	Dok																		
Review Desain Bendung Suplesi Kali Putih (Daerah Irigasi Dataran Kotamobagu)								2,000,000,000	1	Dok	1	Dok																		

Nama Kegiatan	2025		Output		Outcome		2026		Output		Outcome		2027		Output		Outcome		2028		Output		Outcome		2029		Output		Outcome	
Rehabilitasi Daerah Irigasi Dataran Kotamobagu Lanjutan							10,000,000,000			Km		Ha	15,000,000,000			Km		Ha												
Rehabilitasi Daerah Irigasi Dataran Kotamobagu Lanjutan								10,000,000,000		Km		Ha		15,000,000,000		Km		Ha												
Supervisi Rehabilitasi Daerah Irigasi Dataran Kotamobagu Paket I								1,000,000,000	1	Keg	1	Dok		1,500,000,000	1	Keg	1	Dok												
DED Rehabilitasi Bendung Nuangan							1,500,000,000		1	Dok	1	Dok																		
DED Rehabilitasi Bendung Nuangan								1,500,000,000	1	Dok	1	Dok																		
Rehabilitasi Daerah Irigasi Dataran Kotamobagu Paket II													10,000,000,000		10	Km	100	Ha	15,000,000,000		10	km	100	Ha						
Rehabilitasi Daerah Irigasi Dataran Kotamobagu Paket II														10,000,000,000	10	Km	100	Ha		15,000,000,000	10	km	100	Ha						
Supervisi Rehabilitasi Daerah Irigasi Dataran Kotamobagu Paket II														1,000,000,000	1	Keg	1	Dok		1,500,000,000	1	Keg	1	Dok						
Pembangunan Bendung Suplesi Kali Putih													8,500,000,000		0	Km	0	Ha												
Pembangunan Bendung Suplesi Kali Putih														8,500,000,000		Km		Ha												
SID Rehabilitasi Bendung dan Jaringan D.I Bansian dan D.I Kauditan													1,500,000,000		1	Dok	1	Dok												
SID Rehabilitasi Bendung dan Jaringan D.I Bansian dan D.I Kauditan														1,500,000,000	1	Dok	1	Dok												
DED Jaringan Tersier D.I Sangkub													2,000,000,000		1	Dok	1	Dok												
DED Jaringan Tersier D.I Sangkub														2,000,000,000	1	Dok	1	Dok												
Dokumen Lingkungan dan LARAP D.I Lolak Atas													1,500,000,000		1	Dok	1	Dok												
Dokumen Lingkungan dan LARAP D.I Lolak Atas														1,500,000,000	1	Dok	1	Dok												
Rehabilitasi Bendung Nuangan													10,000,000,000		10	Km	10	Ha												
Rehabilitasi Bendung Nuangan														10,000,000,000	10	Km	10	Ha												
Supervisi Rehabilitasi Bendung Nuangan														1,000,000,000	1	Keg	1	Dok												
Kajian Sempadan dan Penetapan Sempadan Daerah Irigasi D.I dataran													3,000,000,000		1	Dok	1	Dok												
Kajian Sempadan dan Penetapan Sempadan Daerah Irigasi D.I dataran Kotamobagu														3,000,000,000	1	Dok	1	Dok												
Pembangunan Jaringan Tersier D.I Kotamobagu																			16,000,000,000		38.2	km	3820	Ha						
Pembangunan Jaringan Tersier D.I Kotamobagu																				16,000,000,000	38.2	km	3820	Ha						
Pembangunan Jaringan Tersier D.I Sangkub																			16,000,000,000		36.01	km	3601	Ha						
Pembangunan Jaringan Tersier D.I Sangkub																				16,000,000,000	36.01	km	3601	Ha						
Studi Jaringan Tersier D.I Kosinggolan																			3,000,000,000		1	Dok	1	Dok						
Studi Jaringan Tersier D.I Kosinggolan																				3,000,000,000	1	Dok	1	Dok						
Studi Jaringan Tersier D.I Toraut																			3,000,000,000		1	Dok	1	Dok						
Studi Jaringan Tersier D.I Toraut																				3,000,000,000	1	Dok	1	Dok						
Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Lolak Atas																									100,000,000,000		0	Km	0	Ha
Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Lolak Atas																										100,000,000,000		Km		Ha
Supervisi Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Lolak Atas																										5,400,000,000	1	Keg	1	Dok
Pembebasan Lahan D.I Lolak Atas							45,000,000,000																							
Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Lolak Atas								45,000,000,000																						
Pembangunan Jaringan Tersier Irigasi D.I Kosinggolan																									10,000,000,000		10	km	100	Ha
Pembangunan Jaringan Tersier Irigasi D.I Kosinggolan																										10,000,000,000	10	km	100	Ha
Supervisi Pembangunan Jaringan Tersier Irigasi D.I Kosinggolan																										1,000,000,000	1	Keg	1	Dok
Pembangunan Jaringan Tersier Irigasi D.I Toraut																									10,000,000,000		10	km	100	Ha
Pembangunan Jaringan Tersier Irigasi D.I Toraut																										10,000,000,000	10	km	100	Ha
Supervisi Pembangunan Jaringan Tersier Irigasi D.I Toraut																										1,000,000,000	1	Keg	1	Dok
SID Rehabilitasi D.I Dataran Kotamobagu							2,000,000,000		1	Dok	1	Dok																		
SID Rehabilitasi D.I Dataran Kotamobagu								2,000,000,000	1	Dok	1	Dok																		
Bangunan Pengendali Sedimen Sungai Inlet Danau Tondano							8,470,200,000		4	Unit	0	Ha																		
Bangunan Pengendali Sedimen Sungai Inlet Danau Tondano								8,470,200,000	4	Unit		Ha																		
Penyusunan Dokumen Lingkungan Bangunan Pengendali Sedimen Inlet							700,000,000		1	Dok	1	Dok																		
Penyusunan Dokumen Lingkungan Bangunan Pengendali Sedimen Inlet Danau Tondano								700,000,000	1	Dok	1	Dok																		
Pembangunan Drainase Danau Tondano													80,000,000,000																	
Pembangunan Drainase Danau Tondano														80,000,000,000	16.00	Km														
Pembangunan Pengaman Pantai Miangas (Penyelesaian)							80,000,000,000		0.762	km	7.62	Ha	46,525,000,000		0.443	Km	4.43	Ha												
Bangunan Pengaman Pantai Miangas (Penyelesaian)								80,000,000,000	0.762	km	7.62	Ha		46,525,000,000	0.443	Km	4.43	Ha												
Pembangunan Pengaman Pantai Tahuna (Lanjutan)							83,095,500,000		0.633	Km	6.333	Ha	83,095,500,000		0.63	Km	6.33	Ha	47,500,000,000		0.633	km	6.333	Ha						
Pembangunan Pengaman Pantai Tahuna (Lanjutan)								83,095,500,000	0.633	Km	6.333	Ha		83,095,500,000	0.633	Km	6.333	Ha		47,500,000,000	0.633	km	6.333	Ha						
Bangunan Pengaman Pantai Pantai Marore (Penyelesaian)							63,000,000,000	1.26	0.63	Km	6.3	Ha	31,500,000,000		0.315	Km	3.15	Ha	31,500,000,000		0.315	Km	3.150	Ha						
Bangunan Pengaman Pantai Pantai Marore (Penyelesaian)								63,000,000,000	0.63	Km	6.3	Ha		31,500,000,000	0.315	Km	3.15	Ha		31,500,000,000	0.315	Km	3.15	Ha						
Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai Pulau-Pulau Terluar di Prov. Sulawesi Utara							120,000,000,000		1	km	5	Ha	120,000,000,000		1	km	5	Ha	120,000,000,000		1	km	5	Ha	120,000,000,000		1	km	5	Ha
Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai Pulau-Pulau Terluar di Prov. Sulawesi Utara								120,000,000,000	1	km	5	Ha		120,000,000,000	1	km	5	Ha		120,000,000,000	1	km	5	Ha		120,000,000,000	1	km	5	Ha
Sabo Dam Gunung Lokon							172,500,000,000		1	Unit	10000	m3	172,500,000,000		1	Unit	10000	m3												
Sabo Dam Gunung Lokon								172,500,000,000	1	Unit	10000	m3		172,500,000,000	1	Unit	10000	m3												
Pembangunan Pengaman Pantai di Kab. Bolaang Mongondow Utara							74,000,000,000		1.6	Km	16	Ha																		
Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai Sampiro								74,000,000,000	1.6	Km	16	Ha																		
Pengendali Banjir Sungai Tondano (NUFREP)							107,923,302,000		1.25	Km	36.35	Ha	360,992,561,000		3.3	Km	96.025	Ha	32,450,000,000		0.3	Km	8.725	Ha						
Pembangunan Bangunan Pengendali Banjir Sungai Tondano dan Long Storage Tahap I								51,086,651,000	0.65	Km	18.9	Ha		16,513,349,000		Km		Ha												
Pembangunan Bangunan Pengendali Banjir Sungai Tondano dan Long Storage Tahap II								53,086,651,000	0.6	Km	17.45	Ha		40,513,349,000	0.3	Km	8.725	Ha		31,200,000,000	0.3	Km	8.725	Ha						
Pembangunan Bangunan Pengendali Banjir Sungai Tondano dan Long Storage Tahap III														296,465,863,000	3	Km	87.3	Ha												
Supervisi Pembangunan Bangunan Pengendali Banjir Sungai Tondano dan Long Storage Tahap I								2,500,000,000	1	Keg	1	Dok																		
Supervisi Pembangunan Bangunan Pengendali Banjir Sungai Tondano dan Long Storage Tahap II								1,250,000,000	1	Keg	1	Dok		2,500,000,000	1	Keg	1	Dok		1,250,000,000	1	Keg	1	Dok						
Supervisi Pembangunan Bangunan Pengendali Banjir Sungai Tondano dan Long Storage Tahap III														5,000,000,000	1	Keg	1	Dok												
Pengendali Banjir Sungai Tikala (NUFREP)							77,076,651,000		2.01	Km	42.00	Ha	293,878,230,000		1.15	Km	24.00	Ha	165,714,881,000		0.58	Km	12.00	Ha						
Pembangunan Bangunan Pengendali Banjir Sungai Tikala Tahap I								53,086,651,000	1.4375	Km	30	Ha		46,913,349,000		Km		Ha												
Pembangunan Bangunan Pengendali Banjir Sungai Tikala Tahap II								20,000,000,000	0.575	Km	12	Ha		130,000,000,000	1.15	Km	24	Ha		50,000,000,000	0.575	Km	12	Ha						
Pembangunan Bangunan Pengendali Banjir Sungai Tikala Tahap III														111,964,881,000	1.3	Km	24	Ha		111,964,881,000	1.3	Km	24	Ha						

Nama Kegiatan	2025		Output		Outcome		2026		Output		Outcome		2027		Output		Outcome		2028		Output		Outcome		2029		Output		Outcome	
Supervisi Pembangunan Bangunan Pengendali Banjir Sungai Tikala Tahap I								2,740,000,000	1	Keg	1	Dok																		
Supervisi Pembangunan Bangunan Pengendali Banjir Sungai Tikala Tahap II								1,250,000,000	1	Keg	1	Dok		2,500,000,000	1	Keg	1	Dok		1,250,000,000	1	Keg	1	Dok						
Supervisi Pembangunan Bangunan Pengendali Banjir Sungai Tikala Tahap III														2,500,000,000	1	Keg	1	Dok		2,500,000,000	1	Keg	1	Dok						
Pengendali Banjir Sungai Sario (NUFREP)							149,653,193,000		1.5	km	30.5	Ha	204,306,386,000		3.825	km	76.25	Ha	54,653,193,000		0.775	km	15.25	Ha						
Pembangunan Bangunan Pengendali Banjir Sungai Sario Tahap I								19,000,000,000	1.5	Km	30.5	Ha		171,000,000,000	1.5	Km	30.5	Ha												
Pembangunan Bangunan Pengendali Banjir Sungai Sario Tahap II														156,459,579,000	2.325	Km	45.75	Ha		52,153,193,000	0.775	Km	15.25	Ha						
Supervisi Pembangunan Bangunan Pengendali Banjir Sungai Sario Tahap I								2,500,000,000	1	Keg	1	Dok		2,500,000,000	1	Keg	2	Dok												
Supervisi Pembangunan Bangunan Pengendali Banjir Sungai Sario Tahap II														5,000,000,000	1	Keg	2	Dok		2,500,000,000	1	Keg	1	Dok						
Pembangunan Pengamanan Pantai di Kab. Kep. Sangihe													50,400,000,000		0.740	Km	7.400	Ha	19,425,000,000		0.247	Km	2.467	Ha						
Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai Pulau Bebalang dan Para (Penyelesaian)														16,800,000,000	0.247	Km	2.467	Ha		16,800,000,000	0.247	Km	2.467	Ha						
Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai Kalasuge														16,800,000,000	0.247	Km	2.467	Ha												
Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai Pulau Beeng														16,800,000,000	0.247	Km	2.467	Ha												
Pembangunan Pengaman Pantai di Kab. Minahasa Selatan dan Kab. Minahasa Tenggara							37,000,000,000		0.85	Km	8.50	Ha	20,000,000,000		0.50	Km	5.00	Ha												
Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai Minanga (Penyelesaian)								37,000,000,000	0.85	Km	8.5	Ha		20,000,000,000	0.5	Km	5	Ha												
Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai Rap-Rap Arakan (Penyelesaian)										Km		Ha				Km		Ha												
Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai Kamenti (Lanjutan)										Km		Ha				Km		Ha												
Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai di Kab. Bolaang Mongondow																									20,000,000,000		1	Km	5	Ha
Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai Lolak																										20,000,000,000	1	Km	5	Ha
Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai Bolaang dan Pantai Ambang																														
Pembangunan Pengaman Pantai Pulau Terluar (Kec. Nanusa Kab. Kep. Talaud)							450,000,000,000		4.5	Km	4.5	Ha	300,000,000,000		3	Km	3	Ha	300,000,000,000		3	Km	3	Ha	270,000,000,000		2.7	Km	2.7	Ha
Pembangunan Pengaman Pantai Pulau Terluar Paket 1 (Pulau Marampit) Kec. Nanusa Kab. Kep. Talaud								150,000,000,000	1.5	Km	1.5	Ha		150,000,000,000	1.5	Km	1.5	Ha		150,000,000,000	1.5	Km	1.5	Ha		120,000,000,000	1.2	Km	1.2	Ha
Pembangunan Pengaman Pantai Pulau Terluar Paket 2 (Pulau Marampit dan Pulau Intata) Kec. Nanusa Kab. Kep. Talaud								150,000,000,000	1.5	Km	1.5	Ha		150,000,000,000	1.5	Km	1.5	Ha		150,000,000,000	1.5	Km	1.5	Ha		150,000,000,000	1.5	Km	1.5	Ha
Pembangunan Pengaman Pantai Pulau Terluar Paket 3 (Pulau Kakorotan dan Pulau Karatung) Kec. Nanusa Kab. Kep. Talaud								150,000,000,000	1.5	Km	1.5	Ha																		
Pembangunan Pengendali Sedimen di Kab. Bolaang Mongondow Selatan													13,101,170,500		1	Unit	1.2	Ha	13,101,170,500						13,101,170,500					
Pembangunan Check Dam Sungai Posilagon														13,101,170,500	1	Unit	1.2	Ha			1	Unit	1	Ha			1	Unit	1	Ha
Pembangunan Check Dam Sungai Ponii																										13,101,170,500	1	Unit	1	Ha
Pembangunan Check Dam Salongo																														
Pembangunan Check Dam Sungai Nunuk																														
Pembangunan Bangunan Pengendali Sedimen Sungai Batu Awang																			25,000,000,000		2	Unit	20	Ha						
Pembangunan Bangunan Pengendali Sedimen Sungai Batu Awang																				25,000,000,000	2	Unit	20	Ha						
Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai Pasir Panjang																			26,363,000,000		0.75	Km	7.5	Ha						
Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai Pasir Panjang																				26,363,000,000	0.75	Km	7.5	Ha						
Pembangunan Drainase Utama dan Kolam Retensi DAS Bailang dan DAS Mahawu							50,000,000,000						50,000,000,000																	
Pembangunan Drainase Utama dan Kolam Retensi DAS Bailang dan DAS Mahawu								50,000,000,000	2	Km	20	Ha		50,000,000,000	2	Km	20	Ha												
Pembangunan Pengendali Banjir Kab. Bolaang Mongondow Timur (Bencana Alam 2021)																			20,000,000,000		2	Km	15	Ha						
Pembangunan Pengendali Banjir Kab. Bolaang Mongondow Timur (Bencana Alam 2021)																				20,000,000,000	2	Km	15	Ha						
Pembangunan Pengendali Banjir Pasca Bencana Alam Kab. Minahasa																			20,000,000,000		1.5	Km	15	Ha						
Pembangunan Pengendali Banjir Pasca Bencana Alam Kab. Minahasa Tenggara (Bencana Alam 2021)																				20,000,000,000	1.5	Km	15	Ha						
	88,000,000,000		0	Km	0	Ha																								
Pembangunan Pengaman Pantai Amurang Kab. Minahasa Selatan (SBSN)		87,078,799,000		Km		Ha																								
Pembangunan Pengaman Pantai Amurang Kab. Minahasa Selatan (SBSN)		921,201,000		Dok		Dok																								
Pembangunan Pengaman Pantai Kab. Bolaang Mongondow Utara (SBSN)	30,000,000,000		0	Km	0	Ha	30,000,000,000		0.64	Km	6.4	Ha	85,000,000,000		1.86	Km	18.6	Ha	50,000,000,000		1.1	Km	11	Ha						
Pembangunan Pengaman Pantai Batupinagut, Boroko, Kuala Utara, Kab. Bolaang Mongondow Utara (SBSN)		29,271,599,000		Km		Ha		30,000,000,000	0.64	Km	6.4	Ha		85,000,000,000	1.86	Km	18.6	Ha		50,000,000,000	1.1	Km	11	Ha						
Supervisi Pembangunan Pengaman Pantai Batupinagut, Boroko, Kuala Utara, Kab. Bolaang Mongondow Utara		728,401,000		Dok		Dok																								
Pengendalian Banjir di Kab. Bolaang Mongondow Utara							91,000,000,000		3.03	Km	30.33	Ha																		
Pembangunan Pengendali Banjir Sungai Andagile								36,000,000,000	1.20	Km	12.00	Ha																		
Pembangunan Pengendali Banjir Sungai Bolangitang								25,000,000,000	0.83	Km	8.33	Ha																		
Pembangunan Pengendali Banjir Sungai Biontong								15,000,000,000	0.50	Km	5.00	Ha																		
Pembangunan Pengendali Banjir Sungai Sangkub								15,000,000,000	0.50	Km	5.00	Ha																		
Pembangunan Pengaman Pantai di Kab. Bolaang Mongondow Timur							57,000,000,000		2.775	Km	27.75	Ha																		
Pembangunan Pengaman Pantai Bulawan								6,500,000,000	0.3	Km	3.00	Ha																		
Pembangunan Pengaman Pantai Tutuyan								17,500,000,000	0.85	Km	8.50	Ha																		
Pembangunan Pengaman Pantai Jiko								15,500,000,000	0.775	Km	7.75	Ha																		
Pembangunan Pengaman Pantai Matabulu								17,500,000,000	0.85	Km	8.50	Ha																		
Pembangunan Bangunan Pengendali Banjir di Kab. Bolaang Mongondow Timur							7,268,461,283		2.85	Km	28.5	Ha																		
Perkuatan Tebing dan Normalisasi Sungai Ongkobu								1,829,047,528	0.5	Km	5.00	Ha																		
Pembangunan Bangunan Pengendali Banjir Sungai Lonsiow								2,665,750,665	0.85	Km	8.50	Ha																		
Pembangunan Bangunan Pengendali Banjir Sungai Molobog								2,773,663,090	1.5	Km	15.00	Ha																		
Pembangunan Pengaman Pantai Desa Tumpaan Kab. Minahasa							25,000,000,000		0.75	Km	7.50	Ha	12,000,000,000		0.65	Km	0.325	Ha												
Pembangunan Pengaman Pantai Desa Tumpaan Kab. Minahasa								25,000,000,000	0.75	Km	7.50	Ha		12,000,000,000	0.65	Km	0.325	Ha												
SID Penyediaan Air Baku Kab. Bolaang Mongondow Timur							2,500,000,000		1	dok	1	dok																		
SID Penyediaan Air Baku Kab. Bolaang Mongondow Timur								2,500,000,000	1	dok	1	dok																		
SID Penyediaan Air Baku Kab. Minahasa							2,500,000,000		1	dok	1	dok																		
SID Penyediaan Air Baku Kab. Minahasa								2,500,000,000	1	dok	1	dok																		
Perencanaan DED SDA Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro							1,000,000,000		1	dok	1	dok																		
Perencanaan DED SDA Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro								1,000,000,000	1	dok	1	dok																		
Penyusunan Dokumen Perencanaan SDA Kab. Kep. Sangihe							1,000,000,000		1	dok	1	dok																		
Penyusunan Dokumen Perencanaan SDA Kab. Kep. Sangihe								1,000,000,000	1	dok	1	dok																		
Penyusunan Dok. RC SDA Kota Tomohon							2,000,000,000		1	dok	1	dok																		
Penyusunan Dok. RC SDA Kota Tomohon								2,000,000,000	1	dok	1	dok																		
SID Pengaman Pantai Pulau-Pulau Kecil Terluar di Sulawesi Utara							4,500,000,000		1	Dok	1	Dok																		
SID Pengaman Pantai Pulau-Pulau Kecil Terluar di Sulawesi Utara								4,500,000,000	1	Dok	1	Dok																		
Dokumen Lingkungan Pengaman Pantai Pulau-Pulau Kecil Terluar di														1,500,000,000		1	Dok	1	Dok											

Nama Kegiatan	2025		Output		Outcome		2026		Output		Outcome		2027		Output		Outcome		2028		Output		Outcome		2029		Output		Outcome	
Dokumen Lingkungan Pengaman Pantai Pulau-Pulau Kecil Terluar di Sulawesi Utara														1,500,000,000	1 Dok		1 Dok													
SID Drainase Utama dan Kolam Retensi DAS Bailang dan DAS Mahawu							3,500,000,000		1 Keg		1 Keg																			
SID Drainase Utama dan Kolam Retensi DAS Bailang dan DAS Mahawu								3,500,000,000	1 Keg		1 Keg																			
Dokumen Lingkungan Drainase Utama dan Kolam Retensi DAS Bailang dan													1,500,000,000		1 Dok		1 Dok													
Dokumen Lingkungan Drainase Utama dan Kolam Retensi DAS Bailang dan DAS Mahawu														1,500,000,000	1 Dok		1 Dok													
SID Pengendali Banjir Kab. Bolaang Mongondow Timur (Bencana Alam													2,500,000,000		1 Dok		1 Dok													
SID Pengendali Banjir Kab. Bolaang Mongondow Timur (Bencana Alam 2021)														2,500,000,000	1 Dok		1 Dok													
Dokumen Lingkungan dan LARAP Pengendali Banjir Kab. Bolaang Mongondow Timur (Bencana Alam 2021)													2,000,000,000		1 Dok		1 Dok													
Dokumen Lingkungan dan LARAP Pengendali Banjir Kab. Bolaang Mongondow Timur (Bencana Alam 2021)														2,000,000,000	1 Dok		1 Dok													
SID Pengendali Banjir Pasca Bencana Alam Kab. Minahasa Tenggara													2,500,000,000		1 Dok		1 Dok													
SID Pengendali Banjir Pasca Bencana Alam Kab. Minahasa Tenggara (Bencana Alam 2021)														2,500,000,000	1 Dok		1 Dok													
Dokumen Lingkungan dan LARAP Pengendali Banjir Pasca Bencana Alam													2,000,000,000		1 Dok		1 Dok													
Dokumen Lingkungan dan LARAP Pengendali Banjir Pasca Bencana Alam Kab. Minahasa Tenggara (Bencana Alam 2021)														2,000,000,000	1 Dok		1 Dok													
Dokumen Lingkungan Pembangunan Pengamanan Pantai di Kab. Kep.							1,500,000,000		1 Dok		1 Dok																			
Dokumen Lingkungan Pembangunan Pengamanan Pantai di Kab. Kep. Sangihe								1,500,000,000	1 Dok		1 Dok																			
Dokumen Lingkungan Pengaman Pantai di Kab. Minahasa Selatan dan Kab.							1,500,000,000		1 Dok		1 Dok																			
Dokumen Lingkungan Pengaman Pantai di Kab. Minahasa Selatan dan Kab. Minahasa Tenggara								1,500,000,000	1 Dok		1 Dok																			
Dokumen Lingkungan Pembangunan Pengendali Sedimen di Kab. Bolaang							1,500,000,000		1 Dok		1 Dok																			
Dokumen Lingkungan Pembangunan Pengendali Sedimen di Kab. Bolaang Mongondow Selatan								1,500,000,000	1 Dok		1 Dok																			
Dokumen Lingkungan Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai Pasir													1,500,000,000		1 Dok		1 Dok													
Dokumen Lingkungan Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai Pasir Panjang														1,500,000,000	1 Dok		1 Dok													
Dokumen Lingkungan Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai di Kab. Bolaang Mongondow													1,500,000,000		1 Dok		1 Dok													
Dokumen Lingkungan Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai di Kab. Bolaang Mongondow														1,500,000,000	1 Dok		1 Dok													
SID Pengendali Banjir di Kab. Bolaang Mongondow Utara							2,000,000,000		1 Dok		1 Dok																			
SID Pengendali Banjir di Kab. Bolaang Mongondow Utara								2,000,000,000	1 Dok		1 Dok																			
SID Pengaman Pantai di Kab. Bolaang Mongondow Timur							2,200,000,000		1 Dok		1 Dok																			
SID Pengaman Pantai di Kab. Bolaang Mongondow Timur								2,200,000,000	1 Dok		1 Dok																			
Penyusunan Dokumen Lingkungan Bangunan Pengaman Pantai di Kab.													1,000,000,000		1 Dok		1 Dok													
Penyusunan Dokumen Lingkungan Bangunan Pengaman Pantai di Kab. Bolaang Mongondow Timur														1,000,000,000	1 Dok		1 Dok													
Pembangunan Pengaman Pantai di Kab. Bolaang Mongondow Timur													85,000,000,000		6 km		0 Ha													
Pembangunan Pengaman Pantai di Kab. Bolaang Mongondow Timur														85,000,000,000	6 km		Ha													
Penyediaan Air Baku di Kec. Tomohon Selatan	12,000,000,000		3.6 km		0.02 m3/dtk																									
Penyediaan Air Baku di Kec. Tomohon Selatan		11,000,000,000	3.6 km		0.02 m3/dtk																									
Supervisi Kegiatan Penyediaan Air Baku di Kec. Tomohon Selatan		1,000,000,000	1 dok		1 dok																									
Penyediaan Air Baku Desa Tumaluntung							20,000,000,000		6 km		0.005 m3/dtk																			
Penyediaan Air Baku Desa Tumaluntung								20,000,000,000	6 Km		0.005 m3/dtk																			
Peningkatan Sumur Air Tanah untuk Prasarana Air Baku 3 Lokasi tersebar di Bolaang Mongondow Raya							4,500,000,000		4.85 km		0.006 m3/dtk																			
Peningkatan Sumur Air Tanah untuk Prasarana Air Baku 3 Lokasi tersebar di Bolaang Mongondow Raya								4,500,000,000	4.85 km		0.006 m3/dtk																			
Rehabilitasi Dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Sumur JIAT untuk Air Baku tersebar di Kab. Bolaang Mongondow							3,500,000,000		4.86 km		0.002 m3/dtk																			
Rehabilitasi Dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Sumur JIAT untuk Air Baku tersebar di Kab. Bolaang Mongondow								3,500,000,000	4.86 km		0.002 m3/dtk																			
Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah Dengan Tenaga Terbarukan (Solar Cell) 3 Lokasi Di Kab. Bolaang Mongondow							8,000,000,000		6.78 km		0.006 m3/dtk																			
Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah Dengan Tenaga Terbarukan (Solar Cell) 3 Lokasi Di Kab. Bolaang Mongondow								8,000,000,000	6.78 km		0.006 m3/dtk																			
Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Tanah Dengan Tenaga Terbarukan (Solar Cell) 3 Lokasi Di Kab. Bolaang Mongondow Utara							8,000,000,000		6.78 km		0.004 m3/dtk																			
Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Tanah Dengan Tenaga Terbarukan (Solar Cell) 3 Lokasi Di Kab. Bolaang Mongondow Utara								8,000,000,000	6.78 km		0.004 m3/dtk																			
Pekerjaan Redevelopment Sumur Tersebar di Kab. Bolaang Mongondow							6,000,000,000		50 Km		0.18 m3/dtk		1,500,000,000		7.5 Km		0.045 m3/dtk		1,500,000,000		7.5 Km		0.05 m3/dtk		1,500,000,000		7.5 Km		0.05 m3/dtk	
Pekerjaan Redevelopment Sumur Tersebar di Kab. Bolaang Mongondow Raya (Swakelola)								6,000,000,000	50 Km		0.18 m3/dtk			1,500,000,000	7.5 Km		0.045 m3/dtk			1,500,000,000	7.5 Km		0.05 m3/dtk			1,500,000,000	7.5 Km		0.05 m3/dtk	
Peningkatan Jaringan Air Tanah Untuk Air Baku Desa Kalinaun							2,500,000,000		2 km		0.002 m3/dtk																			
Peningkatan Jaringan Air Tanah Untuk Air Baku Desa Kalinaun								2,500,000,000	2 km		0.002 m3/dtk																			
Rehabilitasi dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Tanah Untuk Jaringan Air Baku Dengan Tenaga Terbarukan (Solar Cell) 2 Lokasi di Kota							8,500,000,000		2 km		0.005 m3/dtk																			
Rehabilitasi dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Tanah Untuk Jaringan Air Baku Dengan Tenaga Terbarukan (Solar Cell) 2 Lokasi di Kota Tomohon								8,500,000,000	2 Km		0.005 m3/dtk																			
Pembangunan Penyediaan Air Baku Desa Beo							7,252,662,000		2.9 km		0.005 m3/dtk																			
Pembangunan Penyediaan Air Baku Desa Beo								7,252,662,000	2.9 Km		0.005 m3/dtk																			
Penyediaan Air Baku Desa Salibabu							8,282,004,000		1.06 km		0.005 m3/dtk																			
Penyediaan Air Baku Desa Salibabu								8,282,004,000	1.06 Km		0.005 m3/dtk																			
Redevelopment Sumur 20 Lokasi Tersebar di Kab. Minahasa Raya (Swakelola)							4,200,000,000		Km		m3/dtk		6,000,000,000		Km		m3/dtk		6,000,000,000		Km		m3/dtk		6,000,000,000		Km		m3/dtk	
Redevelopment Sumur 20 Lokasi Tersebar di Kab. Minahasa Raya (Swakelola)								4,200,000,000	Km		m3/dtk			6,000,000,000	Km		m3/dtk			6,000,000,000	Km		m3/dtk			6,000,000,000	Km		m3/dtk	
Pembangunan Penyediaan Air Baku Kecamatan Essang							11,373,688,000		6 Km		0.005 m3/dtk																			
Pembangunan Penyediaan Air Baku Kecamatan Essang								11,373,688,000	6 Km		0.005 m3/dtk																			
Rehabilitasi Air Baku Mariri Lama							1,500,000,000		Km		m3/dtk																			
Rehabilitasi Air Baku Mariri Lama								1,500,000,000	1 Km		0.0002 m3/dtk																			
Rehabilitasi dan Peningkatan Air Baku Melonguane													6,300,000,000		1.48 km		0.002 m3/dtk													
Rehabilitasi dan Peningkatan Air Baku Melonguane														6,300,000,000	1.48 km		0.002 m3/dtk													
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Air Baku Tersebar di Kab. Minahasa Utara dan Kota Bitung							15,000,000,000		10 Km		0.0006 m3/dtk																			
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Air Baku Tersebar di Kab. Minahasa Utara dan Kota Bitung								15,000,000,000	10 Km		0.0006 m3/dtk																			
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Air Baku Tersebar di Kab. Minahasa (Swakelola)							5,000,000,000		3 Km		0.0005 m3/dtk																			
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Air Baku Tersebar di Kab. Minahasa (Swakelola)								5,000,000,000	3 Km		0.0005 m3/dtk																			
Peningkatan Air Tanah Untuk Air Baku Desa Binebas							2,116,904,000		0.941 km		0.00175 m3/dtk																			
Peningkatan Air Tanah Untuk Air Baku Desa Binebas								2,116,904,000	0.941 Km		0.00175 m3/dtk																			
Peningkatan Air Tanah Untuk Air Baku Desa Malisade							2,035,119,000		0.97 km		0.00121 m3/dtk																			

Nama Kegiatan	2025		Output		Outcome		2026		Output		Outcome		2027		Output		Outcome		2028		Output		Outcome		2029		Output		Outcome	
Peningkatan Air Tanah Untuk Air Baku Desa Malisade								2,035,119,000	0.97	Km	0.00121	m3/dtk																		
Peningkatan Sumur Air Tanah untuk Prasarana Air Baku 4 Lokasi tersebar di Bolaang Mongondow Raya							6,000,000,000		6.45	km	0.004	m3/dtk																		
Peningkatan Sumur Air Tanah untuk Prasarana Air Baku 4 Lokasi tersebar di Bolaang Mongondow Raya								6,000,000,000	6.45	Km	0.004	m3/dtk																		
SID Penyediaan Air Tanah untuk Air Baku di Kab. Bolaang Mongondow							2,500,000,000		1	Dok	1	Dok																		
SID Penyediaan Air Tanah untuk Air Baku di Kab. Bolaang Mongondow								2,500,000,000	1	Dok	1	Dok																		
Pembangunan Prasarana Pemanfaatan Air Tanah Untuk Air Baku Tersebar													3,750,000,000						4,000,000,000						5,000,000,000					
Pembangunan Prasarana Pemanfaatan Air Tanah Untuk Air Baku Tersebar di Kab. Bolaang Mongondow														3,750,000,000	3850	m	0.006	m3/dtk		4,000,000,000	4000	m	0.01	m3/dtk		5,000,000,000	5300	m	0.009	m3/dtk
Rehabilitasi dan Peningkatan sumur JIAT tersebar di Kabupaten Bolaang Mongondow													2,500,000,000						5,000,000,000						5,000,000,000					
Rehabilitasi dan Peningkatan sumur JIAT tersebar di Kabupaten Bolaang Mongondow														2,500,000,000	2760	m	0.01	m3/dtk		5,000,000,000	5760	m	0.009	m3/dtk		5,000,000,000	4,7	m	0.01	m3/dtk
Pemboran Sumur Air Tanah untuk Air Baku tersebar di Kabupaten Bolaang Mongondow													2,000,000,000		6	Km	0.008	m3/dtk	1,500,000,000		4.5	Km	0.006	m3/dtk	1,500,000,000	3	3	Km	0.004	m3/dtk
Pemboran Sumur Air Tanah untuk Air Baku tersebar di kabupaten Bolaang Mongondow														2,000,000,000	6	Km	0.008	m3/dtk		1,500,000,000	4.5	Km	0.006	m3/dtk		3	3	Km	0.004	m3/dtk
Pembangunan Prasarana Pemanfaatan Air Tanah Untuk Air Baku Tersebar di Minahasa													3,750,000,000		3.85	km	0.006	m3/dtk	4,000,000,000		4	km	0.01	m3/dtk	5,000,000,000		5.3	km	0.009	m3/dtk
Pembangunan Prasarana Pemanfaatan Air Tanah Untuk Air Baku Tersebar di Kab. Minahasa														3,750,000,000	3.85	Km	0.006	m3/dtk		4,000,000,000	4	Km	0.01	m3/dtk		5,000,000,000	5.3	Km	0.009	m3/dtk
Rehabilitasi dan Peningkatan sumur JIAT tersebar di Kabupaten Minahasa Raya													2,500,000,000		2760	km	0.01	m3/dtk	5,000,000,000		5760	km	0.009	m3/dtk	5,000,000,000		4700	km	0.01	m3/dtk
Rehabilitasi dan Peningkatan sumur JIAT tersebar di Kabupaten Minahasa Raya														2,500,000,000	2760	m	0.01	m3/dtk		5,000,000,000	5760	m	0.009	m3/dtk		5,000,000,000	4700	m	0.01	m3/dtk
Pemboran Sumur Air Tanah untuk Air Baku tersebar di kabupaten Minahasa Raya													2,000,000,000			Km		m3/dtk	1,500,000,000			Km		m3/dtk	1,500,000,000			Km		m3/dtk
Pemboran Sumur Air Tanah untuk Air Baku tersebar di Kabupaten Minahasa Raya														2,000,000,000		Km		m3/dtk		1,500,000,000		Km		m3/dtk		1,500,000,000		Km		m3/dtk
Pemboran Sumur Air Tanah untuk Jaringan Irigasi Air Tanah tersebar di							2,250,000,000			Km		m3/dtk	2,250,000,000			Km		m3/dtk	2,250,000,000			Km		m3/dtk	2,250,000,000			Km		m3/dtk
Pemboran Sumur Explorasi/Produksi 4 Lokasi tersebar di kabupaten Minahasa Raya								2,250,000,000		Km		m3/dtk		2,250,000,000		Km		m3/dtk		2,250,000,000		Km		m3/dtk		2,250,000,000		Km		m3/dtk
Perbaikan Sarana Dan Prasarana Jiat di Kabupaten Bolaang Mongondow																									1,500,000,000			Km		m3/dtk
Perbaikan Sarana Dan Prasarana Jiat di Kabupaten Bolaang Mongondow																										1,500,000,000		Km		m3/dtk
SID Penyediaan Air Baku Kab. Bolaang Mongondow Selatan							2,500,000,000		1	Dok	1	Dok																		
SID Penyediaan Air Baku Kab. Bolaang Mongondow Selatan								2,500,000,000	1	Dok	1	Dok																		
SID Penyediaan Air Baku Kota Tomohon							2,500,000,000		1	Dok	1	Dok																		
SID Penyediaan Air Baku Kota Tomohon								2,500,000,000	1	Dok	1	Dok																		
SID Penyediaan Air Baku Kec. Melonguane							2,500,000,000		1	Dok	1	Dok																		
SID Penyediaan Air Baku Kec. Melonguane								2,500,000,000	1	Dok	1	Dok																		
SID Penyediaan Air Baku untuk mendukung DPSP Likupang							2,500,000,000		1	Dok	1	Dok																		
SID Penyediaan Air Baku untuk mendukung DPSP Likupang								2,500,000,000	1	Dok	1	Dok																		
SID Penyediaan Air Baku Kab. Bolaang Mongondow Utara							2,500,000,000		1	Dok	1	Dok																		
SID Penyediaan Air Baku Kab. Bolaang Mongondow Utara								2,500,000,000	1	Dok	1	Dok																		
SID Penyediaan Air Tanah untuk Air Baku di Kab. Minahasa Utara							2,500,000,000		1	Dok	1	Dok																		
SID Penyediaan Air Tanah untuk Air Baku di Kab. Minahasa Utara								2,500,000,000	1	Dok	1	Dok																		
Pembangunan Sarana Prasarana Penyediaan Air Baku Kab. Bolaang Mongondow Selatan													30,000,000,000		3	km	0.01	m3/dtk												
Pembangunan Sarana Prasarana Penyediaan Air Baku Kab. Bolaang Mongondow Selatan														30,000,000,000	3	km	0.01	m3/det												
Pembangunan Sarana Prasarana Penyediaan Air Baku Kab. Bolaang Mongondow Timur													30,000,000,000		3	km	0.01	m3/dtk												
Pembangunan Sarana Prasarana Penyediaan Air Baku Kab. Bolaang Mongondow Timur														30,000,000,000	3	km	0.01	m3/det												
Pembangunan Sarana Prasarana Penyediaan Air Baku Kota Tomohon													30,000,000,000		3	km	0.01	m3/dtk												
Pembangunan Sarana Prasarana Penyediaan Air Baku Kota Tomohon														30,000,000,000	3	km	0.01	m3/det												
Pembangunan Sarana Prasarana Penyediaan Air Baku Kab. Bolaang Mongondow Utara													30,000,000,000		3	km	0.01	m3/dtk												
Pembangunan Sarana Prasarana Penyediaan Air Baku Kab. Bolaang Mongondow Utara														30,000,000,000	3	km	0.01	m3/det												
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Air Baku Kec. Langowan							14,500,000,000						30,000,000,000		3	km	0.01	m3/dtk												
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Air Baku Kec. Langowan								13,900,000,000	5	Km	0.01	m3/dtk		30,000,000,000	3	km	0.01	m3/det												
Supervisi Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Air Baku Kec. Langowan								600,000,000	1	Dok	1	Dok																		
Pembangunan Penyediaan Air Baku di Kec. Pinolosian Tengah													30,000,000,000		3	km	0.01	m3/dtk												
Pembangunan Penyediaan Air Baku di Kec. Pinolosian Tengah														30,000,000,000	3	km	0.01	m3/det												
Rehabilitasi Embung Werdhi Agung																									3,000,000,000			Km		m3/dtk
Rehabilitasi Embung Werdhi Agung																										3,000,000,000		Km		m3/dtk
Rehabilitasi Embung Tadoy																									3,000,000,000			Km		m3/dtk
Rehabilitasi Embung Tadoy																										3,000,000,000		Km		m3/dtk
Rehabilitasi Embung Tote																									3,000,000,000			Km		m3/dtk
Rehabilitasi Embung Tote																										3,000,000,000		Km		m3/dtk
Rehabilitasi Embung Tanawangko																									3,000,000,000			Km		m3/dtk
Rehabilitasi Embung Tanawangko																										3,000,000,000		Km		m3/dtk
SID Pengendalian Banjir di Sungai Bailang							2,000,000,000		1	Dok	1	Dok																		
SID Pengendalian Banjir di Sungai Bailang								2,000,000,000	1	Dok	1	Dok																		
SID Pengendalian Banjir di Sungai Mahawu							2,000,000,000		1	Dok	1	Dok																		
SID Pengendalian Banjir di Sungai Mahawu								2,000,000,000	1	Dok	1	Dok																		
SID Pengendalian Banjir di Sungai Malalayang							2,000,000,000		1	Dok	1	Dok																		
SID Pengendalian Banjir di Sungai Malalayang								2,000,000,000	1	Dok	1	Dok																		
SID Kolam Retensi DAS Bailang													2,000,000,000		1	Dok	1	Dok												
SID Kolam Retensi DAS Bailang														2,000,000,000	1	Dok	1	Dok												
Pembangunan Kolam Retensi DAS Bailang																			20,000,000,000											
Pembangunan Kolam Retensi DAS Bailang																				20,000,000,000	1	Unit	1	Unit						
Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai Modisi							56,000,000,000		1.4	Km	10	Ha																		
Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai Modisi								56,000,000,000	1.4	Km	10	Ha																		
Pembangunan Pengaman Pantai Nusa Tabukan Kab. Kep. Sangihe							40,000,000,000		0.75	Km	7.5	Ha																		
Pembangunan Pengaman Pantai Nusa Tabukan Kab. Kep. Sangihe								40,000,000,000	0.75	Km	7.5	Ha																		
Pembanguanan Bangunan Pengaman Pantai Likuang (Penyelesaian)							37,500,000,000		0.5	Km	5	Ha																		
Pembanguanan Bangunan Pengaman Pantai Likuang (Penyelesaian)								37,500,000,000	0.5	Km	5	Ha																		
Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai Tamako dan Manganitu													150,000,000,000		2	Km	20	Ha												
Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai Tamako dan Manganitu														150,000,000,000	2	Km	20	Ha												
SID Pembangunan Pengaman Pantai di Kab. Kep. Sangihe							2,500,000,000		1	Dok	1	Dok																		
SID Pembangunan Pengaman Pantai di Kab. Kep. Sangihe								2,500,000,000	1	Dok	1	Dok																		
SID Pembangunan Pengaman Pantai di Kab. Kep. SITARO							2,500,000,000		1	Dok	1	Dok																		
SID Pembangunan Pengaman Pantai di Kab. Kep. SITARO								2,500,000,000	1	Dok	1	Dok																		

Nama Kegiatan	2025		Output		Outcome		2026		Output		Outcome		2027		Output		Outcome		2028		Output		Outcome		2029		Output		Outcome	
SID Pembangunan Pengaman Pantai di Kab. Kep. Talaud							2,500,000,000		1	Dok	1	Dok																		
SID Pembangunan Pengaman Pantai di Kab. Kep. Talaud								2,500,000,000	1	Dok	1	Dok																		
Pembangunan Pengaman Pantai Naha													20,000,000,000		0.5	Km	5	Ha												
Pembangunan Pengaman Pantai Naha														20,000,000,000	0.5	Km	5	Ha												
Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai Ondong													20,000,000,000		0.4	Km	4	Ha												
Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai Ondong														20,000,000,000	0.4	Km	4	Ha												
Perkuatan Tebing Sungai Desa Bolangaso Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan													24,996,000,000		1.2	Km	8	Ha												
Perkuatan Tebing Sungai Desa Bolangaso Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan														24,996,000,000	1.2	Km	8	Ha												
Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Posilagon							18,561,000,000		0.8	Km	0	Ha																		
Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Posilagon								18,561,000,000	0.8	Km		Ha																		
Pembangunan Check Dam Molibagu													18,811,000,000		1	Unit	0	Ha												
Pembangunan Check Dam Molibagu														18,811,000,000	1	Unit		Ha												
Pembangunan Check Dam Sungai Bolangaso													3,449,000,000		1	Unit	0	Ha												
Pembangunan Check Dam Sungai Bolangaso														3,449,000,000	1	Unit		Ha												
Pembangunan Check Dam Sungai Bolangaso													8,595,000,000		1	Unit	0	Ha												
Pembangunan Sabo Dam Sungai Moayat														8,595,000,000	1	Unit		Ha												
SID Pengendali Sedimen di Kab. Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu							2,000,000,000		1	Dok	1	Dok																		
SID Pengendali Sedimen di Kab. Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu								2,000,000,000	1	Dok	1	Dok																		
Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai di Kec. Posigadan							5,000,000,000		0.5	Km	5	Ha																		
Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai di Kec. Posigadan								5,000,000,000	0.5	Km	5	Ha																		
Normalisasi dan Pembangunan Tanggul Sungai Londolimbale dan Danau Seledan Tombatu							2,484,035,154		0.2	Km	2	Ha																		
Normalisasi dan Pembangunan Tanggul Sungai Londolimbale dan Danau Seledan Tombatu								2,484,035,154	0.2	Km	2	Ha																		
Normalisasi dan Pembangunan Tanggul Sungai Lalaus							6,374,382,000		0.6	Km	6	Ha																		
Normalisasi dan Pembangunan Tanggul Sungai Lalaus								6,374,382,000	0.6	Km	6	Ha																		
Normalisasi dan Pembangunan Tanggul Sungai Abuang							13,563,345,000		1.2	Km	10	Ha																		
Normalisasi dan Pembangunan Tanggul Sungai Abuang								13,563,345,000	1.2	Km	10	Ha																		
Normalisasi dan Pembangunan Tanggul Sungai Sungai Palaus							9,060,164,000		0.7	Km	7	Ha																		
Normalisasi dan Pembangunan Tanggul Sungai Sungai Palaus								9,060,164,000	0.7	Km	7	Ha																		
Pembangunan Bangunan Pengendali banjir di Kab. Kepl. Sangihe							15,000,000,000		0.7	Km	7	Ha																		
Pembangunan Pengendali Banjir Sungai Tawara								15,000,000,000	0.7	Km	7	Ha																		
Pembangunan Pengendali Banjir Sungai Kadadima														15,000,000,000	0.7	Km	7	Ha												
Revitalisasi Danau Tondano (Lanjutan)	75,000,000,000			Km		m3	125,000,000,000		3	Km	0	m3	125,000,000,000		3	Km	0	m3	125,000,000,000		3	Km	0	m3	125,000,000,000		3	Km	0	m3
Revitalisasi Danau Tondano (Lanjutan)		75,000,000,000		Km		m3		120,000,000,000	3	Km	0	m3		120,000,000,000	3	Km	0	m3		120,000,000,000	3	Km	0	m3		120,000,000,000	3	Km	0	m3
Supervisi Revitalisasi Danau Tondano		5,000,000,000	1	Dok	1	Dok		5,000,000,000	1	Dok	1	Dok		5,000,000,000	1	Dok	1	Dok		5,000,000,000	1	Dok	1	Dok		5,000,000,000	1	Dok	1	Dok
Penyusunan Dokumen Lingkungan dan LARAP Bendungan Sawangan							4,000,000,000		1	Dok	1	Dok																		
Penyusunan Dokumen Lingkungan dan LARAP Bendungan Sawangan								4,000,000,000	1	Dok	1	Dok																		
Pembangunan Bendungan Sawangan Kabupaten Minahasa	41,283,523,000						126,000,000,000						120,000,000,000		0	Bendungan	0	0	120,000,000,000		1	Bendungan	1	Bendungan						
Pembangunan Bendungan Sawangan Kabupaten Minahasa		40,783,523,000	0	Bendungan				120,000,000,000	0	Bendungan				120,000,000,000	0	Bendungan				120,000,000,000	1	Bendungan	1	Bendungan						
Supervisi Konstruksi Pembangunan Bendungan Sawangan Kabupaten Minahasa		500,000,000	1	Dok	1	Dok		6,000,000,000	1	Dok	1	Dok																		
Model Test dan Sertifikasi Desain Bendungan Sawangan Kabupaten Minahasa							7,611,211,000		1	Dok	1	Dok																		
Model Test dan Sertifikasi Desain Bendungan Sawangan Kabupaten Minahasa								7,611,211,000	1	Dok	1	Dok																		
Penyusunan Rencana Tindak Darurat (RTD) Bendungan Sawangan																			2,000,000,000		1	Dok	1	Dok						
Penyusunan Rencana Tindak Darurat (RTD) Bendungan Sawangan																				2,000,000,000	1	Dok	1	Dok						
Sertifikasi Izin Operasi Bendungan Sawangan																			2,000,000,000		1	Dok	1	Dok						
Sertifikasi Izin Operasi Bendungan Sawangan																				2,000,000,000	1	Dok	1	Dok						
FS Bendungan Toraut-Kosinggolan							2,500,000,000		1	Dok	1	Dok																		
FS Bendungan Toraut-Kosinggolan								2,500,000,000	1	Dok	1	Dok																		
Studi Potensi Bendungan di Wilayah Sungai TOSATAM							2,500,000,000		1	Dok	1	Dok																		
Studi Potensi Bendungan di Wilayah Sungai TOSATAM								2,500,000,000	1	Dok	1	Dok																		
Studi Potensi Bendungan di Wilayah Sungai Dumoga Sangkub							2,500,000,000		1	Dok	1	Dok																		
Studi Potensi Bendungan di Wilayah Sungai Dumoga Sangkub								2,500,000,000	1	Dok	1	Dok																		
SID Pembangunan dan Rehabilitasi Embung di Prov. Sulawesi Utara							2,000,000,000		1	Dok	1	Dok																		
SID Pembangunan dan Rehabilitasi Embung di Prov. Sulawesi Utara								2,000,000,000	1	Dok	1	Dok																		
SID Bendungan Kali Sario													2,000,000,000		1	Dok	1	Dok												
SID Bendungan Kali Sario														2,000,000,000	1	Dok	1	Dok												
SID Bendungan Kali Malalayang													2,000,000,000		1	Dok	1	Dok												
SID Bendungan Kali Malalayang														2,000,000,000	1	Dok	1	Dok												
SID Bendungan Girian													2,000,000,000		1	Dok	1	Dok												
SID Bendungan Girian														2,000,000,000	1	Dok	1	Dok												
DD Bendungan Kali Sario																			2,000,000,000		1	Dok	1	Dok						
DD Bendungan Kali Sario																				2,000,000,000	1	Dok	1	Dok						
DD Bendungan Kali Malalayang																			2,000,000,000		1	Dok	1	Dok						
DD Bendungan Kali Malalayang																				2,000,000,000	1	Dok	1	Dok						
DD Bendungan Girian																			2,000,000,000		1	Dok	1	Dok						
DD Bendungan Girian																				2,000,000,000	1	Dok	1	Dok						
Studi LARAP dan Penyusunan Dokumen Lingkungan Bendungan Kali Sario																									2,000,000,000		1	Dok	1	Dok
Studi LARAP dan Penyusunan Dokumen Lingkungan Bendungan Kali Sario																										2,000,000,000	1	Dok	1	Dok
Studi LARAP dan Penyusunan Dokumen Lingkungan Bendungan Kali Malalayang																									2,000,000,000		1	Dok	1	Dok
Studi LARAP dan Penyusunan Dokumen Lingkungan Bendungan Kali Malalayang																										2,000,000,000	1	Dok	1	Dok
Studi LARAP dan Penyusunan Dokumen Lingkungan Bendungan Girian																									2,000,000,000		1	Dok	1	Dok
Studi LARAP dan Penyusunan Dokumen Lingkungan Bendungan Girian																										2,000,000,000	1	Dok	1	Dok
Sertifikasi Desain Bendungan Kali Sario																														
Sertifikasi Desain Bendungan Kali Sario																														
Sertifikasi Desain Bendungan Kali Malalayang																														
Sertifikasi Desain Bendungan Kali Malalayang																														
Sertifikasi Desain Bendungan Girian																														
Sertifikasi Desain Bendungan Girian																														

Nama Kegiatan	2025		Output		Outcome		2026		Output		Outcome		2027		Output		Outcome		2028		Output		Outcome		2029		Output		Outcome	
SID Bendungan Abuang																														
SID Bendungan Abuang																														
SID Bendungan Dumoga																														
SID Bendungan Dumoga																														
SID Bendungan Ranoyapo																														
SID Bendungan Ranoyapo																														
SID Penyediaan Air Baku Kab. Kep. SITARO																			2,500,000,000											
SID Penyediaan Air Baku Kab. Kep. SITARO																				2,500,000,000	1	Dok	1	Dok						
SID Penyediaan Air Baku Kab. Kep. Sangihe																			2,500,000,000											
SID Penyediaan Air Baku Kab. Kep. Sangihe																				2,500,000,000	1	Dok	1	Dok						
SID Penyediaan Air Baku Kab. Kep. Talaud																			2,500,000,000											
SID Penyediaan Air Baku Kab. Kep. Talaud																				2,500,000,000	1	Dok	1	Dok						
SID Penyediaan Air Baku Kab. Minahasa																			2,500,000,000											
SID Penyediaan Air Baku Kab. Minahasa																				2,500,000,000	1	Dok	1	Dok						
SID Penyediaan Air Baku Kab. Minahasa Utara																			2,500,000,000											
SID Penyediaan Air Baku Kab. Minahasa Utara																				2,500,000,000	1	Dok	1	Dok						
SID Penyediaan Air Baku Kab. Minahasa Tenggara																			2,500,000,000											
SID Penyediaan Air Baku Kab. Minahasa Tenggara																				2,500,000,000	1	Dok	1	Dok						
SID Penyediaan Air Baku Kab. Bolaang Mongondow Timur																			2,500,000,000											
SID Penyediaan Air Baku Kab. Bolaang Mongondow Timur																				2,500,000,000	1	Dok	1	Dok						
Penyediaan Air Baku Kab. Kep. Sitaro																									20,000,000,000		6	Km	0.02	m3/dtk
Penyediaan Air Baku Kab. Kep. Sitaro																										20,000,000,000	6	Km	0.02	m3/dtk
SID Bangunan Pengaman Pantai di Kab. Minahasa																									2,000,000,000		1	Dok	1	Dok
SID Bangunan Pengaman Pantai di Kab. Minahasa																										2,000,000,000	1	Dok	1	Dok
SID Bangunan Pengaman Pantai di Kab. Minahasa Utara																									2,000,000,000		1	Dok	1	Dok
SID Bangunan Pengaman Pantai di Kab. Minahasa Utara																										2,000,000,000	1	Dok	1	Dok
SID Bangunan Pengaman Pantai di Kab. Minahasa Tenggara																									2,000,000,000		1	Dok	1	Dok
SID Bangunan Pengaman Pantai di Kab. Minahasa Tenggara																										2,000,000,000	1	Dok	1	Dok
SID Bangunan Pengaman Pantai di Kab. Bolaang Mongondow Selatan																									2,000,000,000		1	Dok	1	Dok
SID Bangunan Pengaman Pantai di Kab. Bolaang Mongondow Selatan																										2,000,000,000	1	Dok	1	Dok
SID Bangunan Pengaman Pantai di Kab. Bolaang Mongondow Utara																									2,000,000,000		1	Dok	1	Dok
SID Bangunan Pengaman Pantai di Kab. Bolaang Mongondow Utara																										2,000,000,000	1	Dok	1	Dok
Pembangunan Pengaman Pantai di Kab. Minahasa																														
Pembangunan Pengaman Pantai di Kab. Minahasa																														
Pembangunan Pengaman Pantai di Kab. Minahasa Utara																														
Pembangunan Pengaman Pantai di Kab. Minahasa Utara																														
Pembangunan Pengaman Pantai di Kab. Bolaang Mongondow Selatan																														
Pembangunan Pengaman Pantai di Kab. Bolaang Mongondow Selatan																														
Penyediaan Air Baku Kab. Minahasa Tenggara																									20,000,000,000		6	Km	0.02	m3/dtk
Penyediaan Air Baku Kab. Minahasa Tenggara																										20,000,000,000	6	Km	0.02	m3/dtk
Pembangunan Pengaman Pantai di Kab. Minahasa Tenggara																														
Pembangunan Pengaman Pantai di Kab. Minahasa Tenggara																														
Pembangunan Pengaman Pantai di Kab. Kep. SITARO																														
Pembangunan Pengaman Pantai di Kab. Kep. SITARO																														
Penataan Kawasan Bendungan Kuwil Kawangkoan							38,000,000,000																							
Penataan Kawasan Bendungan Kuwil Kawangkoan								38,000,000,000																						
Penataan Kawasan Bendungan Lolak							45,000,000,000																							
Penataan Kawasan Bendungan Lolak								45,000,000,000																						
Sertifikasi Izin Operasi Bendungan Lolak							3,000,000,000		1	Dok	1	Dok																		
Sertifikasi Izin Operasi Bendungan Lolak								3,000,000,000	1	Dok	1	Dok																		
Review Rencana Tindak Darurat Bendungan Lolak							2,000,000,000		1	Dok	1	Dok																		
Review Rencana Tindak Darurat Bendungan Lolak								2,000,000,000	1	Dok	1	Dok																		
Kajian Penetapan Zona Pemanfaatan Waduk dan Garis Sempadan Waduk Kuwil Kawangkoan							3,000,000,000		1	Dok	1	Dok																		
Kajian Penetapan Zona Pemanfaatan Waduk dan Garis Sempadan Waduk Kuwil Kawangkoan								3,000,000,000	1	Dok	1	Dok																		
Kajian Penetapan Zona Pemanfaatan Waduk dan Garis Sempadan Waduk Lolak							3,000,000,000		1	Dok	1	Dok																		
Kajian Penetapan Zona Pemanfaatan Waduk dan Garis Sempadan Waduk Lolak								3,000,000,000	1	Dok	1	Dok																		
Pembangunan Pengendali Banjir Sungai di Kota Manado																														
Pembangunan Pengendali Banjir Sungai di Kota Manado																														
Pembangunan Pengaman Pantai di Kota Manado																														
Pembangunan Pengaman Pantai di Kota Manado																														
Pembangunan Penyediaan Air Baku di Kota Manado																														
Pembangunan Penyediaan Air Baku di Kota Manado																														
Pembangunan Embung di Kota Manado																														
Pembangunan Embung di Kota Manado																														
SID Pengendalian Banjir di Kota Manado																									2,200,000,000		1	Dok	1	Dok
SID Pengendalian Banjir di Kota Manado																										2,200,000,000	1	Dok	1	Dok
Pembangunan Pengaman Pantai di Desa Tawoali																									10,000,000,000		0.35	Km	0.35	Ha
Pembangunan Pengaman Pantai di Desa Tawoali																										10,000,000,000	0.35	Km	0.35	Ha
SID Revitalisasi Danau di Provinsi Sulawesi Utara							4,000,000,000																							
Studi Revitalisasi Danau di Provinsi Sulawesi Utara								4,000,000,000	1	Dok	1	Dok																		
Penyusunan Dokumen Lingkungan dan LARAP kegiatan Revitalisasi Danau di Provinsi Sulawesi Utara													1,700,000,000																	
Penyusunan Dokumen Lingkungan dan LARAP kegiatan Revitalisasi Danau di Provinsi Sulawesi Utara														1,700,000,000	1	Dok	1	Dok												
Revitalisasi Danau Bulilin																														
Revitalisasi Danau Bulilin																														
Supervisi Revitalisasi Danau Bulilin																														
Revitalisasi Danau Mahena																			26,500,000,000											
Revitalisasi Danau Mahena																				25,000,000,000										
Supervisi Revitalisasi Danau Mahena																				1,500,000,000										
Revitalisasi Danau Pangolombian																			26,500,000,000											
Revitalisasi Danau Pangolombian																				25,000,000,000										
Supervisi Revitalisasi Danau Pangolombian																				1,500,000,000										
Revitalisasi Danau Moat																			26,500,000,000											
Revitalisasi Danau Moat																				25,000,000,000										
Supervisi Revitalisasi Danau Moat																				1,500,000,000										